



Katalog: 8201008
ISSN 2745-6730

DISTRIBUSI **PERDAGANGAN KOMODITAS** **BERAS** **INDONESIA** **2025**

Volume 10, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

DISTRIBUSI

PERDAGANGAN KOMODITAS

BERAS

INDONESIA

2025

Volume 10, 2025





DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS BERAS INDONESIA 2025

Volume 10, 2025



Katalog: 8201008

ISSN: 2745-6730

Nomor Publikasi: 06100.25053

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xii+187 halaman

Penyusun Naskah:

Direktorat Statistik Distribusi

Penyunting:

Direktorat Statistik Distribusi

Pembuat Kover:

Direktorat Statistik Distribusi

Penerbit:

@Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

www.canva.com

www.freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



TIM PENYUSUN

DISTRIBUSI PERDAGANGAN

KOMODITAS BERAS INDONESIA 2025

Volume 10, 2025

ISSN 2745-6730

Pengarah:

Pudji Ismartini

Penanggung Jawab Umum:

Sarpono

Penanggung Jawab Teknis:

Hajizi

Penyunting:

Wembri Suska

Penulis Naskah & Pengolah Data:

Ira Isnawati

Suheri

Fani Muiz Subhi

Nabella Intan Karasta

Penata Letak:

Sinta Pratiwi

Pembuat Kover:

Aprilia Eka Sandjaja

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga publikasi Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia yang dirilis tahunan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dapat terbit tepat waktu. Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia tahun 2025 merupakan salah satu dari empat jenis publikasi hasil Survei Pola Distribusi Barang beberapa komoditas di Indonesia tahun 2025. Kegiatan pendataan lapangan dilakukan pada Juli – Agustus 2025.

Publikasi ini memuat kajian ringkas mengenai rantai distribusi komoditas beras yang diteliti mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran sampai ke konsumen akhir. Informasi yang disajikan adalah pola distribusi perdagangan serta margin perdagangan dan pengangkutan (MPP).

Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini. Kami berharap publikasi ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung perumusan kebijakan terkait tata kelola distribusi beras, baik oleh pemerintah maupun dunia usaha, serta digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

Jakarta, Desember 2025
Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti



DAFTAR ISI

DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS BERAS INDONESIA

Volume 10, 2025

2025

KATA PENGANTAR	v	2.10	Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek	14
DAFTAR ISI	vii	2.11	Mirroring Wilayah Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi	15
DAFTAR TABEL	ix	2.12	Tata Cara Pembacaan Pola	15
DAFTAR GAMBAR	xi	BAB III	POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS	19
BAB I PENDAHULUAN	1	3.1	Gambaran Umum	19
1.1 Latar Belakang	1	3.2	Pola Distribusi Nasional	26
1.2 Landasan Hukum	3	3.3	Provinsi Aceh	33
1.3 Tujuan Survei	3	3.4	Provinsi Sumatera Utara	37
1.4 Cakupan Komoditas	3	3.5	Provinsi Sumatera Barat	41
BAB II METODOLOGI	5	3.6	Provinsi Riau	45
2.1 Ruang Lingkup	5	3.7	Provinsi Jambi	49
2.2 Cakupan Kegiatan Usaha	5	3.8	Provinsi Sumatera Selatan	53
2.3 Kerangka Sampel	6	3.9	Provinsi Bengkulu	57
2.4 Alokasi Sampel	6	3.10	Provinsi Lampung	61
2.5 Metode Pemilihan Sampel	6	3.11	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	65
2.6 Metode Pengumpulan Data	7	3.12	Provinsi Kepulauan Riau	69
2.7 Konsep dan Definisi	7	3.13	Provinsi DKI Jakarta	73
2.8 Pola Utama Distribusi Perdagangan	13	3.14	Provinsi Jawa Barat	77
2.9 Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPP_T)	13	3.15	Provinsi Jawa Tengah	81

3.16	Provinsi D.I. Yogyakarta	85
3.17	Provinsi Jawa Timur	89
3.18	Provinsi Banten	93
3.19	Provinsi Bali	97
3.20	Provinsi Nusa Tenggara Barat	101
3.21	Provinsi Nusa Tenggara Timur	105
3.22	Provinsi Kalimantan Barat	109
3.23	Provinsi Kalimantan Tengah	113
3.24	Provinsi Kalimantan Selatan	117
3.25	Provinsi Kalimantan Timur	121
3.26	Provinsi Kalimantan Utara	125
3.27	Provinsi Sulawesi Utara	129
3.28	Provinsi Sulawesi Tengah	133
3.29	Provinsi Sulawesi Selatan	137
3.30	Provinsi Sulawesi Tenggara	141
3.31	Provinsi Gorontalo	145
3.32	Provinsi Sulawesi Barat	149

3.33	Provinsi Maluku	153
3.34	Provinsi Maluku Utara	157
3.35	Provinsi Papua Barat	161
3.36	Provinsi Papua Barat Daya	165
3.37	Provinsi Papua	169
3.38	Provinsi Papua Selatan	173
3.39	Provinsi Papua Tengah	177
3.40	Provinsi Papua Pegunungan	181
BAB IV RINGKASAN HASIL		185
DAFTAR PUSTAKA		187

Tabel 1	Cakupan Komoditas Beras pada Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan 2025 Menurut KBLI 2020	5
Tabel 2	Matriks <i>Mirroring</i> Wilayah Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi	15
Tabel 3	Ikon Komoditas Beras	16
Tabel 4	Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPP _T) Komoditas Beras di Indonesia, 2025	30



Gambar 1	Flowchart Penentuan Pelaku Usaha	12
Gambar 2	Persentase Rata-Rata Konsumsi per Kapita Menurut Jenis Makanan Sumber Karbohidrat, 2025	19
Gambar 3	Rata-Rata Konsumsi Beras Indonesia per Kapita Sebulan (kg), 2021-2025	20
Gambar 4	Produksi Beras Indonesia per Bulan, 2024 dan 2025	20
Gambar 5	Perbandingan Luas Panen, Produksi Padi, dan Produksi Beras Indonesia, 2024 dan 2025	21
Gambar 6	Peta Wilayah Produksi Beras Indonesia, 2025.....	22
Gambar 7	Peta Wilayah Konsumsi Beras Indonesia, 2025.....	23
Gambar 8	Peta Perbandingan Produksi dan Konsumsi Beras Indonesia, 2025.....	24
Gambar 9	Pola Utama Distribusi Perdagangan Beras Indonesia, 2025	26
Gambar 10	Potensi Pola Terpanjang Distribusi Perdagangan Beras Indonesia, 2025	28
Gambar 11	Potensi Pola Terpendek Distribusi Perdagangan Beras Indonesia, 2025	28
Gambar 12	Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPP_T) Komoditas Beras Menurut Provinsi, 2025.	31





1.1 LATAR BELAKANG

Distribusi perdagangan merupakan keseluruhan bentuk kegiatan perdagangan, mulai dari pengadaan komoditas dari produsen sampai dengan penyerahan komoditas tersebut kepada konsumen. Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen, terdapat beberapa jenis sistem distribusi yaitu:

1. Distribusi langsung, yaitu produsen menyalurkan hasil produksinya langsung kepada konsumen tanpa menggunakan saluran distribusi, seperti penyaluran hasil pertanian oleh petani ke pasar langsung.
2. Distribusi semi langsung, yaitu penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen melalui badan perantara atau toko milik produsen itu sendiri.
3. Distribusi tidak langsung. Pada sistem ini produsen tidak langsung menjual hasil produksinya kepada konsumen akhir melainkan melalui perantara atau saluran distribusi.

Sistem distribusi tidak langsung berkaitan erat dengan peran dari pedagang perantara, baik pedagang besar

(*wholesaler*) maupun pedagang eceran (*retailer*). Pedagang perantara tersebut berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen sehingga dalam pendistribusiannya dapat terbentuk rantai distribusi perdagangan yang terdiri dari produsen, pedagang perantara, dan konsumen akhir.

Rantai distribusi mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat karena melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan proses kegiatan ekonomi suatu wilayah. Rantai distribusi dikatakan efisien jika pergerakan suatu komoditas dari produsen ke konsumen ditempuh dengan biaya yang lebih murah dengan pembagian nilai tambah yang adil untuk setiap pelaku perdagangan yang terlibat dalam pendistribusian diiringi dengan tendensi harga yang terjangkau oleh konsumen.

Di sisi lain, setiap wilayah di Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang berbeda dalam usaha pemenuhan kebutuhan domestik. Hal tersebut dapat dipengaruhi baik oleh sumber daya alam maupun

kebudayaan suatu wilayah sebagai sumber daya manusia dalam menghasilkan komoditas tertentu. Provinsi yang lebih unggul (sentra) dapat memenuhi permintaan dari provinsi lain dan sebaliknya, provinsi yang kurang unggul dapat menjadi tujuan pasar bagi provinsi sentra. Dengan demikian, terkait kegiatan distribusi perdagangan komoditas maka rantai utama distribusi suatu provinsi dapat berasal dari produksi di dalam provinsi atau luar provinsi.

Permasalahan rantai distribusi harus diperhatikan khususnya pada komoditas kebutuhan pokok seperti beras. Bagi mayoritas penduduk Indonesia, beras merupakan makanan pokok dan sumber pemenuhan karbohidrat utama. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata konsumsi beras sekitar 82 persen dari sumber karbohidrat utama dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, aspek penyediaan dan distribusi beras menjadi hal yang sangat penting mengingat jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya.

Dilihat dari sisi produktivitas, meskipun memiliki potensi produksi yang cukup memadai, distribusi beras perlu diperhatikan guna menghindari disparitas harga yang

terlampau tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen. *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) menyatakan bahwa panjangnya rantai distribusi komoditas pertanian seperti beras akan berdampak pada melonjaknya harga hingga dua sampai tiga kali lipat di tingkat konsumen, dibandingkan harga di tingkat produsen.

Untuk mengetahui gambaran lebih lanjut, pada 2025 BPS menyelenggarakan Survei Pola Distribusi (POLDIS) Perdagangan Komoditas Strategis yang diantaranya adalah komoditas beras.

Survei dilakukan pada sejumlah kabupaten/kota terpilih di seluruh provinsi di Indonesia, meliputi pelaku distribusi beras yakni produsen, pedagang besar (PB), dan pedagang eceran (PE). Hasil survei diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam membangun sistem distribusi perdagangan yang lebih baik.



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum pelaksanaan Survei Pola Distribusi Perdagangan 2025 adalah:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

1.3 TUJUAN SURVEI

Survei Poldis Perdagangan 2025 mempunyai tujuan, yaitu:

- Mendapatkan pola distribusi perdagangan.
- Menganalisis pola utama distribusi perdagangan.
- Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) dari produsen ke konsumen akhir.

1.4 CAKUPAN KOMODITAS

Komoditas beras merupakan komoditas strategis yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.

- Komoditas yang memiliki peran besar dalam pembentukan inflasi nasional.
- Komoditas yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam kelompok komoditas bahan makanan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).
- Komoditas yang memiliki dampak cukup besar terhadap kebutuhan masyarakat.





2.1 RUANG LINGKUP

Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan Tahun 2025 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi, beberapa kota SBH, dan kabupaten/kota potensi komoditas terpilih. Secara keseluruhan survei ini mencakup 390 kabupaten/kota yang terdiri dari 38 ibukota provinsi dan 352 kabupaten/kota lainnya.

Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan/usaha perdagangan dan non perdagangan dengan jumlah target sampel sebanyak 1.664 pelaku/usaha. Perusahaan/usaha perdagangan terdiri dari perusahaan/usaha perdagangan menengah dan besar serta mikro kecil, baik sebagai distributor, sub-distributor, agen, pedagang grosir, eksportir, importir, maupun pengecer. Sedangkan untuk perusahaan/usaha non perdagangan terdiri dari perusahaan/usaha pertanian dan industri pengolahan. Cakupan produsen komoditas beras diperoleh dari industri penggilingan padi dan penyosohan beras.

2.2 CAKUPAN KEGIATAN USAHA

Perusahaan/usaha yang dicakup dalam survei ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Secara lengkap, perusahaan/usaha yang dicakup berdasarkan pengelompokan KBLI-nya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Cakupan Komoditas Beras pada Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan 2025 Menurut KBLI 2020

KBLI 2020	Uraian KBLI 2020
(1)	(2)
10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
46311	Perdagangan Besar Beras
46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
47241	Perdagangan Eceran Beras
47821	Perdagangan Eceran Kaku Lima dan Los Pasar Beras
47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Supermarket/ Minimarket
47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/ Minimarket (Tradisional)

2.3 KERANGKA SAMPEL

Produsen komoditas beras berasal dari industri penggilingan padi dan penyosohan beras. Pembentukan kerangka sampel pedagang berasal dari berbagai macam sumber, yaitu:

1. Kerangka sampel produsen daging sapi berasal dari Direktori Rumah Potong Hewan (RPH) hasil updating Juli 2024.
2. Kerangka sampel produsen susu bubuk berasal dari hasil Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur (STPIM) Tahun 2024 dan Direktori *Statistical Business Register* (SBR) hasil updating 18 Desember 2024.
3. Kerangka sampel untuk pelaku usaha dan komoditas lainnya, selain yang disebutkan pada poin (1) dan (2) berasal dari Direktori SBR hasil updating 18 Desember 2024.

Jika target sampel tidak terpenuhi dari kerangka sampel yang dibentuk, maka sampel dipilih secara *purposive* dengan kriteria perusahaan/usaha tersebut mengusahakan komoditas terpilih di wilayah tersebut.

2.4 ALOKASI SAMPEL

Penentuan suatu perusahaan/usaha untuk komoditas

tertentu dilakukan pada awal pemilihan sampel, baik untuk produsen, industri, pedagang besar dan eceran. Untuk menjaga agar sampel komoditas di perusahaan tersebar secara proporsional, maka perlu dilakukan alokasi sampel untuk menentukan berapa jumlah perusahaan yang harus dicacah untuk suatu komoditas. Tahapan pengalokasian sampel perusahaan menurut komoditas sebagai berikut:

- Dari kerangka sampel dialokasikan sampel perusahaan yang memperdagangkan komoditas tertentu.
- Kemudian dialokasikan menurut distribusi dalam satu provinsi untuk disebar ke kabupaten/kota.

2.5 METODE PEMILIHAN SAMPEL

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditas utama yang diperdagangkan berdasarkan empat komoditas terpilih. Untuk setiap usaha/perusahaan pada kerangka sampel akan diurutkan berdasarkan KBLI 2020 dan skala usaha (besar, menengah, kecil, dan mikro), kemudian sampel dipilih secara sistematis pada setiap komoditas dan setiap pelaku usaha. Sampel perusahaan/usaha yang dipilih boleh sama dengan sampel Survei Perdagangan Antar Wilayah 2023.

Jika target sampel tidak terpenuhi dari kerangka sampel yang dibentuk, maka sampel dipilih secara *purposive* dengan kriteria perusahaan/usaha tersebut mengusahakan komoditas yang dicari di wilayah itu.

Desain sampling untuk perusahaan/usaha Poldis 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jika jumlah perusahaan/usaha berskala UMB kurang dari atau sama dengan jumlah target sampel, maka perusahaan/usaha berskala UMB diambil seluruh (*take all*).
2. Jika jumlah perusahaan/usaha berskala UMB lebih dari jumlah target sampel, maka perusahaan/usaha berskala UMB dipilih sebagai sampel secara *systematic sampling* pada setiap komoditas dan setiap pelaku usaha dengan menggunakan KBLI 2020 dan skala usaha sebagai *implicit stratification*.
3. Jika target sampel tidak terpenuhi dari usaha berskala UMB, maka perusahaan/usaha berskala UMK dipilih sebagai sampel secara *systematic sampling* pada setiap komoditas dan setiap pelaku usaha dengan menggunakan KBLI 2020 dan skala usaha sebagai *implicit stratification*.
4. Jika target sampel tidak terpenuhi dari kerangka sampel yang dibentuk, maka sampel dipilih secara *purposive*

dengan kriteria perusahaan/usaha tersebut mengusahakan komoditas yang dicari di wilayah yang bersangkutan.

2.6 METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dari perusahaan/usaha/pengusaha terpilih secara umum dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Secara khusus wawancara dapat dilakukan melalui telepon, *Whatsapp*, *e-mail*, dll. Untuk perusahaan/usaha yang relatif besar, pengumpulan data dapat dilakukan lebih dari satu kali kunjungan.

2.7 KONSEP DAN DEFINISI

- a. **Perusahaan** adalah suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha. (SDS 2022)
- b. **Perdagangan** adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan

melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021).

c. Produsen adalah pelaku usaha baik perusahaan perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021).

d. Perusahaan/usaha perdagangan adalah perusahaan/usaha yang melakukan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang-barang baru maupun bekas yang meliputi perdagangan besar (distributor, subdistributor, agen, grosir, pengepul, perdagangan ekspor dan perdagangan impor) dan perdagangan eceran.

e. Perdagangan besar (wholesaler) adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. (Buku KBLI 2020).

f. Perdagangan eceran adalah adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, department store, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. (Buku KBLI 2020).

Menurut **Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021** tentang **Penyelenggaraan Bidang Perdagangan**, yang dimaksud dengan:

a. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang. Produsen di dalam negeri dapat menunjuk pelaku usaha distribusi sebagai distributor atau agen untuk mendistribusikan barang kepada pengecer.

b. Distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk kegiatan pemasaran barang.

Persyaratan sesuai Permendag No 8 Tahun 2020/lampiran Permendag 64/2020 untuk pendaftaran barang/jasa yang ditunjuk oleh prinsipal/produsen.

1. Izin/pendaftaran dari instansi terkait, dan atau
2. Izin Usaha Industri (IUI) milik prinsipal, apabila perjanjiannya dilakukan dengan prinsipal produsen dalam negeri, atau
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PMA milik prinsipal supplier, apabila perjanjian dilakukan dengan prinsipal supplier yang berbentuk distributor PMA yang berlokasi di dalam negeri, atau
4. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) milik prinsipal supplier, apabila perjanjian dilakukan dengan prinsipal supplier yang berbentuk Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (P3A) yang berada di dalam negeri
5. Surat perjanjian yang berisi kewenangan dari prinsipal/produsen sebagai distributor yang telah di legalisir oleh notaris.
6. Mencantumkan nama dan alamat lengkap, jenis barang, wilayah pemasaran, serta jangka waktu perjanjian dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian.
7. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar.

8. Distributor dilarang mendistribusikan barang secara eceran ke konsumen.

c. Subdistributor adalah perusahaan perdagangan yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari distributor atau distributor tunggal untuk melakukan pemasaran. Memiliki Perizinan di bidang Perdagangan sebagai Subdistributor dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang; memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas; memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap dan jelas; dan memiliki perjanjian dengan distributor.

d. Agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan/atau menguasai barang yang dipasarkan; memiliki perjanjian keagenan dengan pihak yang menunjuknya yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan menjalankan usaha berdasarkan komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya.

- e. **Pedagang grosir** adalah pelaku usaha memiliki perizinan berusaha sebagai grosir; dan memiliki kerjasama dengan produsen, distributor atau importir; mendistribusikan berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
- f. **Pedagang eceran** adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen.
- g. **Toko Swalayan:** Pasal 1 nomor 26 menjelaskan bahwa Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Ini diperjelas kembali, pada Pasal 85 Ayat 2, bahwa Swalayan dapat berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan grosir yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.
- h. **Pedagang Pengumpul/Pengepul** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha melakukan pengumpulan hasil produksi usaha mikro dan usaha kecil untuk diperdagangkan.

Menurut **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 224/Pmk.011/2012)** tentang **Pemungutan Pajak Penghasilan** Pasal 1 ayat (3):

- a. **Pedagang Pengepul** adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya: mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- b. **Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)** adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
- c. **Importir** adalah orang perseorangan/lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan impor yaitu kegiatan memasukkan barang (benda berwujud/tidak berwujud, baik bergerak/tidak bergerak, dapat dihabiskan/tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha) ke dalam daerah pabean Indonesia.

d. Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan barang (benda berwujud/tidak berwujud, baik bergerak/tidak bergerak, dapat dihabiskan/tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan) dari wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan.

e. Industri Pengolahan adalah kegiatan pengubahan bahan dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, baik secara mekanis, kimiawi, dengan mesin ataupun dengan tangan. Termasuk juga kegiatan jasa industri yang menerima upah maklon (sumber Peraturan Kepala BPS No. 57 tahun 2009 tentang KBLI).

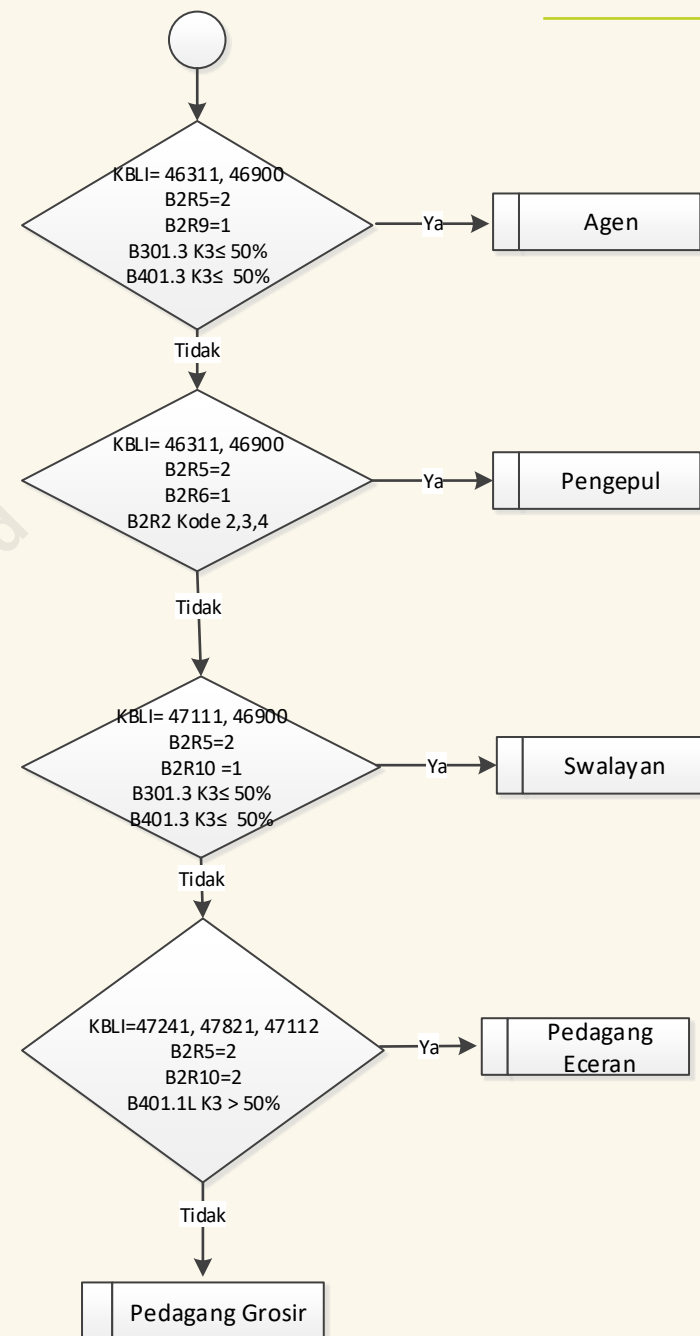
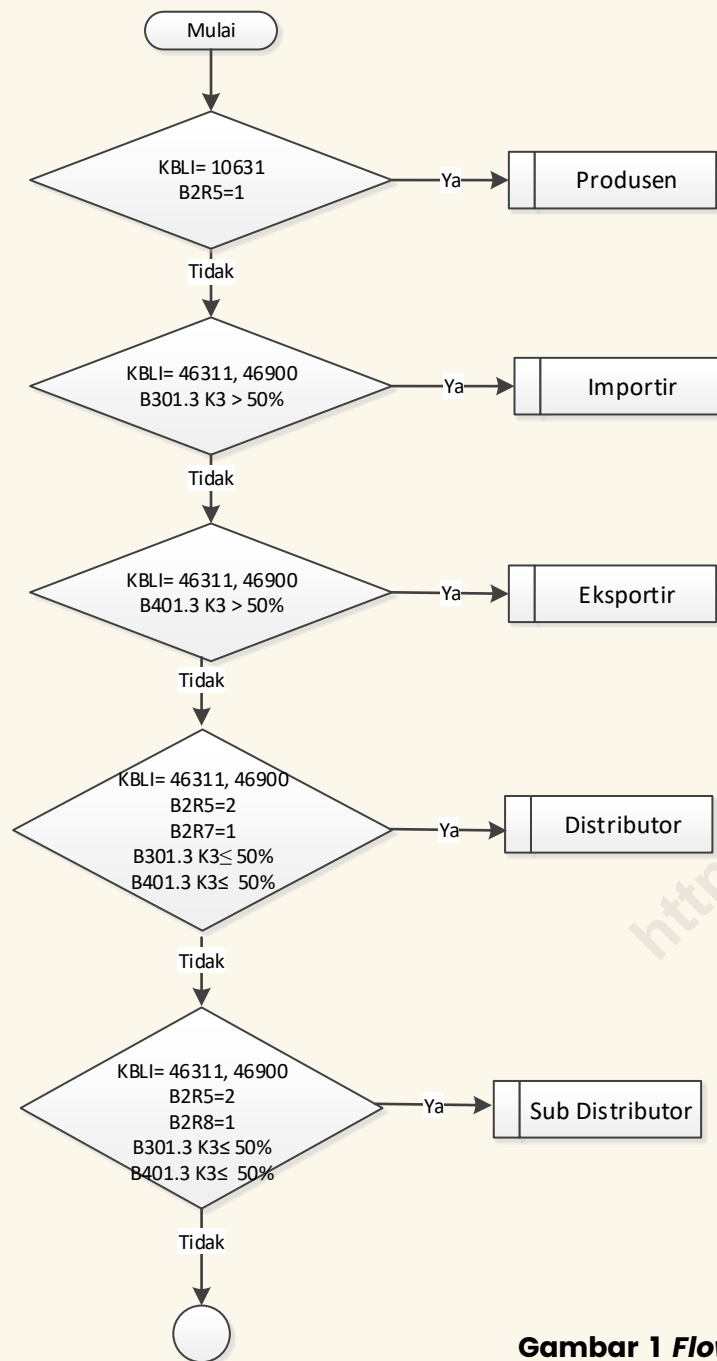
f. Kegiatan Usaha Lainnya adalah kegiatan selain yang disebutkan di atas, seperti: rumah makan, restoran, hotel, cafe, rumah sakit, dll.

g. Pemerintah dan Lembaga Nirlaba: Pemerintah seperti Pemda, Kementerian/Lembaga dan lainnya. Lembaga Nirlaba seperti yayasan (panti asuhan, panti jompo) dan rumah sakit non profit. Lembaga Nirlaba adalah lembaga non profit, jika contoh tersebut sudah memperhitungkan keuntungan maka masuk ke kegiatan usaha lainnya.

h. Rumah Tangga adalah konsumen akhir dan bukan merupakan kegiatan usaha.

Sesuai definisi yang telah dijabarkan tersebut, penentuan pelaku usaha diterjemahkan dalam *flowchart* pada Gambar 1.





Gambar 1 Flowchart Penentuan Pelaku Usaha

2.8 POLA UTAMA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Hasil survei menunjukkan adanya jalur-jalur penjualan dari produsen hingga ke konsumen akhir yang digambarkan sebagai pola distribusi. Pola utama distribusi perdagangan merupakan jalur penjualan berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melibatkan pedagang perantara. Contoh penulisan pola utama distribusi:

Produsen → Pedagang Perantara → Konsumen Akhir

Namun demikian, beberapa wilayah memenuhi sebagian besar kebutuhan konsumsi suatu komoditas dengan mengimpor dari wilayah lain, sehingga pola utama distribusi perdagangan tidak dimulai dari produsen di dalam provinsinya melainkan dari luar provinsi. Contoh penulisan pola utama yang berasal dari luar provinsi:

Luar Provinsi → Pedagang Perantara → Konsumen Akhir

Penentuan titik awal pola utama pada suatu provinsi untuk komoditas beras adalah berdasarkan hasil penghitungan/proyeksi nilai produksi dan konsumsi rumah tangga suatu komoditas.

- Jika produksi komoditas di suatu provinsi dapat memenuhi lebih dari 50 persen konsumsinya, maka titik awal pola utama adalah produsen.

- Jika produksi komoditas di suatu provinsi memenuhi kurang dari 50 persen konsumsinya (defisit > 50%), maka titik awal pola utama adalah luar provinsi, karena sebagian besar konsumsi dipenuhi oleh hasil impor (dari luar provinsi) bukan produksi domestik di provinsi tersebut.

2.9 MARGIN PERDAGANGAN DAN PENGANGKUTAN TOTAL (MPP_T)

Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian yang mengikutsertakan biaya pengangkutan. Sementara itu, MPP Total (MPP_T) menggambarkan kenaikan harga dari produsen hingga ke konsumen akhir yang dihitung berdasarkan rasio MPP pelaku perdagangan yang terlibat dalam suatu jalur distribusi. Perhitungan MPP_T menggunakan formula berikut:

$$\left(\prod_{i=1}^n (1 + MPP_i\%) - 1 \right) \times 100\%$$

Ket:	MPP _i	= selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian untuk pelaku usaha ke-i.
	i	= pelaku perdagangan yang terlibat pada pola utama.
	n	= jumlah pelaku perdagangan yang terlibat pada pola utama.

Tahapan perhitungan MPP_T pola utama adalah:

- a. Menentukan pola utama distribusi perdagangan komoditas.

Contoh pola utama yang terbentuk sebagai berikut:

Produsen → Pedagang grosir → Pedagang eceran → Konsumen akhir

- b. Menghitung rasio MPP dari masing-masing pelaku perdagangan (MPP_i) yang terlibat dalam pola utama distribusi perdagangan. MPP dari pelaku usaha distribusi dilakukan dengan cara menghitung selisih jumlah penjualan dikurangi jumlah pembelian dari seluruh pelaku usaha pada level tertentu. Sedangkan rasionya diperoleh dengan membagi selisih nilai penjualan dan pembelian terhadap nilai pembeliannya.

Contoh diperoleh: MPP pedagang grosir = 11,83%; MPP Pedagang Eceran = 12,09%

Sebagai catatan, survei ini tidak meneliti distribusi perdagangan secara berkesinambungan. Sebagai ilustrasi, survei ini tidak meneliti produsen A kemudian menelusuri pedagang-pedagang perantara yang membeli komoditas dari produsen A yang selanjutnya mendistribusikannya ke konsumen akhir. Pemilihan produsen dan pedagang perantara dipilih berdasarkan

metodologi statistik yang dijelaskan pada Bab 2.5.

Sementara itu, rasio MPP setiap pelaku perdagangan pada pola utama dihitung berdasarkan transaksi pembelian pada setiap pedagang perantara dengan seluruh pelaku usaha lain (produsen maupun pedagang), yang kemudian dijual ke konsumen akhir atau pelaku usaha lain yang berada dalam wilayah yang sama.

- c. Menghitung MPP_T dengan formula (1).

$$MPP_T = \{[(1+11,83\%) \times (1+12,09\%)] - 1\} \times 100\% = 25,35\%$$

Perhitungan MPP_T pada jalur/pola lainnya dapat dilakukan dengan cara yang sama.

2.10 POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

Selain pola utama, hasil survei juga menunjukkan adanya potensi pola terpanjang dan terpendek yang terbentuk dari pola distribusi dari produsen hingga ke konsumen akhir. Potensi pola terpanjang merupakan jalur distribusi dari produsen ke konsumen akhir yang melibatkan pelaku perdagangan dengan jumlah paling banyak. Sebaliknya, potensi pola terpendek merupakan jalur distribusi dari produsen ke konsumen akhir yang melibatkan pelaku perdagangan dengan jumlah paling

sedikit. Jika jumlah pelaku perdagangan sama, maka potensi pola yang dipilih adalah jalur distribusi dengan MPP_T tertinggi untuk potensi pola terpanjang dan MPP_T terendah untuk potensi pola terpendek.

2.11 MIRRORING WILAYAH PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Publikasi ini menggunakan Metode *Mirroring* untuk wilayah pembelian atau penjualan dari/ke luar provinsi pada data hasil survei. Asumsi penggunaan metode tersebut adalah:

- Ketika Provinsi A menjual komoditas ke Provinsi B, maka Provinsi B membeli komoditas tersebut dari Provinsi A.
- Jika digambarkan dengan matriks, maka terbentuk matriks pendistribusian dengan dimensi 34 x 34 sebagai berikut (dapat dilihat pada Tabel 2):



Tabel 2 Matriks *Mirroring* Wilayah Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

M		Provinsi Asal Pembelian					
		11	12	13	...	91	94
Provinsi Tujuan Penjualan	11		M11.12	M11.13	...	M11.91	M11.94
	12	M12.11		M12.13	...	M12.91	M12.94
	13	M13.11	M13.12		...	M13.91	M13.94
	...	...	...	...		...	...
	91	M91.11	M91.12	M91.13	...		M91.94
	94	M94.11	M94.12	M94.13	...	M94.91	

Catatan: $M12.11 = M11.12$, dimana penjualan suatu komoditas dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara sama dengan pembelian komoditas tersebut oleh Provinsi Sumatera Utara dari Aceh.

2.12 TATA CARA PEMBACAAN POLA

Berikut adalah tata cara membaca pola yang ditampilkan dalam publikasi ini.

1. Pada setiap pembahasan akan ada ikon yang mewakili komoditas yang sedang dilakukan observasi. Ikon tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Ikon Komoditas Beras

Ikon	Keterangan
(1)	(2)
 Produsen	Produsen beras
	Komoditas beras

2. Pedagang perantara dan pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi perdagangan komoditas dibedakan dalam warna. Pembagian warna tersebut adalah:
 - a. Warna biru langit (●) mewakili fungsi kelompok pedagang besar (PB).
 - b. Warna merah muda (●) mewakili fungsi kelompok pedagang eceran (PE).
 - c. Warna kuning muda (●) mewakili fungsi kelompok konsumen akhir.
 - d. Warna ungu (●) mewakili wilayah pembelian/ penjualan dari/ke luar provinsi.

3. Pembagian kelompok pelaku usaha yang dimaksud pada poin di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok PB: distributor, subdistributor, agen, pedagang pengepul, pedagang grosir, eksportir, dan importir.
 - b. Kelompok PE: supermarket/swalayan dan pedagang eceran
 - c. Kelompok konsumen akhir: industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga
4. Jenis garis yang ada dalam penyajian pola terdiri dari 4 macam, yaitu:
 - a. Garis solid 1 poin (—→), menunjukkan alur distribusi penjualan yang di dapat dari data penjualan perdagangan menurut fungsi perusahaan/usaha.
 - b. Garis solid tebal 6 poin (—→), menunjukkan alur distribusi penjualan utama berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila penjualan yang terbesar dari produsen adalah ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang.
 - c. Garis putus-putus 1 poin (– – →), menunjukkan data tambahan yang diperoleh dari data pembelian perdagangan menurut fungsi perusahaan/usaha

usaha dibedakan
yang mewakili setiap
sebagai berikut:

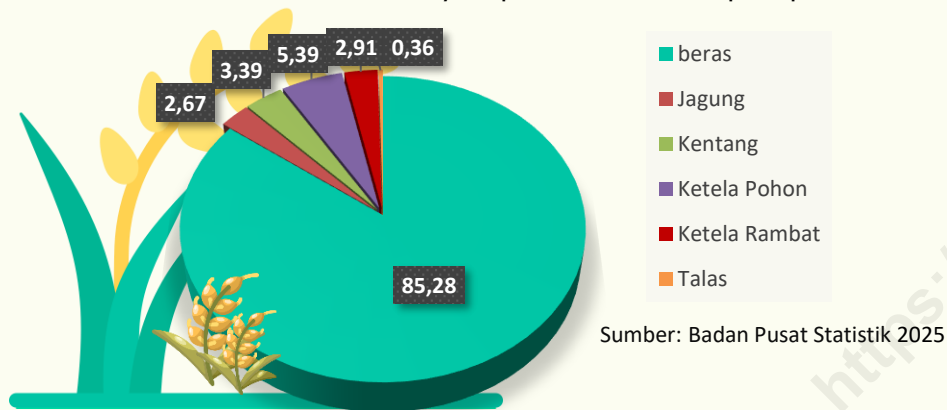
- g. Ek
un
h. Pe
i. St
6. Setio
kuan

- 



3.1 Gambaran Umum

Beras merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap beras menjadikan komoditas ini sebagai bahan pangan utama dengan tingkat konsumsi yang relatif tinggi. Pola konsumsi pangan masyarakat hingga saat ini masih menunjukkan dominasi beras sebagai sumber karbohidrat utama, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

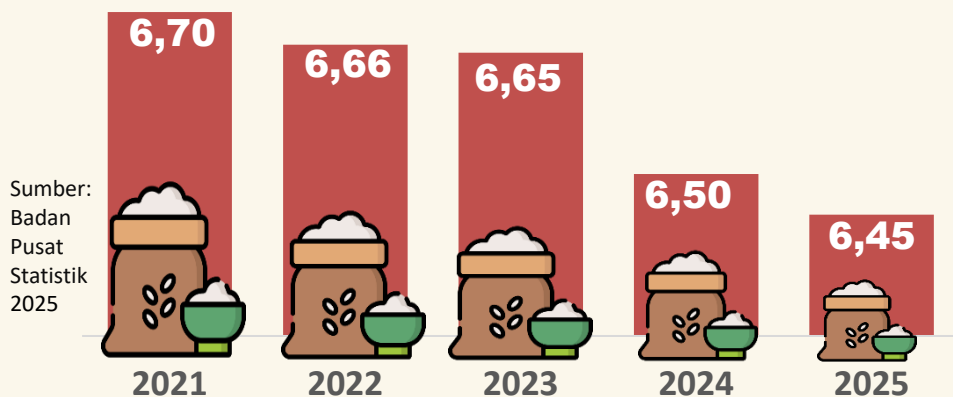


Gambar 2 Persentase Rata-Rata Konsumsi per Kapita Menurut Jenis Makanan Sumber Karbohidrat, 2025

Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap konsumsi beras masih sangat kuat, yang tercermin dari besarnya peran komoditas ini dalam pembentukan garis kemiskinan, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan, dengan kontribusi masing-masing sebesar 21,06 persen dan 24,91 persen (BRS, Oktober 2025). Ini menunjukkan bahwa beras tidak hanya berfungsi sebagai bahan pangan pokok, tetapi juga menjadi penentu utama ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, data persentase rata-rata konsumsi pangan sumber karbohidrat menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat Indonesia masih didominasi secara signifikan oleh beras. Dengan kontribusi mencapai 85,28 persen, beras menjadi sumber karbohidrat utama yang jauh melampaui komoditas pangan lainnya. Tingginya proporsi ini menegaskan kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap beras dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Sebaliknya, konsumsi pangan non-beras masih relatif terbatas dan cenderung bersifat pelengkap. Komoditas seperti ketela pohon (5,39 persen), kentang (3,39 persen), ketela rambat (2,91 persen), jagung (2,67 persen), dan talas (0,36 persen) hanya menyumbang porsi kecil dalam struktur konsumsi pangan.

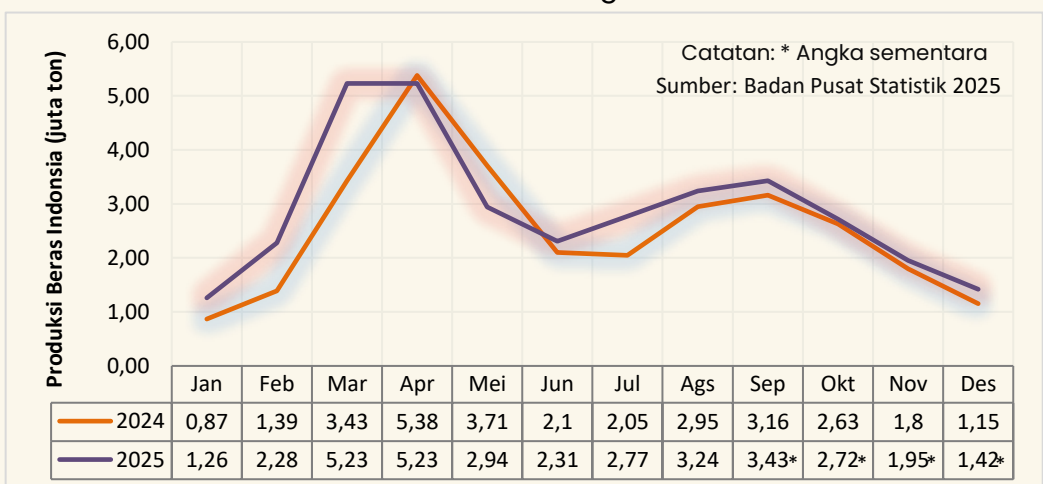
Terlebih, data SUSENAS Maret 2025 menunjukkan beras menjadi komoditas makanan dengan partisipasi konsumsi terbesar, yaitu sebesar 99,07 persen. Di luar komoditas Beras, komoditas dengan tingkat partisipasi konsumsi lebih dari 90 persen yaitu Garam (97,54 persen), Bawang Merah (94,02 persen), Minyak Goreng (96,23 persen), Bawang Putih (94,62 persen), Gula Pasir (92,13 persen) dan Telur Ayam Ras (91,56 persen)¹⁾. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya diversifikasi pangan di tingkat rumah tangga serta mengindikasikan bahwa struktur konsumsi pangan nasional masih rentan terhadap gangguan produksi dan distribusi beras. Oleh karena itu, penguatan konsumsi sumber karbohidrat alternatif menjadi penting dalam rangka meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan pangan nasional.



Gambar 3 Rata-Rata Konsumsi Beras Indonesia per Kapita Sebulan (kg), 2021-2025

Meskipun beras masih menjadi sumber karbohidrat utama, perkembangan konsumsi beras perkapita menunjukkan dinamika yang berbeda. Data konsumsi beras perkapita selama periode 2021-2025 memperlihatkan tingkat konsumsi yang cenderung menurun, dari 6,7 kilogram pada 2021 menjadi 6,45 kilogram pada 2025. Penurunan ini terjadi di pedesaan dan perkotaan. Tidak hanya dari sisi konsumsi, dari sisi pengeluaran pun komoditas beras juga menurun sekitar 6,05 persen dari 20.948 rupiah per kapita seminggu pada Maret 2024 menjadi 19.689 rupiah perkapita seminggu pada Maret 2025¹⁾. Penurunan konsumsi beras dapat disebabkan oleh perubahan struktur demografi dan gaya hidup masyarakat, khususnya diversifikasi pangan di perkotaan. Namun, penurunan ini belum menunjukkan pergeseran kebutuhan, mengingat beras tetap mendominasi konsumsi sumber karbohidrat secara agregat. Hal ini menuntut ketersediaan produksi beras yang memadai, tingginya jumlah penduduk serta ketergantungan terhadap beras sebagai pangan pokok menyebabkan penyediaan kebutuhan beras masih menjadi prioritas nasional. Peningkatan dan stabilitas produksi beras nasional menjadi hal utama untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan konsumsi dan mengurangi risiko kerentanan pangan.

Produksi beras selama 2025 setiap bulannya menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Produksi beras tertinggi selama 2025 terjadi pada bulan Maret dan April, dengan produksi pada kedua bulan mencapai 5,23 juta ton beras, yang mencerminkan berlangsungnya panen raya pada awal tahun. Selain itu, peningkatan produksi juga terjadi pada September dengan capaian sebesar 3,43 juta ton beras, yang mengindikasikan kontribusi panen gadu. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, puncak produksi beras 2025 cenderung terjadi lebih awal, yakni Maret-April, pergeseran waktu panen dipengaruhi oleh kondisi musim dan pola tanam. Secara umum, produksi beras tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2024. Potensi produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton atau meningkat sebesar 13,54 persen. Peningkatan potensi produksi ini utamanya disumbang oleh peningkatan produksi pada Subround I (Januari-April) 2025 yang meningkat sebesar 26,54 persen dibanding subround I 2024 (Kementrian pertanian, 2025). Selengkapnya, perkembangan produksi beras Indonesia selama tahun 2025 sebagai berikut.

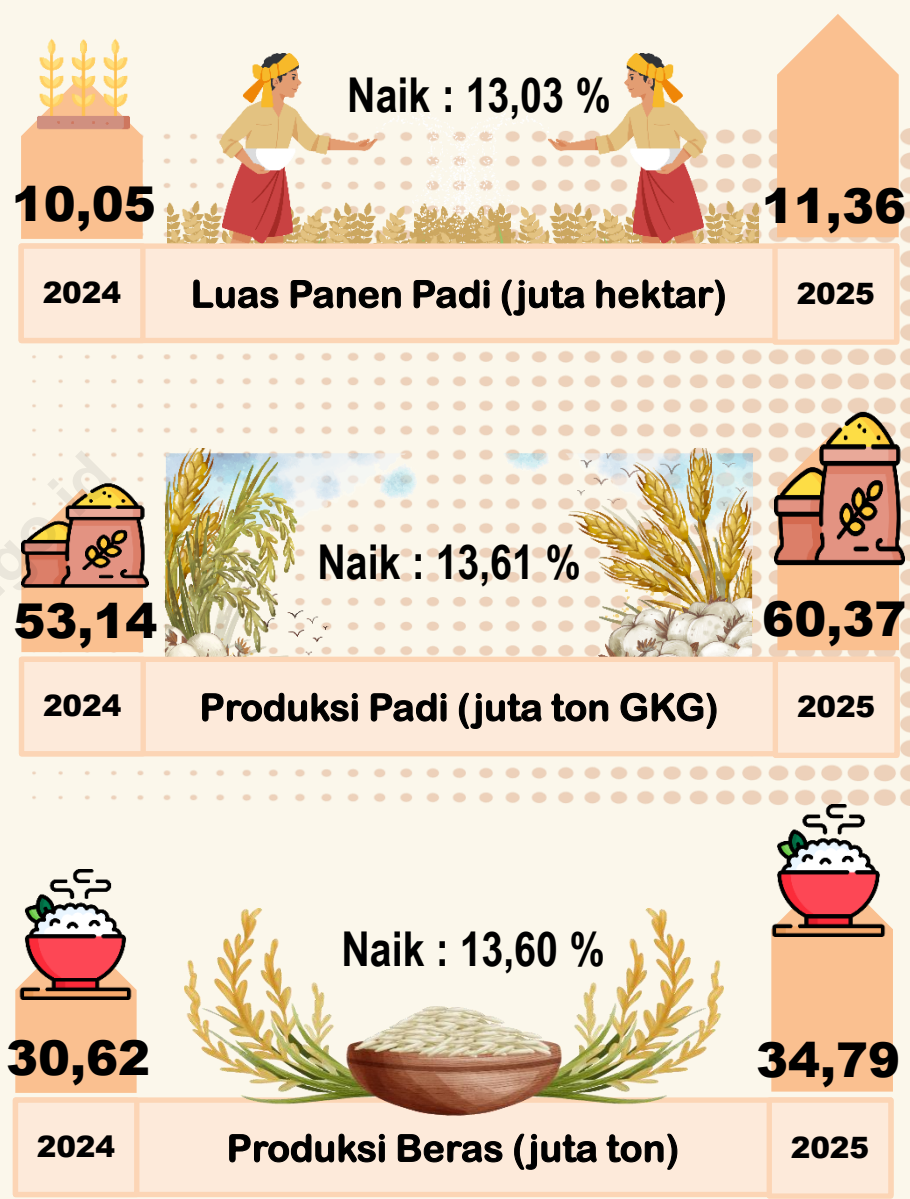


Gambar 4 Produksi Beras Indonesia per Bulan , 2024 dan 2025

Capaian produksi beras nasional pada tahun 2025 tidak terlepas dari kinerja produksi padi serta keberhasilan dalam perluasan luas panen padi. Peningkatan produksi padi menjadi faktor utama yang mendasari bertambahnya volume beras yang dihasilkan secara nasional. Dalam penghitungan produksi beras, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode konversi dari produksi padi menjadi beras dengan menerapkan angka konversi gabah ke beras, serta mempertimbangkan faktor kehilangan hasil, seperti gabah atau beras yang susut dan tercecer, serta alokasi untuk penggunaan nonpangan.

Total produksi padi nasional selama periode Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 60,37 juta ton gabah kering giling (GKG). Capaian ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, yang tercatat sebesar 53,14 juta ton GKG. Secara absolut, produksi padi meningkat sebesar 7,23 juta ton GKG, atau tumbuh sekitar 13,61 persen. Peningkatan produksi padi tersebut mencerminkan perbaikan kinerja sektor pertanian tanaman pangan sepanjang tahun 2025, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan ketersediaan bahan baku beras nasional. Penghitungan produksi padi diperoleh dari hasil perkalian antara luas panen (bersih) dan tingkat produktivitas.

Berdasarkan penghitungan, luas panen padi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan produksi padi sepanjang tahun 2025. Total luas panen padi selama periode Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 11,36 juta hektare. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 1,31 juta hektare atau sebesar 13,03 persen dibandingkan dengan luas panen padi pada periode yang sama tahun 2024, yang tercatat sebesar 10,05 juta hektare.



Gambar 5 Perbandingan Luas Panen, Produksi Padi, dan Produksi Beras Indonesia, 2024 dan 2025



PETA WILAYAH PRODUKSI BERAS INDONESIA TAHUN 2025

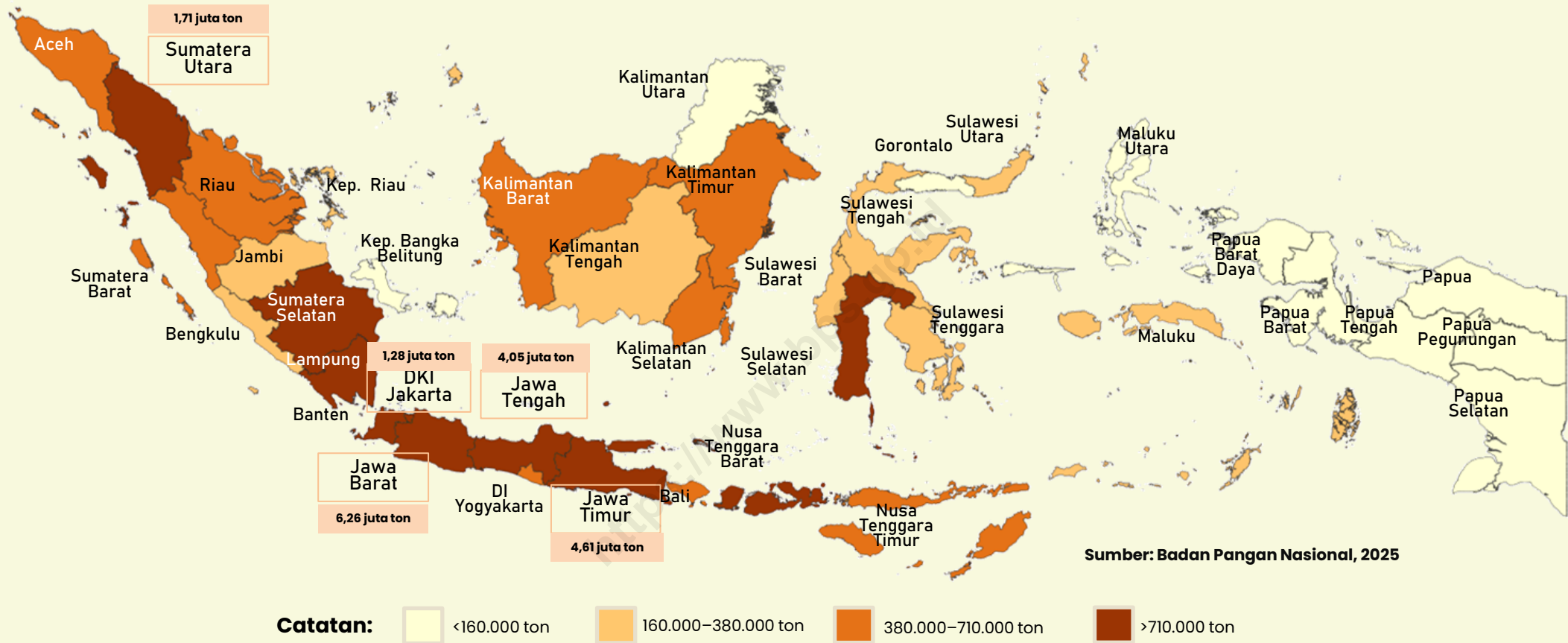


Gambar 6 Peta Wilayah Produksi Beras Indonesia, 2025

Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan merupakan 5 provinsi **sentra produksi beras**.

Produksi beras di kelima provinsi tersebut mencapai **64,80 persen** produksi beras nasional.

PETA WILAYAH KONSUMSI BERAS INDONESIA TAHUN 2025



Gambar 7 Peta Wilayah Konsumsi Beras Indonesia, 2025

Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta
merupakan 5 provinsi dengan **konsumsi beras tertinggi**.

Konsumsi beras di kelima provinsi tersebut mencapai **58,14 persen** konsumsi beras nasional.





PETA PERBANDINGAN PRODUKSI DAN KONSUMSI BERAS INDONESIA TAHUN 2025



Catatan:



Surplus Beras



Defisit Beras < 50%



Defisit Beras > 50%

Gambar 8 Peta Perbandingan Produksi dan Konsumsi Beras Indonesia, 2025

Terdapat **24 provinsi** yang **belum mampu mencukupi konsumsi** beras dari hasil **produksi dalam provinsi**, **13 provinsi** diantaranya masih mengandalkan impor dari luar provinsi **lebih dari 50 persen** untuk memenuhi konsumsinya.

INDONESIA



34,34 JUTA TON



PRODUKSI

30,81 JUTA TON



KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)



Produksi beras di Indonesia pada tahun 2025 mengalami **SURPLUS**, sehingga kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.**



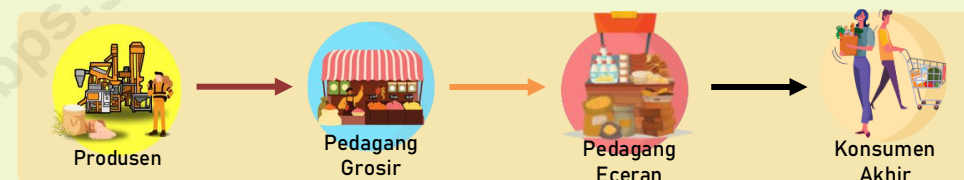
3.2 POLA DISTRIBUSI NASIONAL

Pola distribusi perdagangan beras di Indonesia menggambarkan jalur distribusi perdagangan dari produsen sampai ke konsumen akhir dengan melewati pedagang perantara yakni pedagang besar dan pedagang eceran. Hasil survei menunjukkan bahwa distribusi perdagangan beras di Indonesia dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan tujuh pelaku usaha perdagangan yaitu importir, distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Dari ketujuh pelaku usaha distribusi perdagangan tersebut, selanjutnya beras didistribusikan ke konsumen akhir yang terdiri dari industri pengolahan, rumah tangga, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta kegiatan usaha lain (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll).

Dari pola yang terbentuk, produksi beras dari produsen sebagian besar didistribusikan ke pedagang grosir yakni mencapai 61,49 persen. Selain itu, sebanyak 18,32 persen dijual ke distributor, sebanyak 7,51 persen didistribusikan ke pedagang eceran, dan sebanyak 7,85 persen didistribusikan langsung ke konsumen rumah tangga tanpa melalui pedagang perantara. Beras yang diperoleh pedagang grosir dari produsen, selanjutnya didistribusikan kembali ke pedagang eceran sebanyak 52,09 persen, dan ke konsumen rumah tangga sebanyak 20,28 persen.

Selanjutnya beras yang diterima pedagang eceran, sebagian besar dijual untuk konsumsi rumah tangga sebesar 77,80 persen, 13,22 persen didistribusikan ke sesama pedagang eceran, dan sisanya didistribusikan ke konsumen akhir lainnya yang mencakup industri pengolahan, kegiatan usaha lain, serta pemerintah dan lembaga nirlaba.

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 9 Pola Utama Distribusi Perdagangan Beras Indonesia, 2025

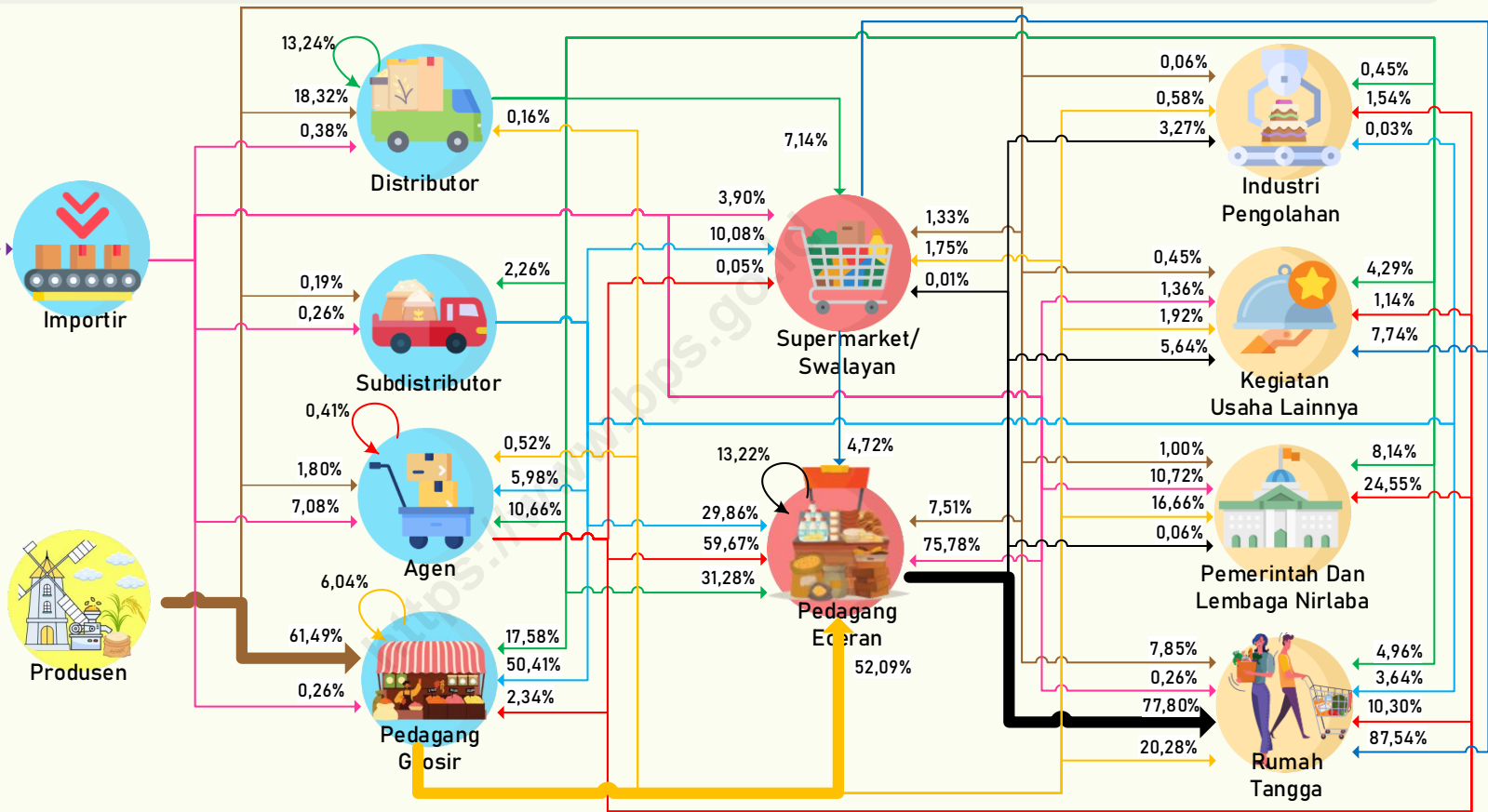
Pola utama tersebut merupakan pola distribusi perdagangan beras berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara. Rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, dengan pendistribusiannya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Infografis berikut menampilkan secara lengkap pola distribusi perdagangan komoditas beras di Indonesia.

POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM NEGERI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR NEGERI

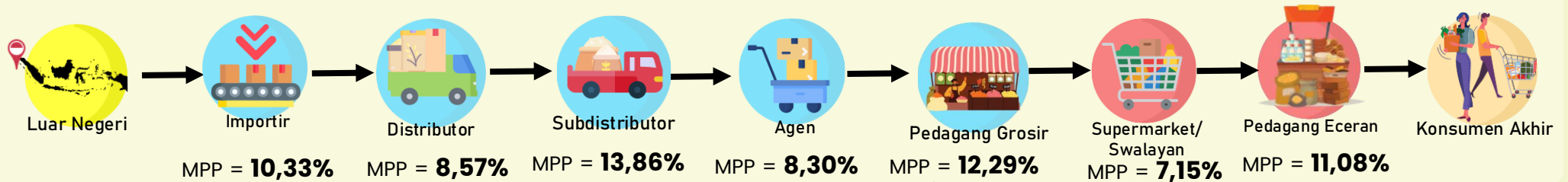
THAILAND
MYANMAR
MALAYSIA



Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Negeri

Distribusi beras di Indonesia dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 7 **pedagang perantara**, yaitu importir, distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA TERPANJANG



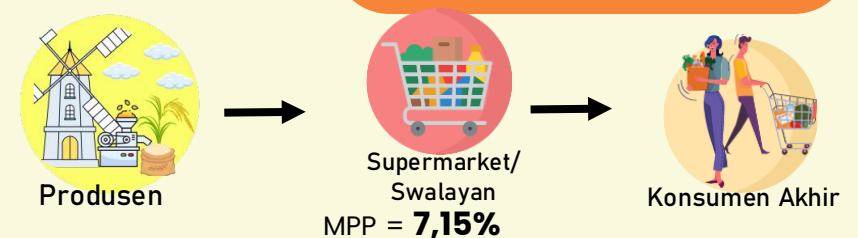
Gambar 10 Potensi Pola Terpanjang Distribusi Perdagangan Beras Indonesia, 2025

Potensi pola terpanjang merupakan jalur distribusi dari produsen hingga ke konsumen akhir yang melibatkan pelaku usaha distribusi perdagangan dengan jumlah paling banyak. Namun, jika jumlah pelaku usaha perdagangan sama, maka potensi pola terpanjang yang dipilih adalah jalur distribusi dengan Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPP_T) tertinggi.

Pola utama distribusi beras nasional berpotensi lebih panjang yaitu menjadi delapan rantai ketika melalui jalur: luar negeri – importir – distributor – subdistributor – agen – pedagang grosir – supermarket/swalayan – pedagang eceran – konsumen akhir. Pendistribusian beras dari produsen hingga konsumen akhir berpotensi melewati tujuh pedagang perantara dengan perolehan MPP_T sebesar 97,41 persen.

POLA TERPENDEK

Sebaliknya pola utama distribusi beras berpotensi memperoleh MPP_T lebih rendah ketika melalui jalur: produsen – supermarket/swalayan – konsumen akhir yang selanjutnya disebut potensi pola terpendek. Pendistribusian beras dari produsen sampai konsumen akhir berpotensi memperoleh MPP_T sebesar 7,15 persen.



Gambar 11 Potensi Pola Terpendek Distribusi Perdagangan Beras Indonesia, 2025

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari–Juni 2025, pedagang beras di Indonesia:

19,93%

Terdampak
OPERASI PASAR



Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

9,06%

Terdampak
IMPOR



Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

20,98%

Terdampak
BENCANA ALAM



Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Berdasarkan hasil Survei Pola Distribusi (Poldis), diperoleh informasi bahwa sejumlah 19,93 persen pedagang beras di Indonesia merasa terdampak adanya operasi pasar selama semester pertama 2025. Operasi pasar merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

Hasil Survei Poldis juga menunjukkan bahwa sejumlah 20,98 persen pedagang beras di Indonesia merasa terdampak adanya bencana alam. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia. Bencana yang dimaksud dalam publikasi ini antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, tanah longso, dan bencana alam lainnya.

Selain operasi pasar dan bencana alam, fenomena impor juga membawa dampak bagi para pedagang beras di Indonesia. Masuknya pasokan beras dari luar negeri ini berdampak kepada 9,06 persen pedagang beras di Indonesia.

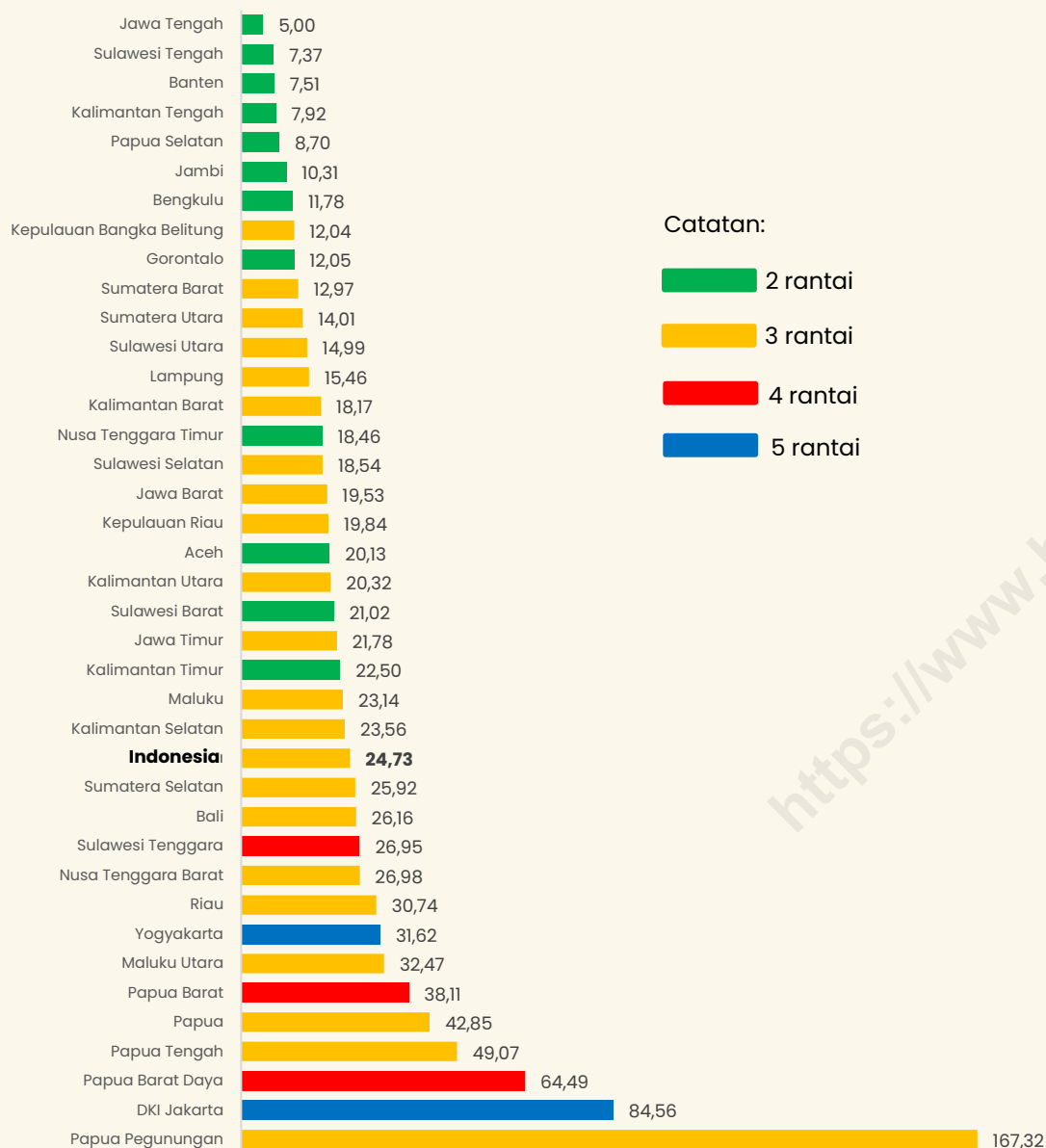


MARGIN PERDAGANGAN DAN PENGANGKUTAN TOTAL (MPP_T)

Tabel 4 Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPP_T) Komoditas Beras di Indonesia, 2025

Kode Provinsi	Nama Provinsi	MPP _T (%)	Jumlah Rantai	Kode Provinsi	Nama Provinsi	MPP _T (%)	Jumlah Rantai
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
11	Aceh	20,13	2	61	Kalimantan Barat	18,17	3
12	Sumatera Utara	14,01	3	62	Kalimantan Tengah	7,92	2
13	Sumatera Barat	12,97	2	63	Kalimantan Selatan	23,56	3
14	Riau	30,74	3	64	Kalimantan Timur	22,50	2
15	Jambi	10,31	2	65	Kalimantan Utara	20,32	3
16	Sumatera Selatan	25,92	3	71	Sulawesi Utara	14,99	3
17	Bengkulu	11,78	2	72	Sulawesi Tengah	7,37	2
18	Lampung	15,46	3	73	Sulawesi Selatan	18,54	3
19	Bangka Belitung	12,04	3	74	Sulawesi Tenggara	26,95	4
21	Kepulauan Riau	19,84	3	75	Gorontalo	12,05	2
31	DKI Jakarta	84,56	5	76	Sulawesi Barat	21,02	3
32	Jawa Barat	19,53	3	81	Maluku	23,14	3
33	Jawa Tengah	5,00	2	82	Maluku Utara	32,47	3
34	D.I Yogyakarta	31,62	5	91	Papua Barat	38,11	4
35	Jawa Timur	21,78	3	92	Papua Barat Daya	64,49	4
36	Banten	7,51	2	94	Papua	42,85	3
51	Bali	26,16	3	95	Papua Selatan	8,70	2
52	Nusa Tenggara Barat	26,98	3	96	Papua Tengah	49,07	3
53	Nusa Tenggara Timur	18,46	2	97	Papua Pegunungan	167,32	3

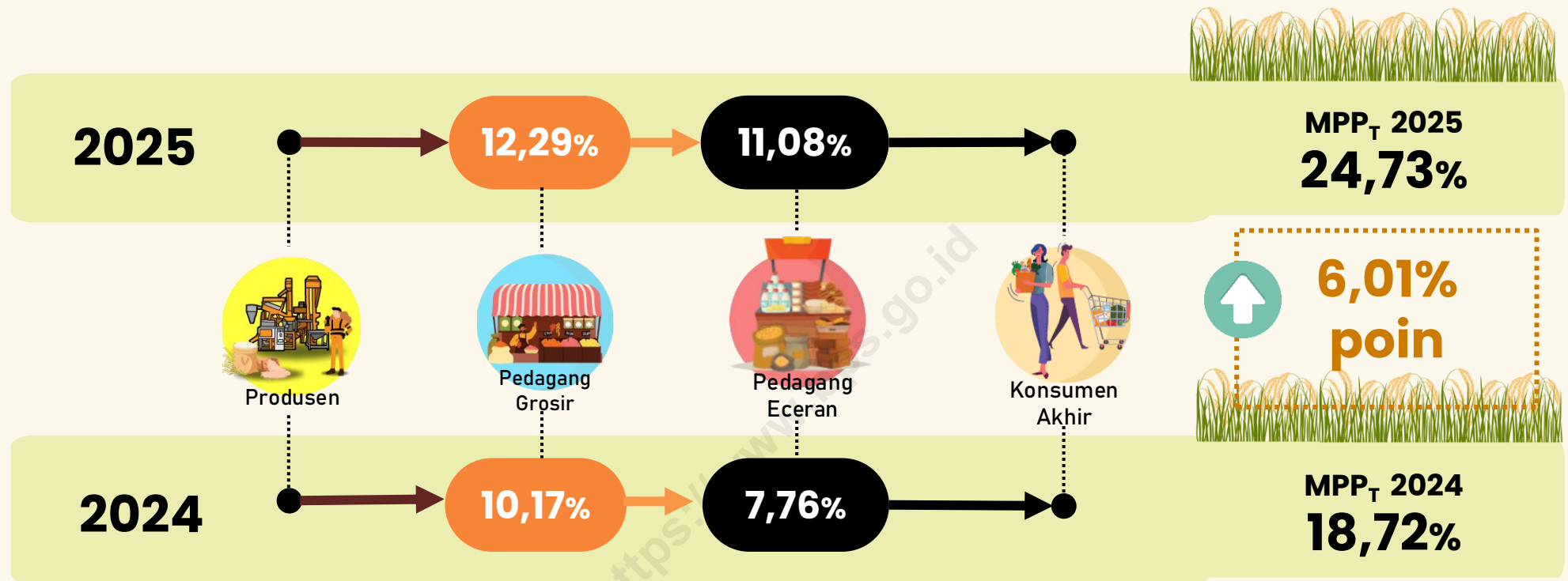
INDONESIA | MPP_T = 24,73% | Jumlah Rantai = 3



Gambar 12 Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPP_T) Komoditas Beras Menurut Provinsi, 2025

Hasil survei menunjukkan bahwa MPP_T yang diterima pedagang beras di Indonesia sebesar 24,73 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari tingkat produsen sampai dengan konsumen akhir di Indonesia adalah sebesar 24,73 persen dengan melibatkan pelaku usaha utamanya yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran.

Menurut provinsi, MPP_T yang diterima pedagang beras di Provinsi Jawa Tengah menjadi yang terendah yaitu sebesar 5,00 persen dengan melibatkan pelaku utamanya yaitu pedagang eceran. Sebaliknya, MPP_T tertinggi yang diterima pedagang beras berada di Provinsi Papua Pegunungan, yaitu dengan total margin sebesar 167,322 persen dengan melibatkan pelaku utamanya yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Selengkapnya, persentase MPP_T beras yang diterima pedagang menurut provinsi disajikan pada Gambar 12.



Catatan: ● MPP Pedagang Grosir ● MPP Pedagang Eceran



Dibandingkan dengan tahun 2024, pola utama distribusi perdagangan beras 2025 dari produsen sampai konsumen akhir tidak mengalami perubahan rantai distribusi, baik dari sisi jumlah rantai maupun pelaku utama yang terlibat. Namun, terjadi perubahan nilai MPP yang diambil masing-masing pelaku yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. MPP_T pada tahun 2025 mengalami kenaikan yang sebelumnya 18,72 persen pada tahun 2024, menjadi **24,73 persen** di tahun 2025.

PROVINSI

ACEH



1.000,31 RIBU
TON

671,56 RIBU
TON

PRODUKSI

KONSUMSI

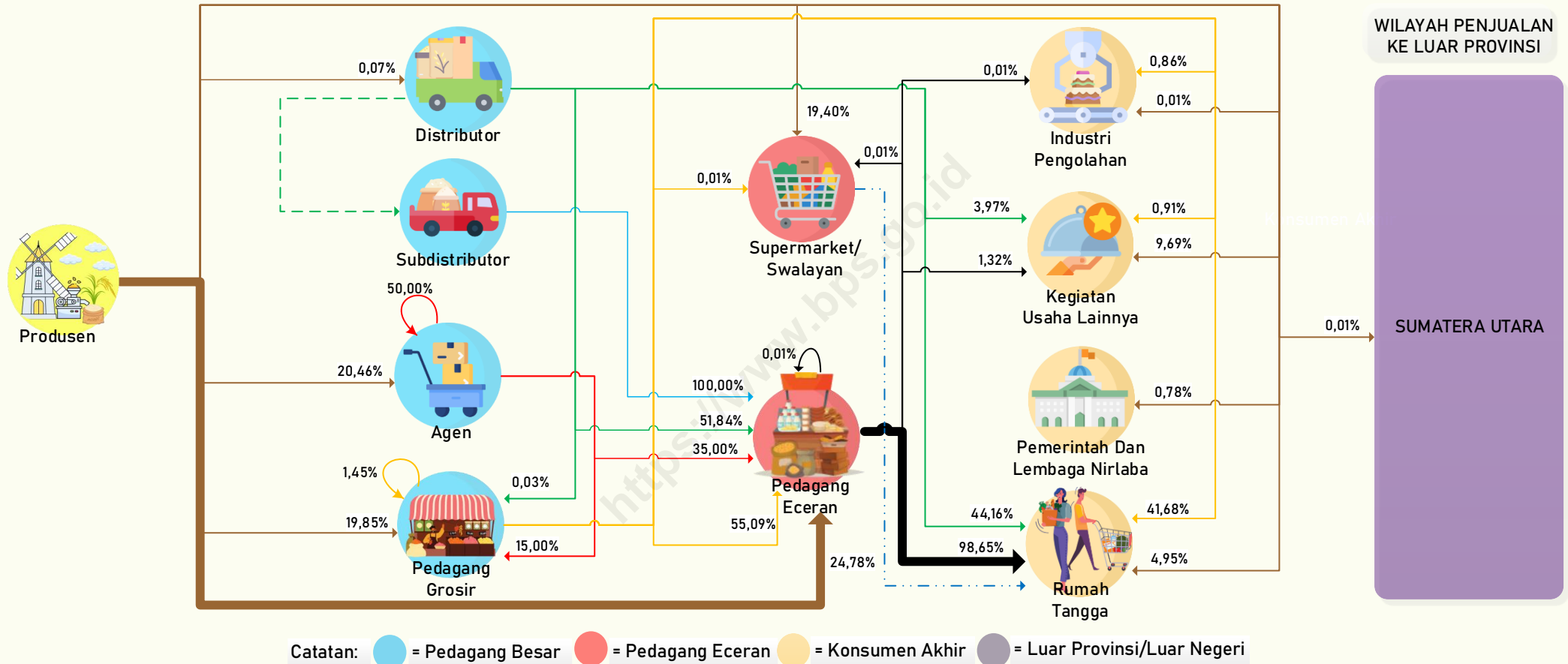
Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Aceh
pada tahun 2025 mengalami
SURPLUS, sehingga kebutuhan
konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh**
produksi dalam provinsi.



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI



Distribusi beras di Provinsi Aceh dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Pedagang Eceran
MPP = **20,13%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Aceh memiliki **2 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **1 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
20,13%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI



Provinsi Aceh melakukan **penjualan** beras ke **1 provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Utara.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Aceh:

16,33%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

20,41%

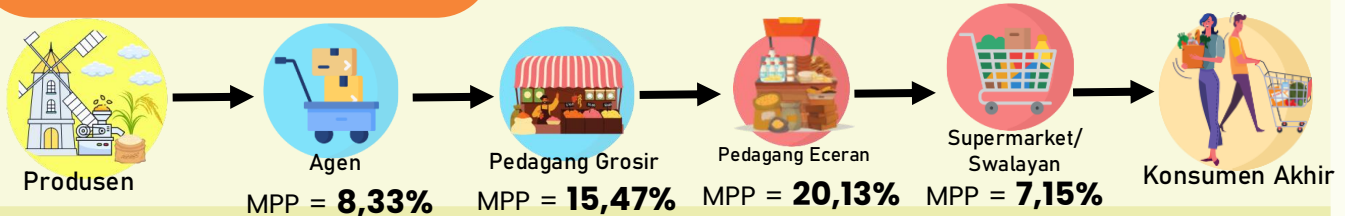
Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.



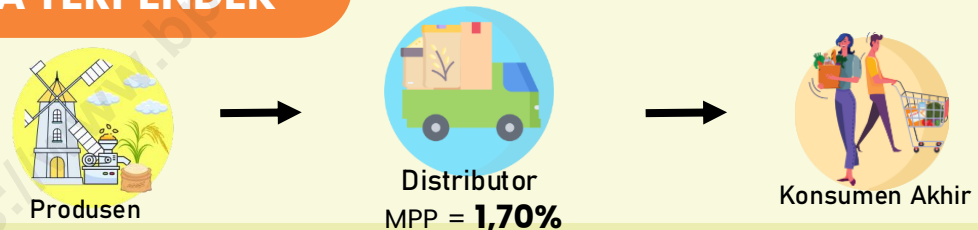
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Aceh melalui **4 pedagang perantara** yakni Agen, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan dengan **MPP_T sebesar 61,01%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Aceh melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor dengan **MPP_T sebesar 1,70%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

26,53%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

SUMATERA UTARA



1.564,06 RIBU TON 1.710,75 RIBU TON

PRODUKSI

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, meskipun demikian **sebagian besar** kebutuhan konsumsi beras **masih dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**

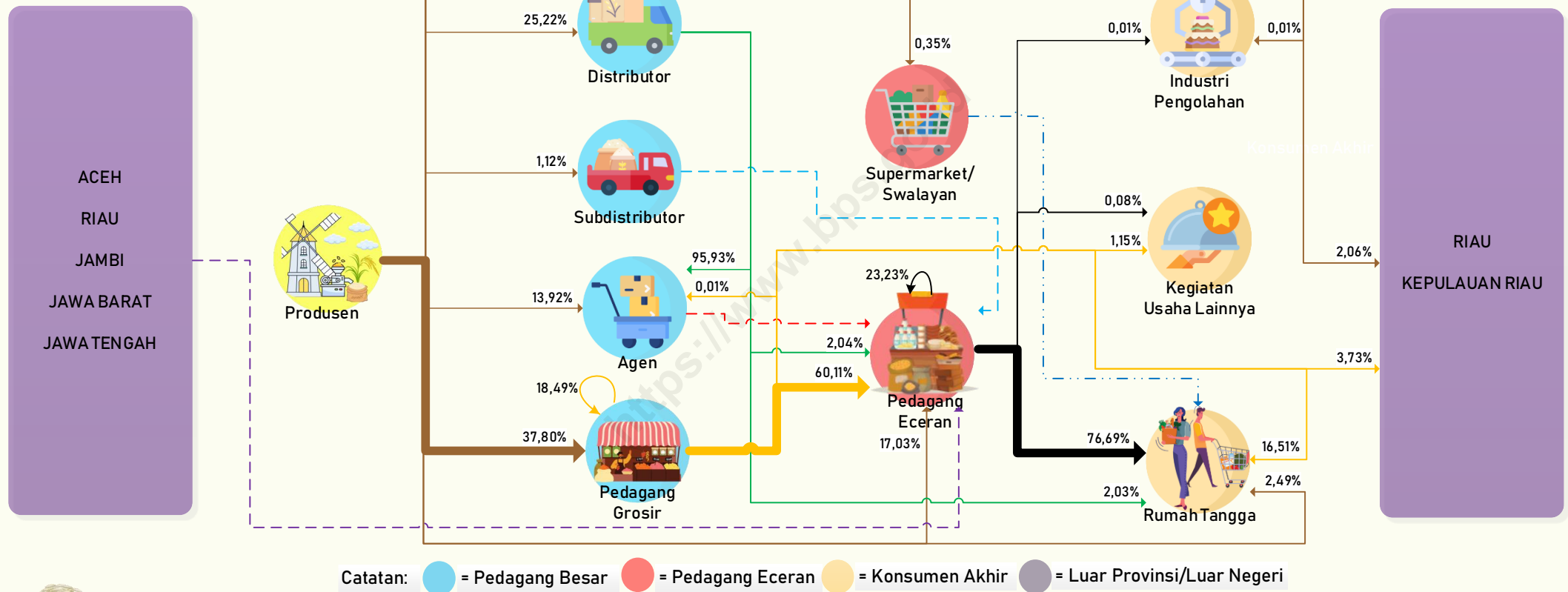


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI



Distribusi beras di Provinsi Sumatera Utara dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Pedagang Grosir

MPP = **6,98%**



Pedagang Eceran

MPP = **6,57%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Sumatera Utara memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
14,01%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Sumatera Utara melakukan **pembelian** beras dari **5 provinsi lain** yaitu Provinsi Aceh, Riau, Jambi, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.



Provinsi Sumatera Utara melakukan **penjualan** beras ke **2 provinsi lain** yaitu Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Sumatera Utara:

26,23%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

21,31%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

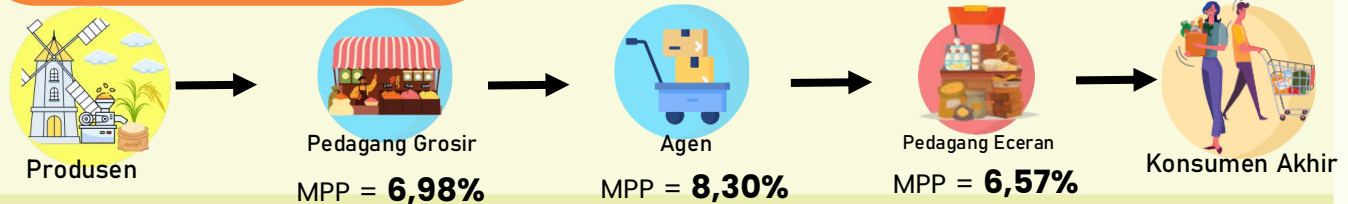
11,48%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

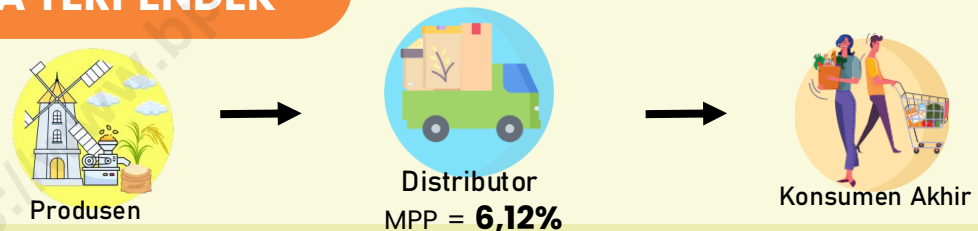
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sumatera Utara melalui **3 pedagang perantara** yakni Pedagang Grosir, Agen, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **23,47%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Sumatera Utara melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor dengan **MPP_T** sebesar **6,12%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

26,23%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

SUMATERA BARAT



799,46^{RIBU}
TON



682,47^{RIBU}
TON

PRODUKSI

KONSUMSI

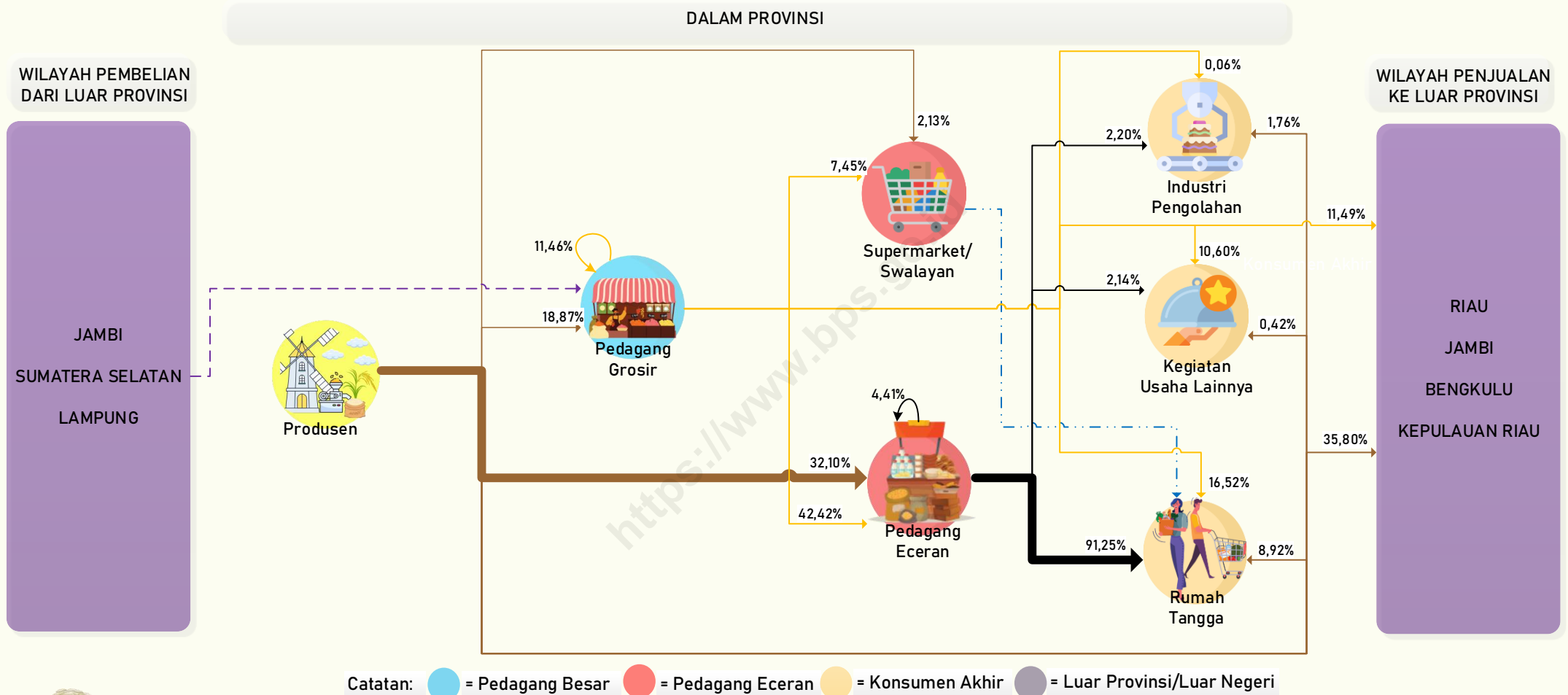
Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)



Produksi beras di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 mengalami **SURPLUS**, sehingga kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS



Distribusi beras di Provinsi Sumatera Barat dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **3 pedagang perantara**, yaitu pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Pedagang Eceran

MPP = **12,97%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Sumatera Barat memiliki **2 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **1 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
12,97%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Sumatera Barat melakukan **pembelian** beras dari **3 provinsi lain** yaitu Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung.



Provinsi Sumatera Barat melakukan **penjualan** beras ke **4 provinsi lain** yaitu Provinsi Riau, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Riau.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Sumatera Barat:

22,22%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

48,89%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

17,78%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Produsen



Pedagang Grosir

MPP = **8,75%**



Pedagang Eceran

MPP = **12,97%**



Konsumen Akhir

Potensi pola terpanjang di Provinsi Sumatera Barat melalui **2 pedagang perantara** yakni Pedagang Grosir dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **22,85%**.

POLA TERPENDEK



Produsen



Supermarket/
Swalayan
MPP = **7,15%**



Konsumen Akhir

Potensi pola terpendek di Provinsi Sumatera Barat melalui **1 pedagang perantara** yakni Supermarket/swalayan dengan **MPP_T** sebesar **7,15%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

31,11%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

RIAU



606,10 RIBU TON

128,02 RIBU TON

PRODUKSI

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Riau pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, hanya **sebagian kecil** kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**

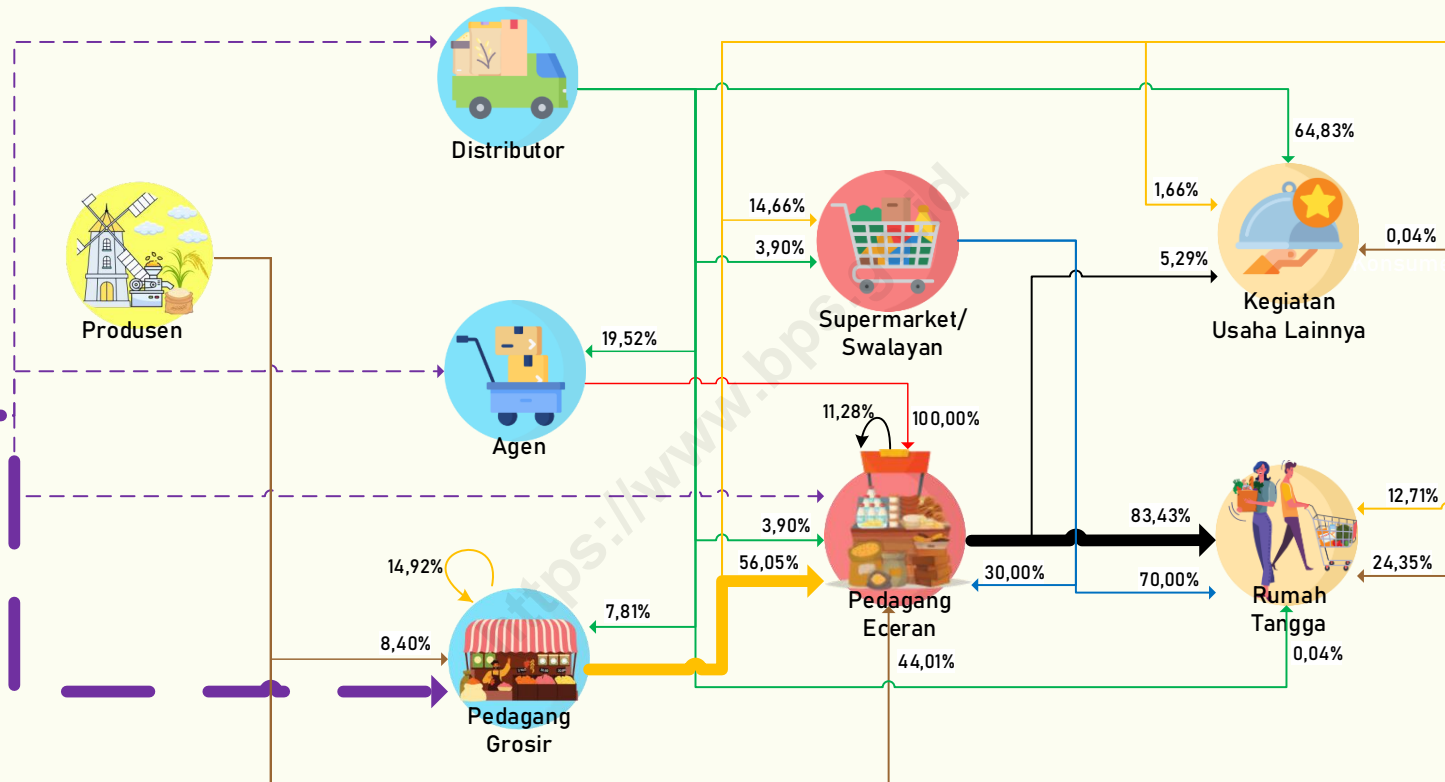


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
JAMBI
SUMATERA SELATAN
LAMPUNG
DKI JAKARTA



Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Riau dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **5 pedagang perantara**, yaitu distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Luar Provinsi



Pedagang Grosir

MPP = **14,51%**



Pedagang Eceran

MPP = **14,17%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Riau memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
30,74%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Riau melakukan **pembelian** beras dari **6 provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan DKI Jakarta.



Provinsi Riau melakukan **penjualan** beras ke **1 provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Utara.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Riau:

23,68%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

31,58%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

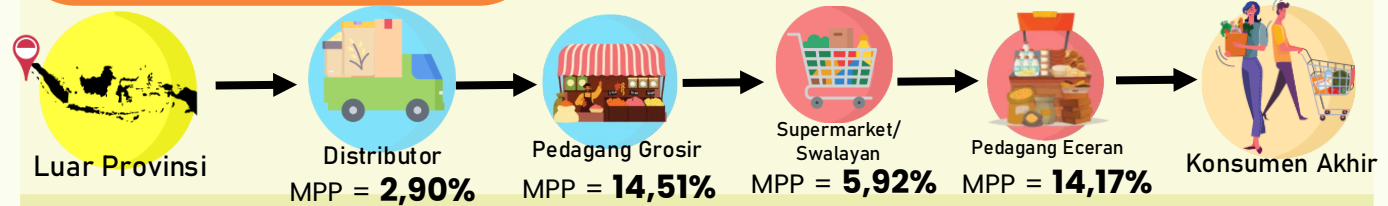
15,79%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

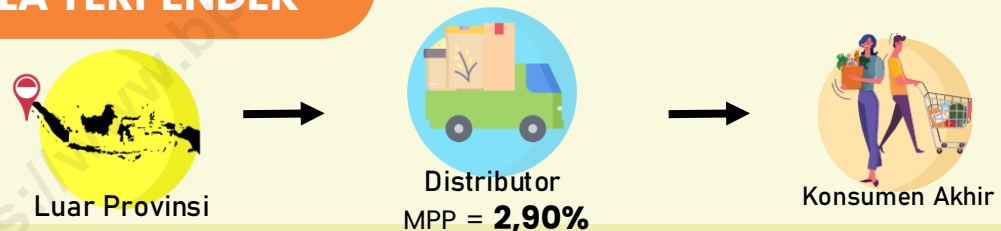
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Riau melalui **4 pedagang perantara** yakni Distributor, Pedagang Grosir, Supermarket/Swalayan, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **42,49%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Riau melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor dengan **MPP_T** sebesar **2,90%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

21,05%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

JAMBI



210,65 RIBU
TON

PRODUKSI

324,99 RIBU
TON

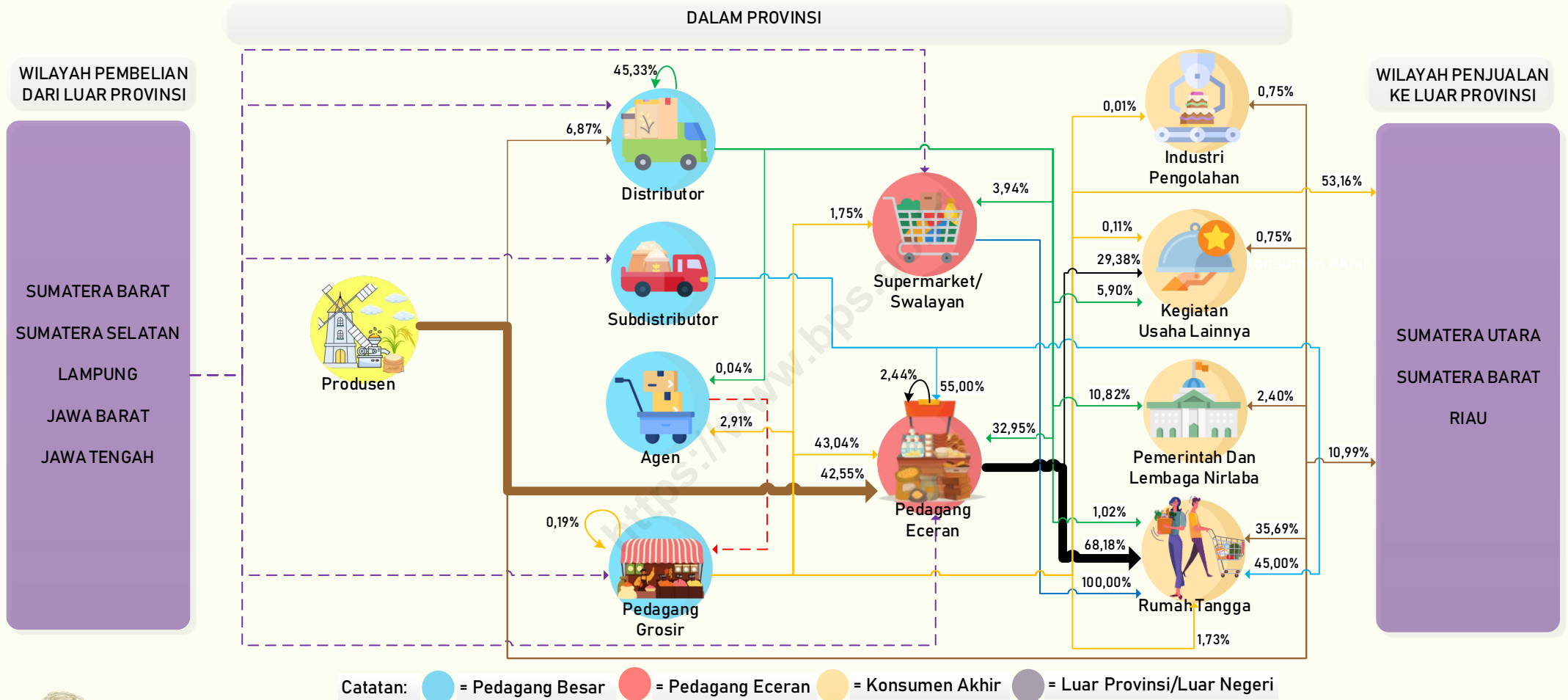
KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Jambi pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, meskipun demikian **sebagian besar** kebutuhan konsumsi beras **masih dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS



Distribusi beras di Provinsi Jambi dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Pedagang Eceran
MPP = **10,31%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Jambi memiliki **2 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **1 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
10,31%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Jambi melakukan **pembelian** beras dari **5 provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.



Provinsi Jambi melakukan **penjualan** beras ke **3 provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Jambi:

25,00%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

17,86%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

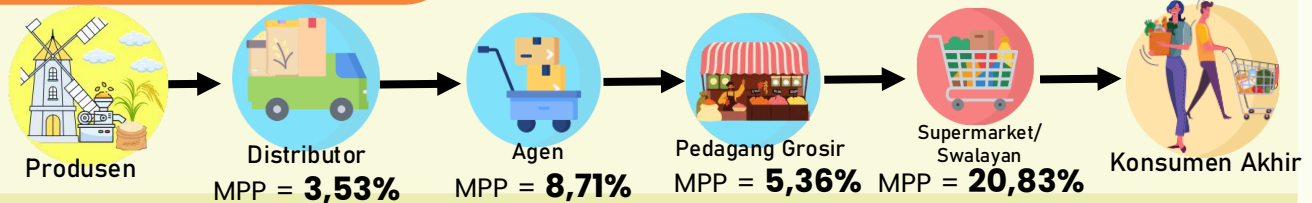
14,29%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

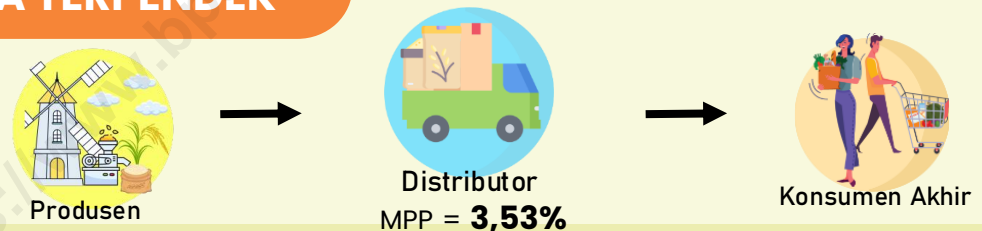
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Jambi melalui **4 pedagang perantara** yakni Distributor, Agen, Pedagang Grosir, dan Supermarket/Swalayan dengan **MPP_T** sebesar **42,74%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Jambi melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor dengan **MPP_T** sebesar **3,53%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

28,57%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.

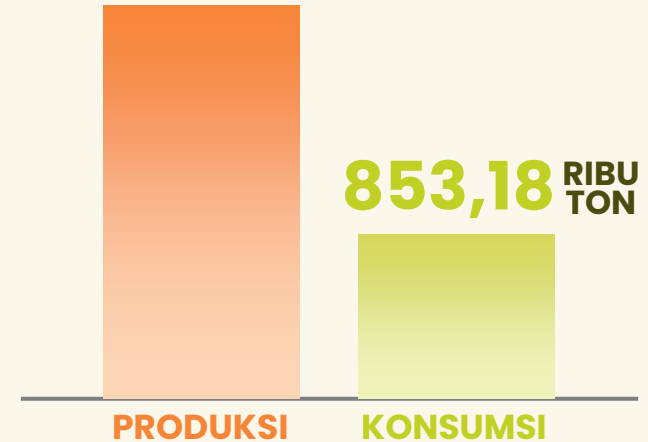


PROVINSI

SUMATERA SELATAN



2.035,39 RIBU
TON



Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)



Produksi beras di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 mengalami **SURPLUS**, sehingga kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**

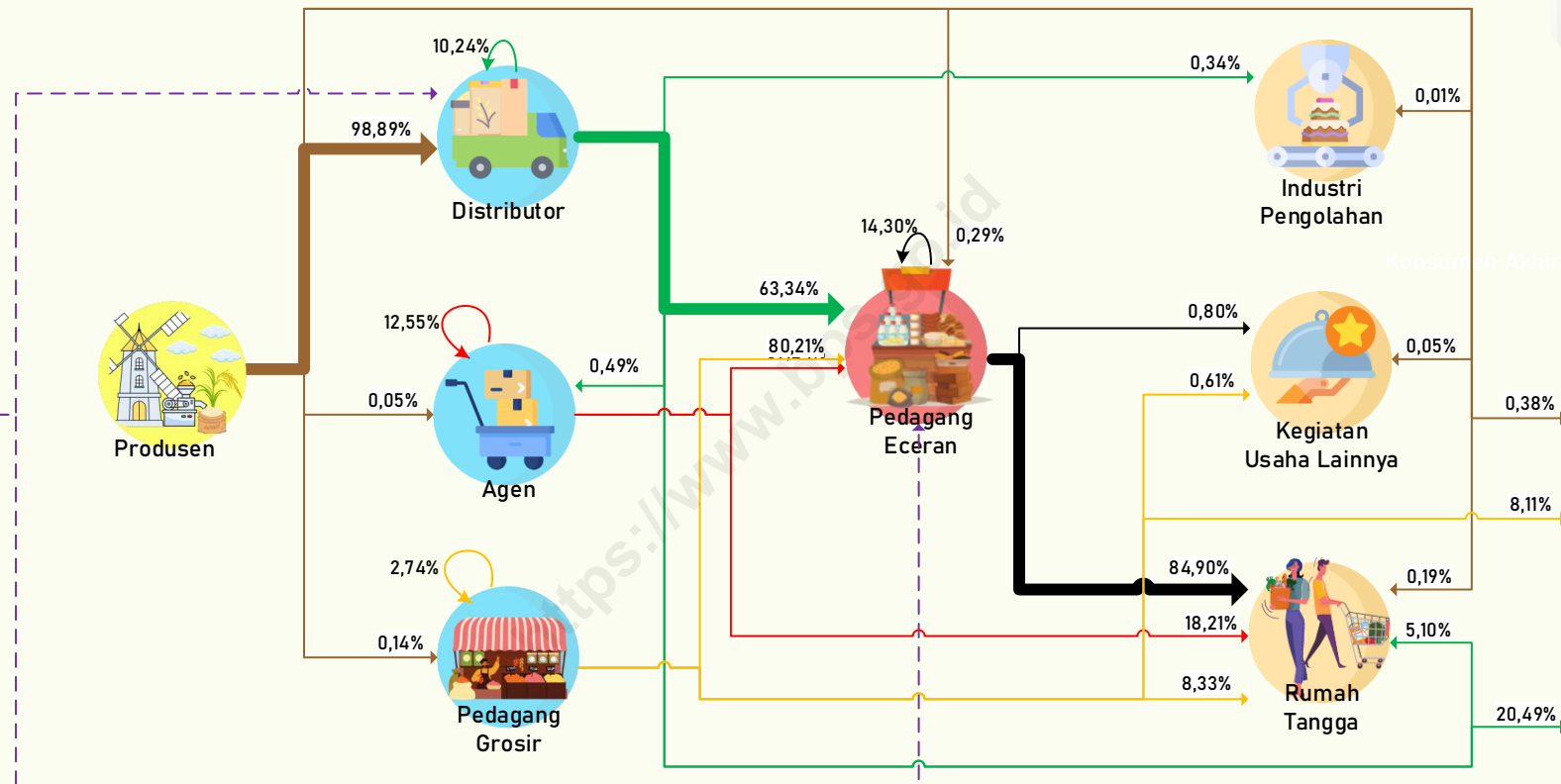


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI



Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Sumatera Selatan dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **4 pedagang perantara**, yaitu distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Distributor
MPP = **13,57%**



Pedagang Eceran
MPP = **10,87%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Sumatera Selatan memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
25,92%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

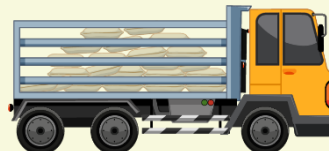
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Sumatera Selatan melakukan **pembelian** beras dari **1 provinsi lain** yaitu Provinsi Lampung.



Provinsi Sumatera Selatan melakukan **penjualan** beras ke **5 provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Sumatera Selatan:

16,67%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

11,90%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

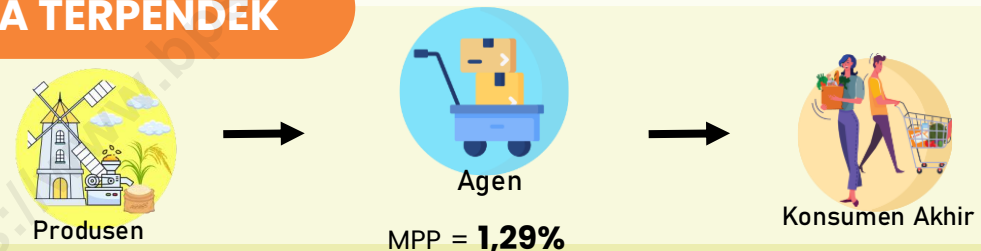


POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



POLA TERPENDEK



PERSENTASE PELAKU USAHA

30,95%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau online.



PROVINSI

BENGKULU



203,49^{RIBU}
TON

147,81^{RIBU}
TON

PRODUKSI

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)



Produksi beras di Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, meskipun demikian **sebagian besar** kebutuhan konsumsi beras **masih dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**

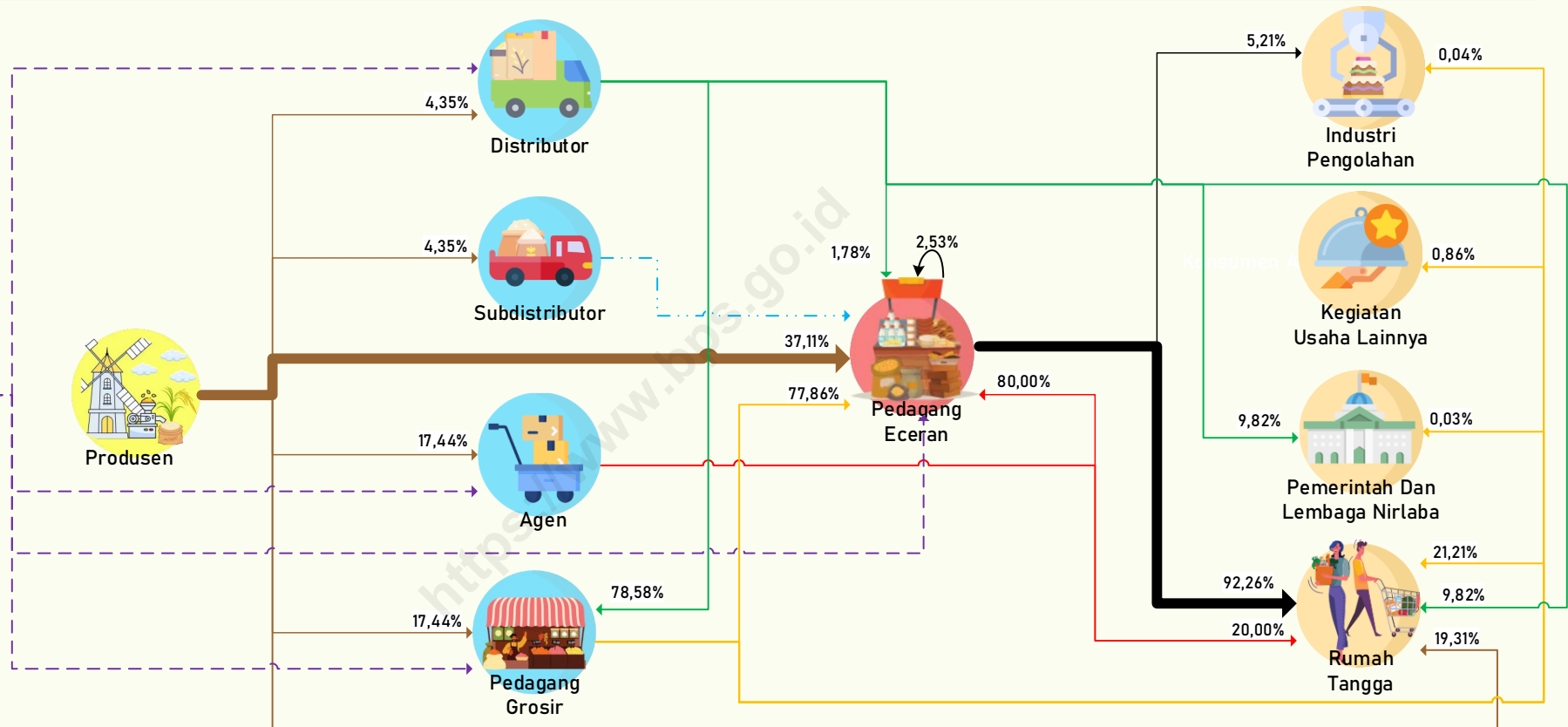


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
LAMPUNG



Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri



Distribusi beras di Provinsi Bengkulu dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **5 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Pedagang Eceran

MPP = **11,78%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Bengkulu memiliki **2 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **1 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
11,78%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

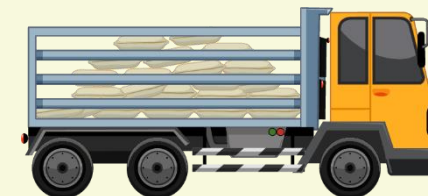
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Bengkulu melakukan **pembelian** beras dari **3 provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung.



FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Bengkulu:

7,69%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

17,95%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

7,69%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

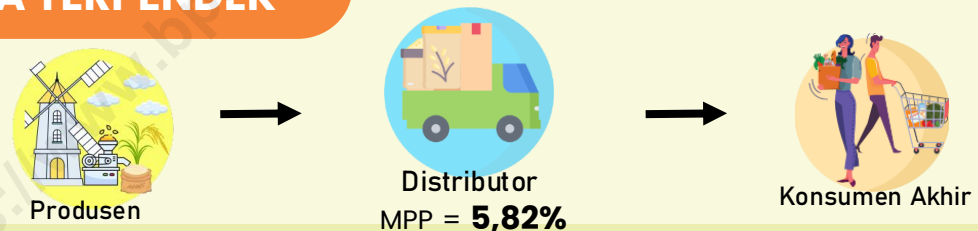
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Bengkulu melalui **3 pedagang perantara** yakni Distributor, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **26,86%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Bengkulu melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor dengan **MPP_T** sebesar **5,82%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

41,03%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.

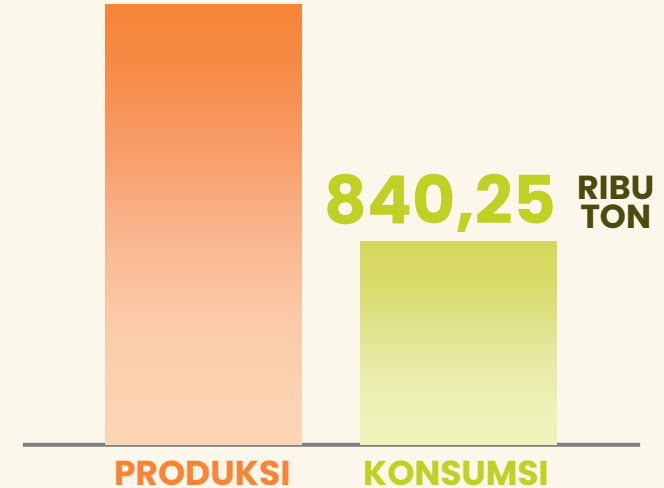


PROVINSI

LAMPUNG



1.822,45 RIBU TON



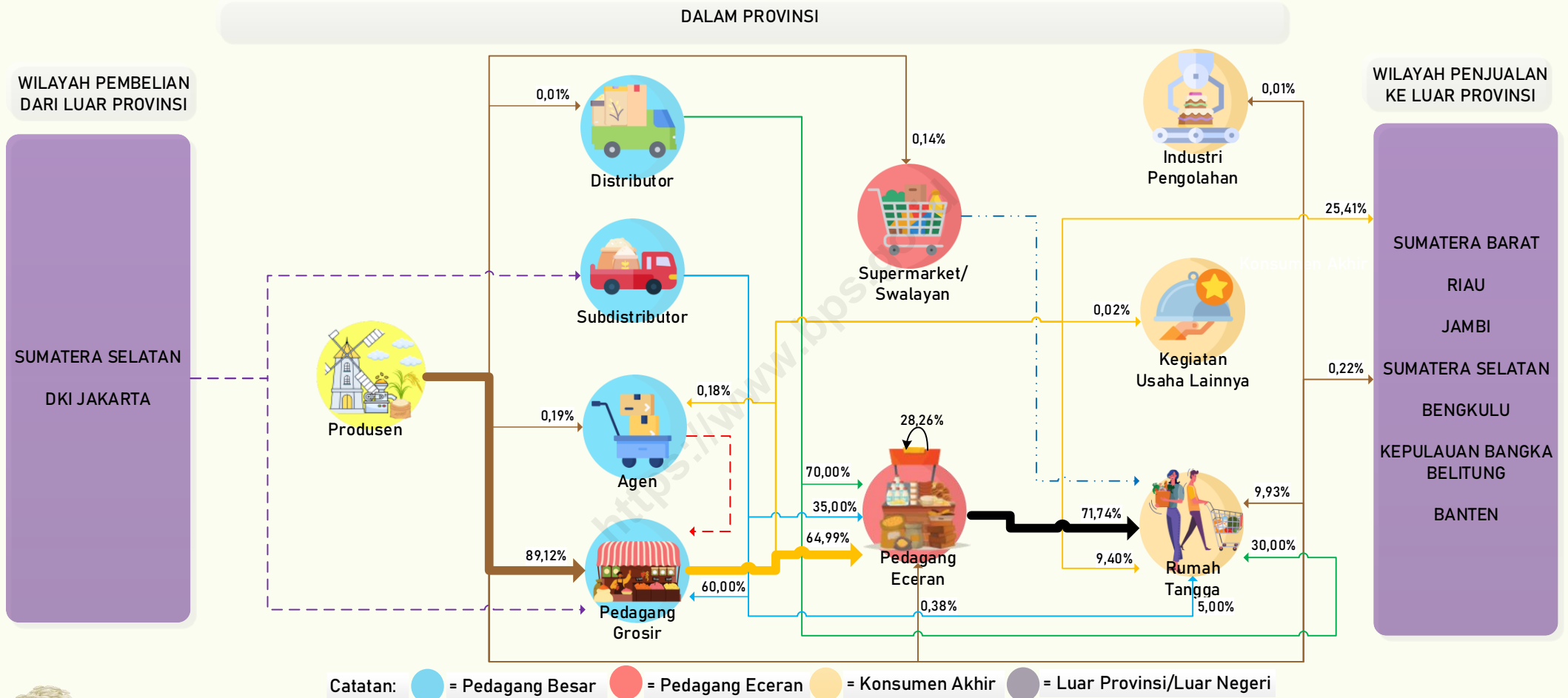
Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)



Produksi beras di Provinsi Lampung pada tahun 2025 mengalami **SURPLUS**, sehingga kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS



Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Lampung dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Pedagang Grosir

MPP = **6,62%**



Pedagang Eceran

MPP = **8,29%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Lampung memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
15,46%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

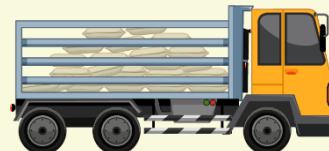
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Lampung melakukan **pembelian** beras dari **2 provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan DKI Jakarta.



Provinsi Lampung melakukan **penjualan** beras ke **7 provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Banten.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Lampung:

36,73%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

24,49%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

24,49%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

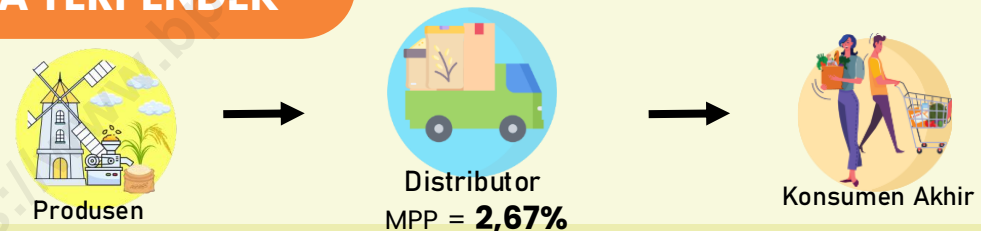
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Lampung melalui **3 pedagang perantara** yakni Subdistributor, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **37,15%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Lampung melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor dengan **MPP_T** sebesar **2,67%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

40,82%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



148,84 RIBU TON

38,72 RIBU TON

PRODUKSI

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)



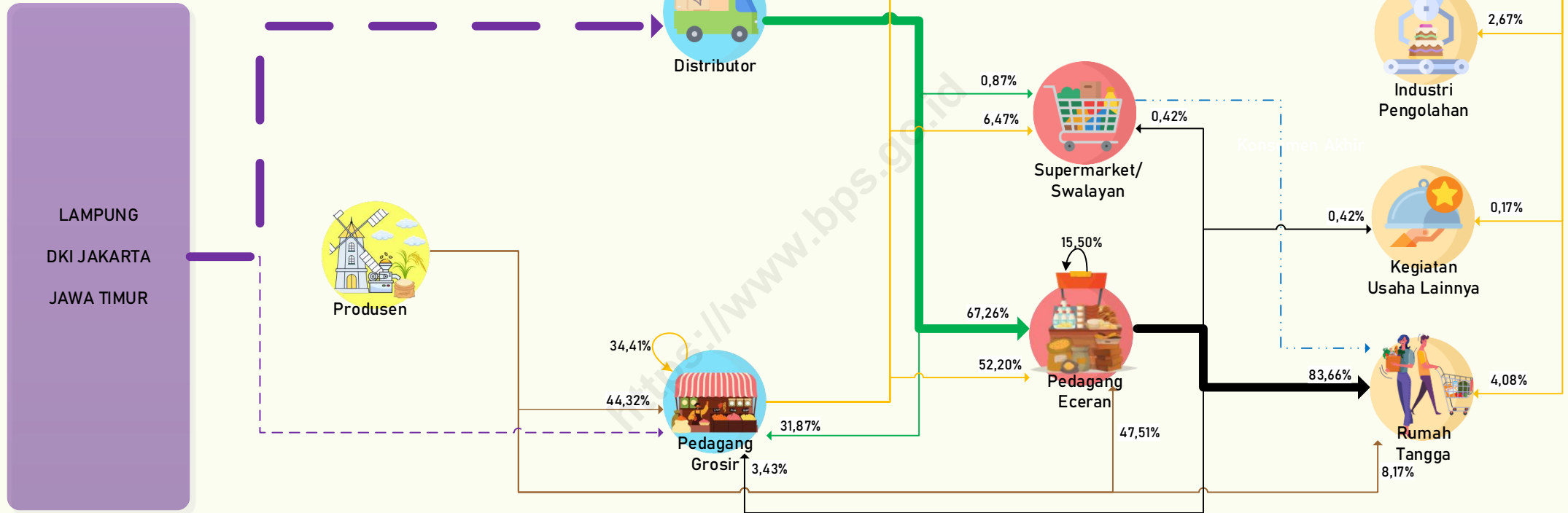
Produksi beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, hanya **sebagian kecil** kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI



Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **4 pedagang perantara**, yaitu distributor, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Luar Provinsi



Distributor

MPP = **4,11%**



Pedagang Eceran

MPP = **7,62%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
12,04%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

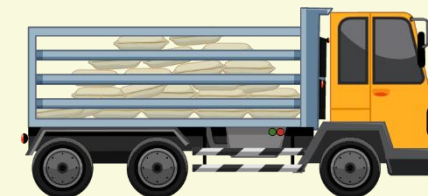
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan **pembelian** beras dari **3 provinsi lain** yaitu Provinsi Lampung, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.



FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

11,11%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

8,33%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

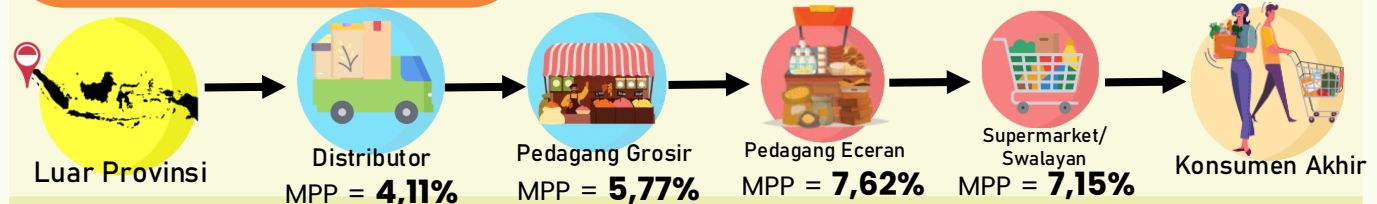
5,56%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

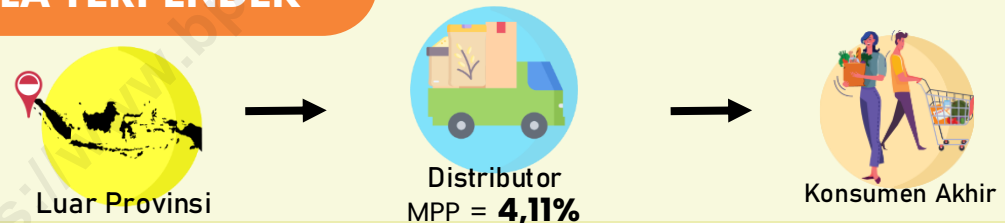
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui **4 pedagang perantara** yakni Distributor, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan dengan **MPP_T** sebesar **26,98%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor dengan **MPP_T** sebesar **4,11%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

30,56%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

KEPULAUAN RIAU



202,56 RIBU
TON

0,20 RIBU
TON

PRODUKSI

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

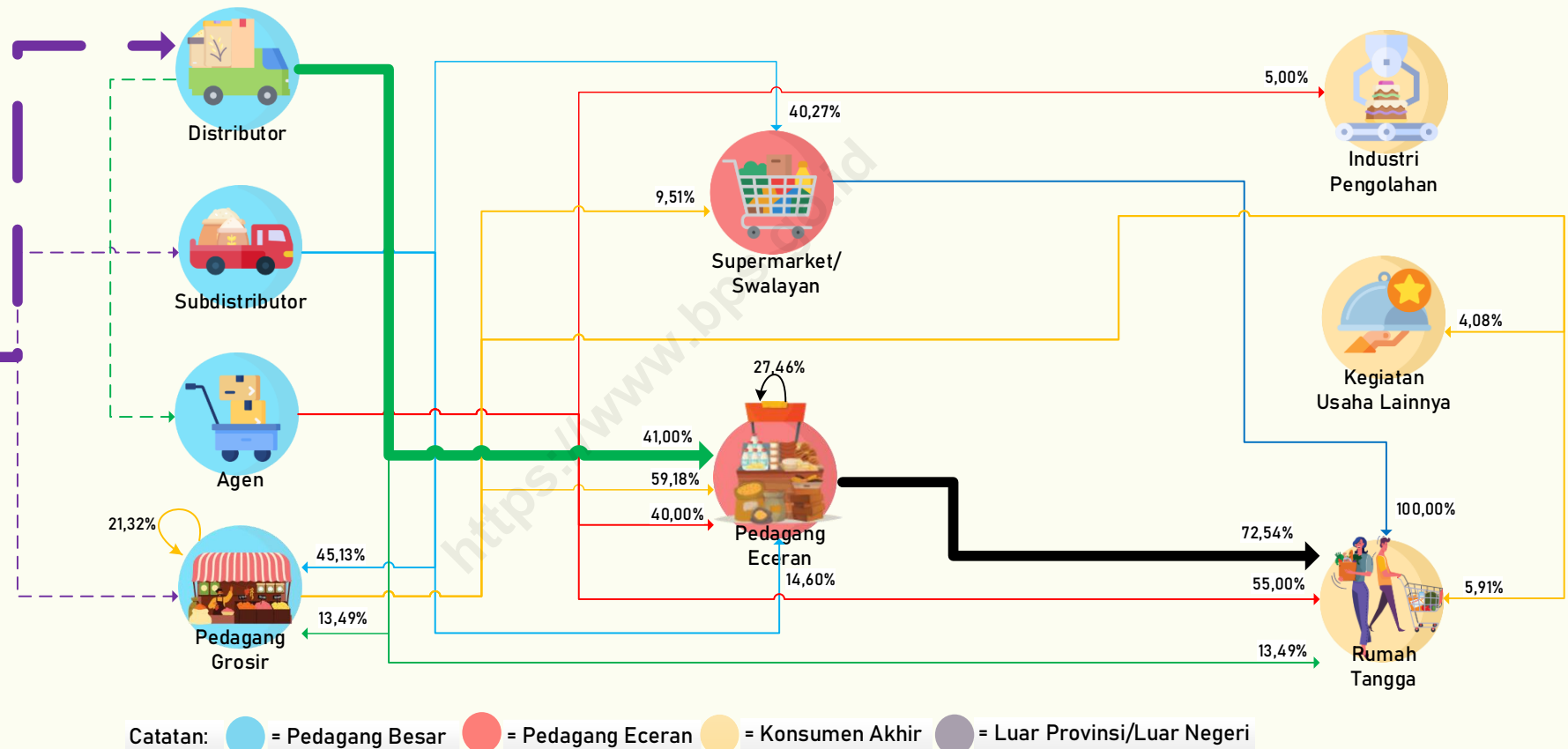


Produksi beras di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, hanya **sebagian kecil** kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



DALAM PROVINSI

SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
DKI JAKARTA
JAWA BARAT
JAWA TENGAH



Distribusi beras di Provinsi Kepulauan Riau dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan , dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



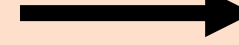
Luar Provinsi



Distributor
MPP = **9,47%**



Pedagang Eceran
MPP = **9,47%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Kepulauan Riau memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
19,84%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

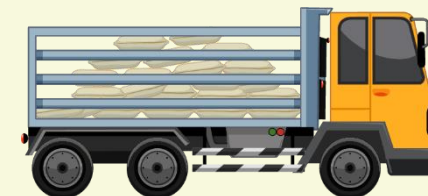
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Kepulauan Riau melakukan **pembelian** beras dari **5 provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.



FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Kepulauan Riau:

15,38%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

11,54%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

7,69%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



POLA TERPENDEK



PERSENTASE PELAKU USAHA

34,62%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

DKI JAKARTA



1.284,23 RIBU TON

0,83 RIBU TON

PRODUKSI

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, hanya **sebagian kecil** kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi**.

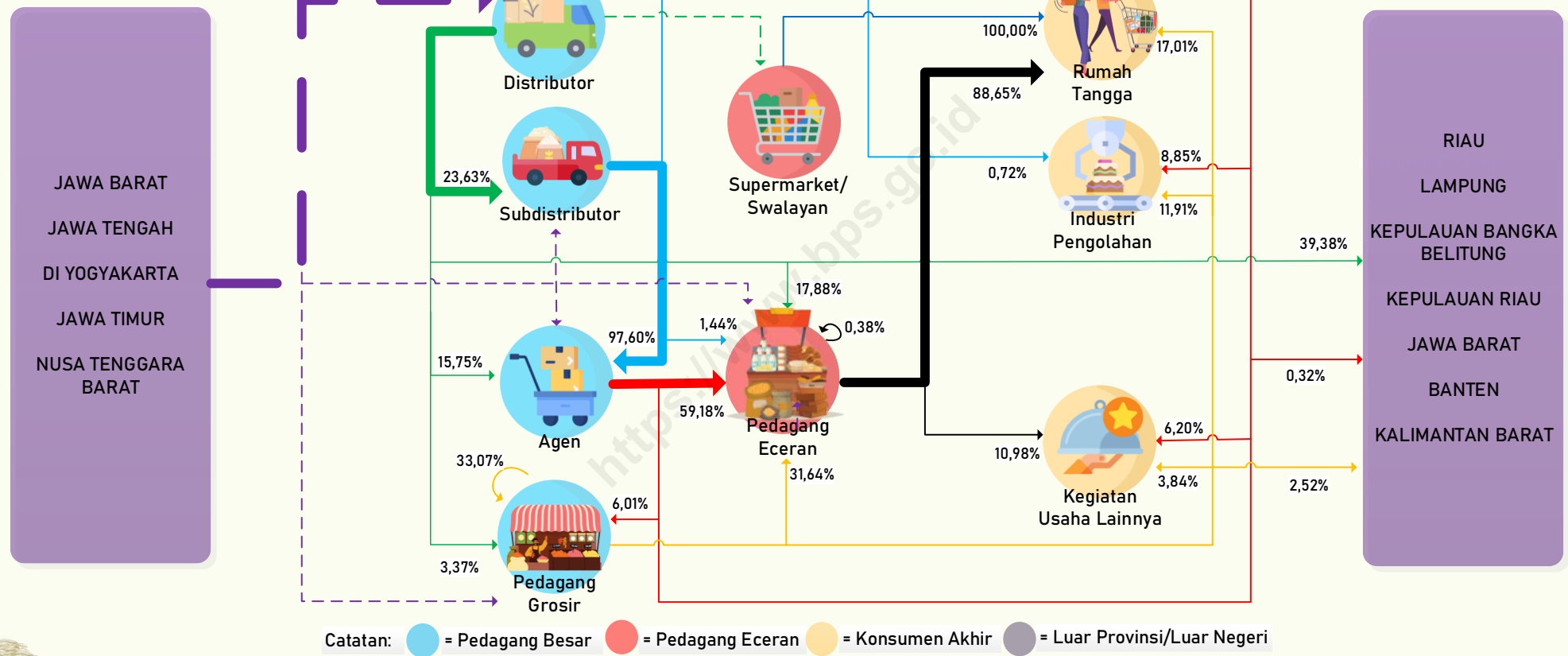


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

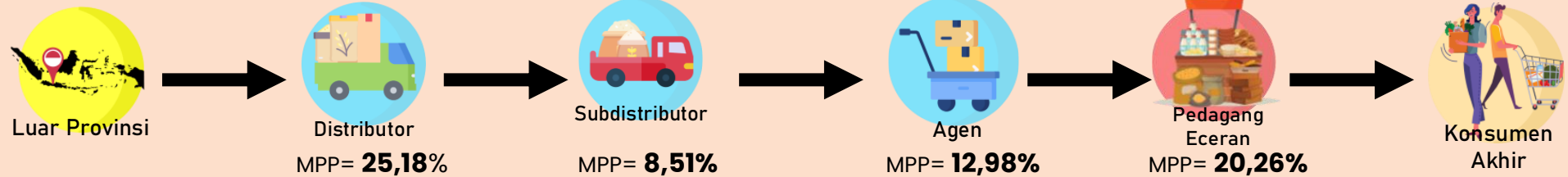
WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI



Distribusi beras di Provinsi DKI Jakarta dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Pola utama di Provinsi DKI Jakarta memiliki **5 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **4 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
84,56%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi DKI Jakarta melakukan **pembelian** beras dari **5 provinsi lain** yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.



Provinsi DKI Jakarta melakukan **penjualan** beras ke **7 provinsi lain** yaitu Provinsi Riau, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten dan Kalimantan Barat.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi DKI Jakarta:

11,11%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

24,44%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

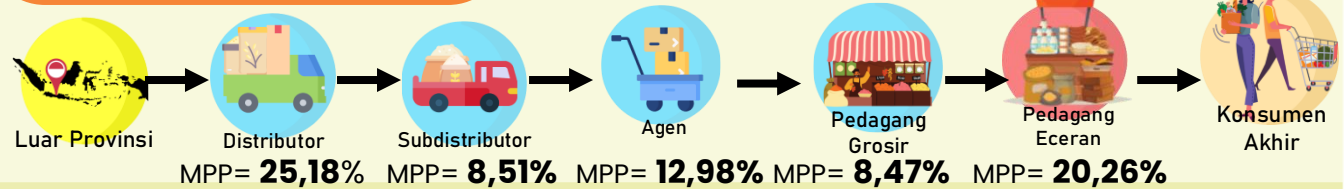
6,67%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi DKI Jakarta melalui **5 pedagang perantara** yakni Distributor, Subdistributor, Agen, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **100,19%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi DKI Jakarta melalui **1 pedagang perantara** yakni Pedagang Grosir dengan **MPP_T** sebesar **8,47%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

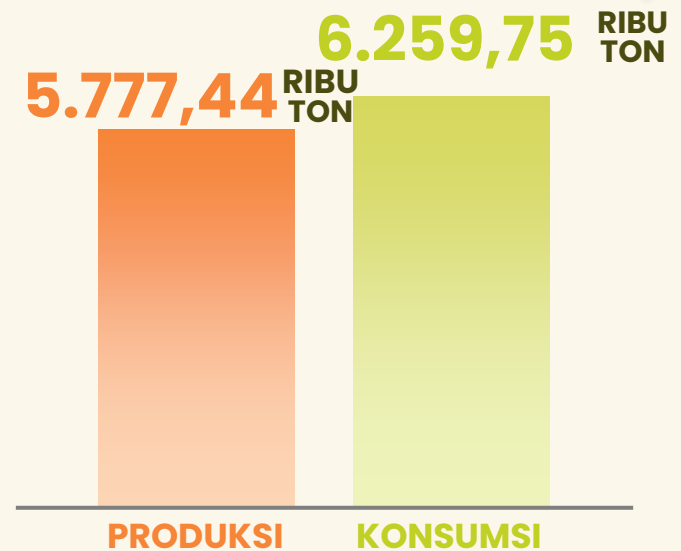
37,78%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

JAWA BARAT



Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, meskipun demikian **sebagian besar** kebutuhan konsumsi beras **masih dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**

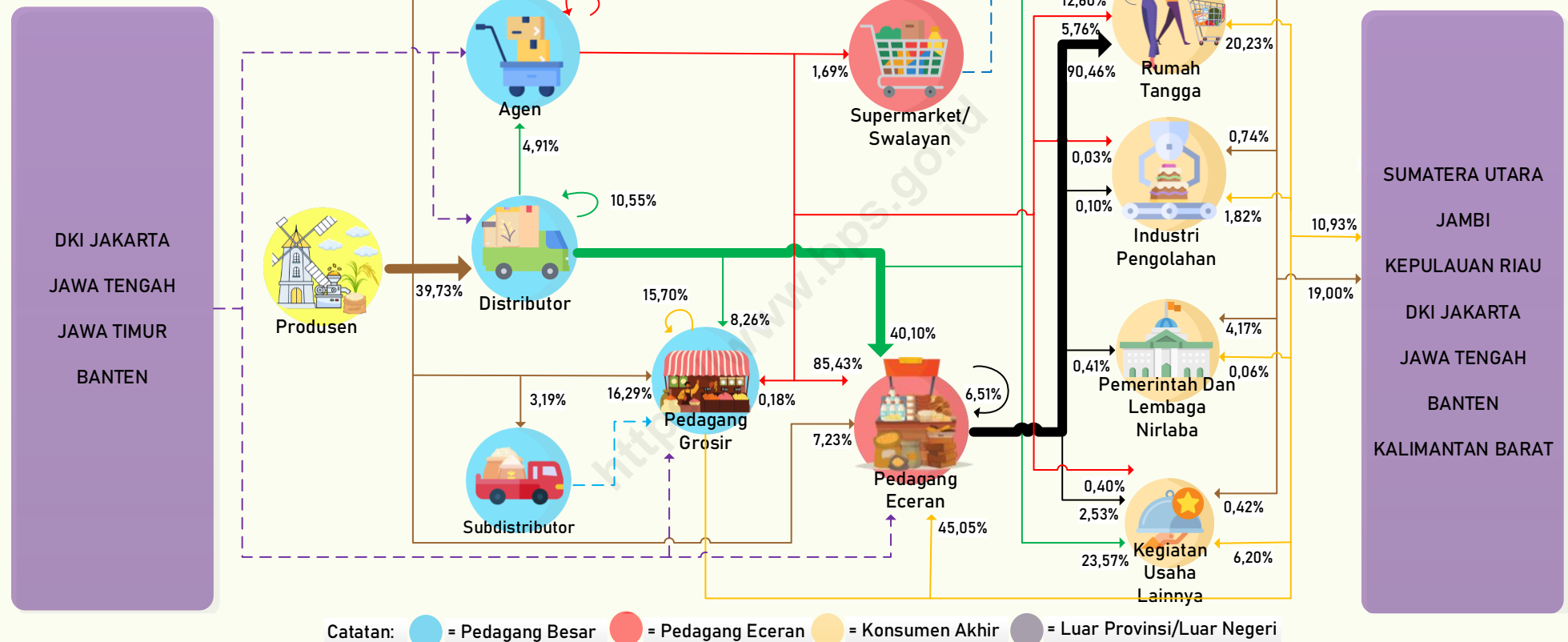


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI



Distribusi beras di Provinsi Jawa Barat dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Distributor

MPP= **3,68%**



Pedagang
Eceran

MPP= **15,29%**



Konsumen
Akhir

Pola utama di Provinsi Jawa Barat memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
19,53%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Jawa Barat melakukan **pembelian** beras dari **4 provinsi lain** yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten



Provinsi Jawa Barat melakukan **penjualan** beras ke **7 provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Kalimantan Barat

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Jawa Barat:

27,21%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

28,68%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

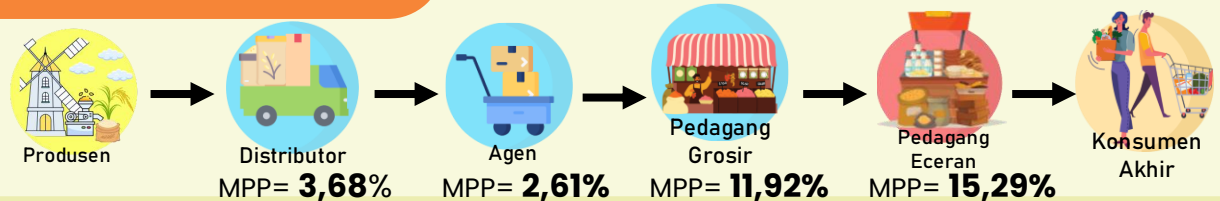
14,71%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

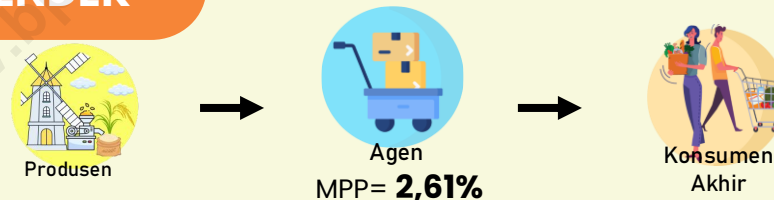
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Jawa Barat melalui **4 pedagang perantara** yakni Distributor, Agen, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **37,27%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Jawa Barat melalui **1 pedagang perantara** yakni Agen dengan **MPP_T** sebesar **2,61%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

44,85%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI JAWA TENGAH



5.324,51 RIBU
TON

400,22 RIBU
TON

PRODUKSI

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 mengalami **SURPLUS**, sehingga kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**

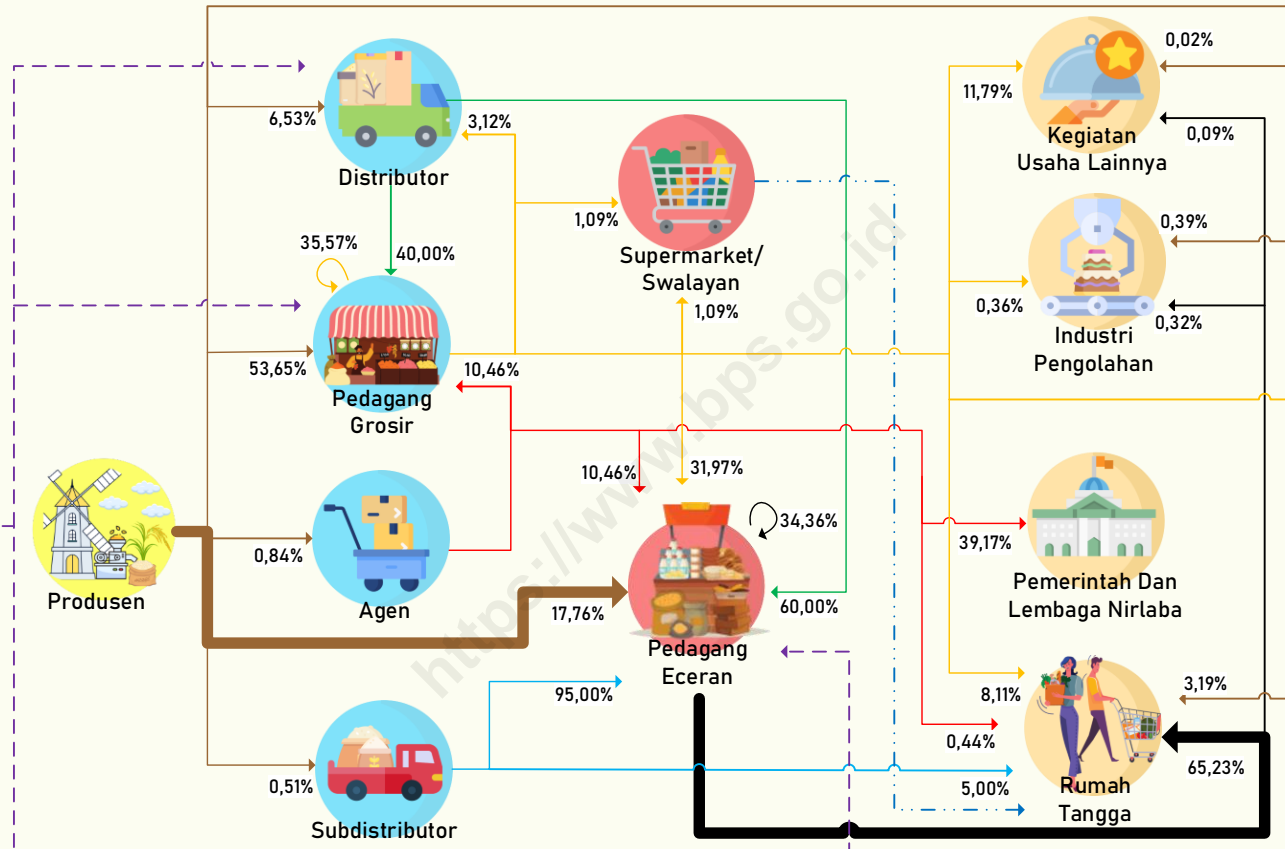


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

JAWA BARAT
DI YOGYAKARTA
JAWA TIMUR



WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI

SUMATERA UTARA
JAMBI
KEPULAUAN RIAU
DKI JAKARTA
JAWA BARAT
DI YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BANTEN
BALI
NUSA TENGGARA
TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI SELATAN
MALUKU
PAPUA BARAT

Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Jawa Tengah dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Pedagang Eceran

MPP= **5,00%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Jawa Tengah memiliki **2 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **1 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
5,00%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

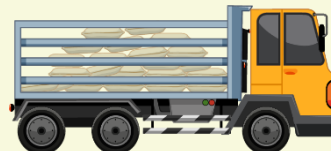
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Jawa Tengah melakukan **pembelian** beras dari **3 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.



Provinsi Jawa Tengah melakukan **penjualan** beras ke **16 provinsi lain** yaitu Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Jawa Tengah:

33,33%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

27,62%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

24,76%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

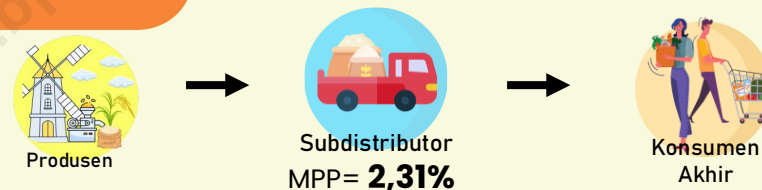
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Jawa Tengah melalui **3 pedagang perantara** yakni Distributor, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **15,30%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Jawa Tengah melalui **1 pedagang perantara** yakni Subdistributor dengan **MPP_T** sebesar **2,31%**.

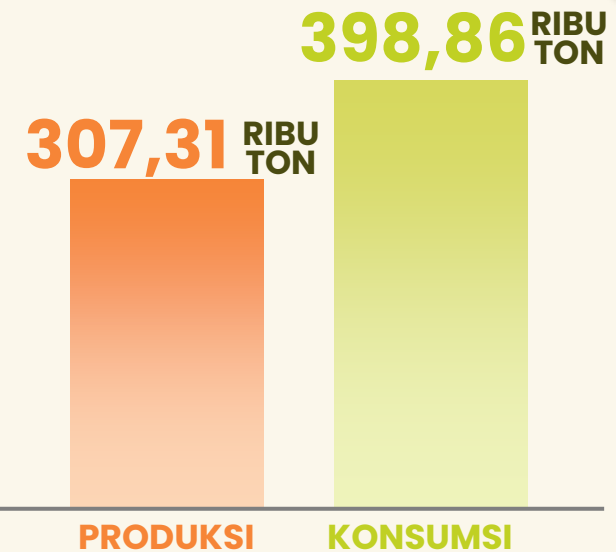
PERSENTASE PELAKU USAHA

40,00%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI DI YOGYAKARTA

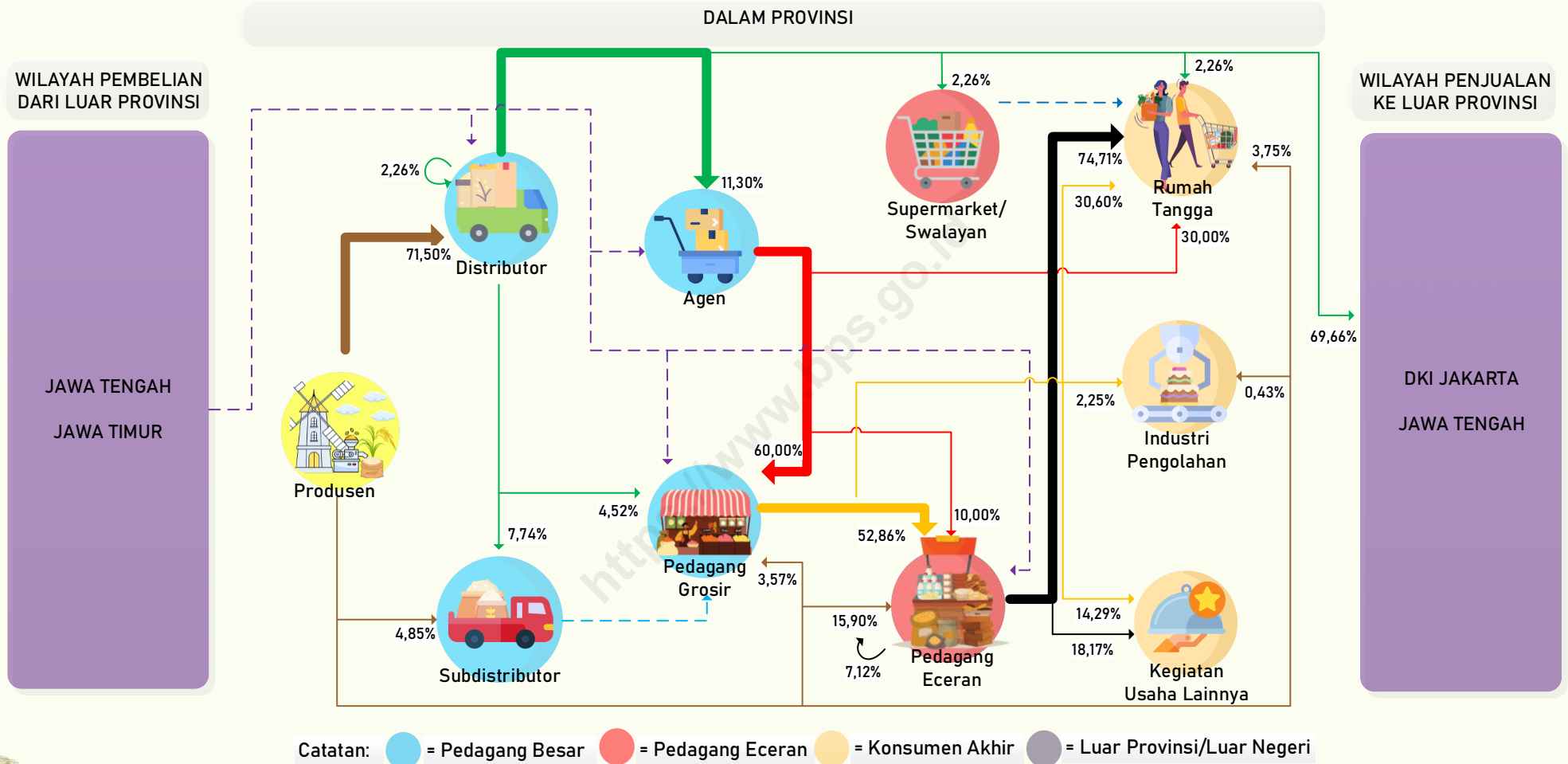


Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, meskipun demikian **sebagian besar** kebutuhan konsumsi beras **masih dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS



Distribusi beras di Provinsi DI Yogyakarta dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Distributor

MPP= **4,77%**



Agen

MPP= **8,51%**



Pedagang
Grosir

MPP= **7,78%**



Pedagang
Eceran

MPP= **7,42%**



Konsumen
Akhir

Pola utama di Provinsi DI Yogyakarta memiliki **5 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **4 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
31,62%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

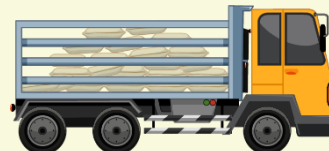
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi DI Yogyakarta melakukan **pembelian** beras dari **2 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.



Provinsi DI Yogyakarta melakukan **penjualan** beras ke **2 provinsi lain** yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi DI Yogyakarta:

20,59%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

17,65%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

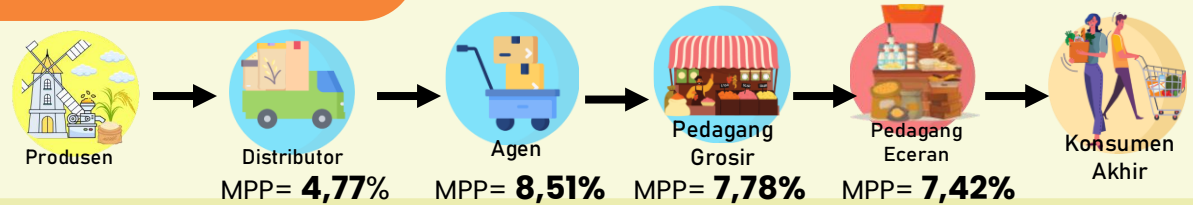
5,88%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

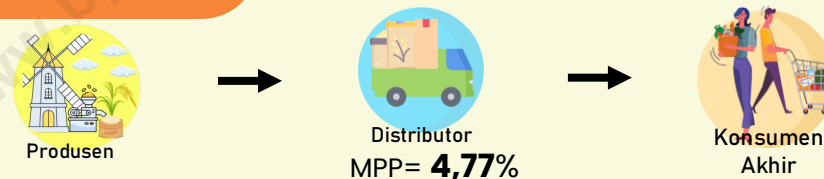
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi DI Yogyakarta melalui **4 pedagang perantara** yakni Distributor, Agen, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan MPP_T sebesar **31,62%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi DI Yogyakarta melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor dengan MPP_T sebesar **4,77%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

76,47%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau online.



PROVINSI JAWA TIMUR



6.004,97 RIBU
TON

4.610,13 RIBU
TON

PRODUKSI

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 mengalami **SURPLUS**, sehingga kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**

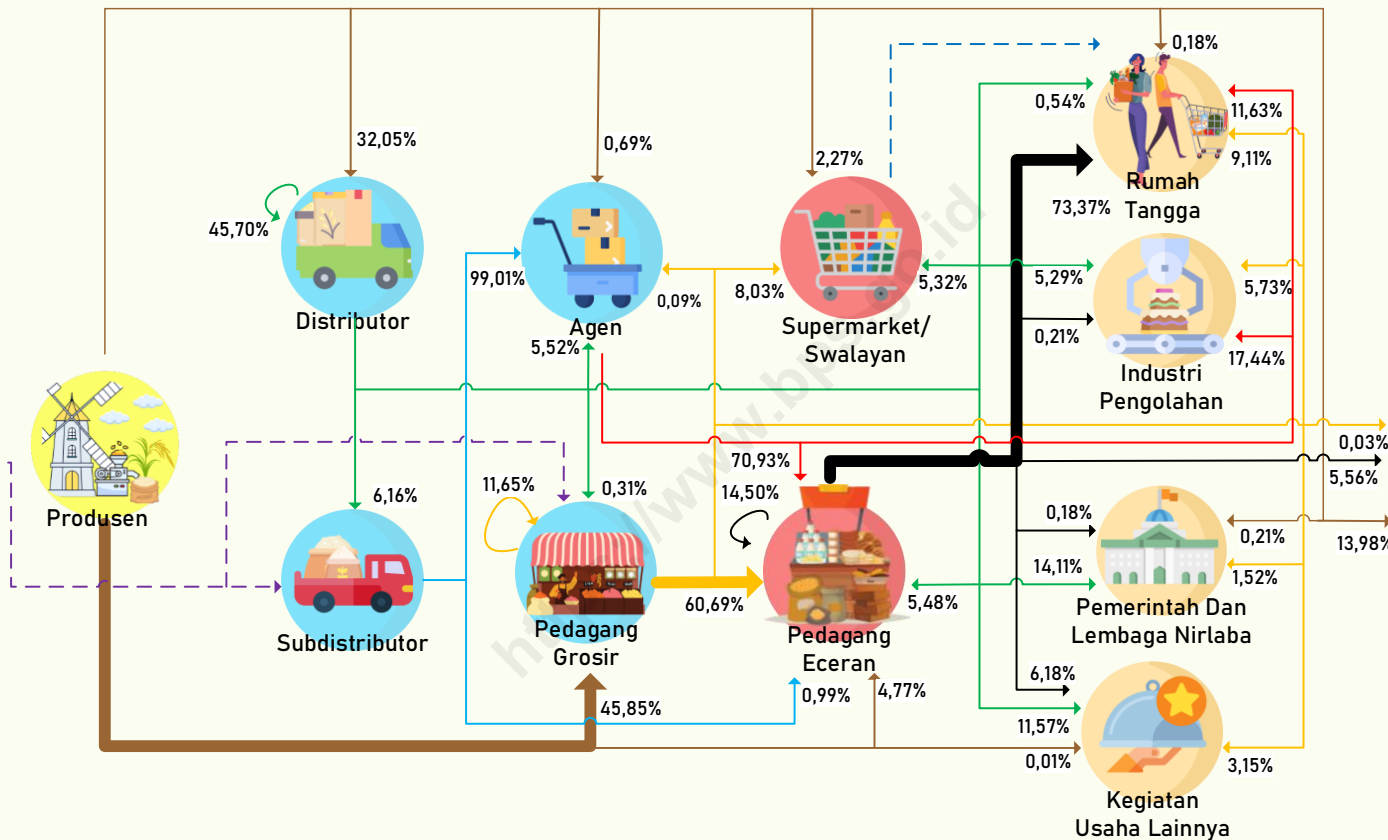


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

JAWA TENGAH



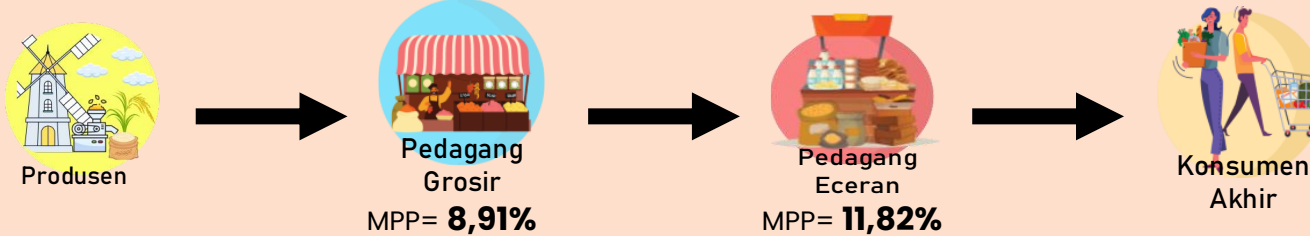
WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
DKI JAKARTA
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
DI YOGYAKARTA
BANTEN
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI TENGAH
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA BARAT
PAPUA BARAT DAYA
PAPUA
PAPUA SELATAN
PAPUA TENGAH
PAPUA PEGUNUNGAN

Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Jawa Timur dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Pola utama di Provinsi Jawa Timur memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
21,78%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Jawa Timur melakukan **pembelian** beras dari **1 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Tengah.



Provinsi Jawa Timur melakukan **penjualan** beras ke **23 provinsi lain** yaitu Provinsi Kep. Babel, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sulteng, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Jawa Timur:

21,26%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

23,62%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

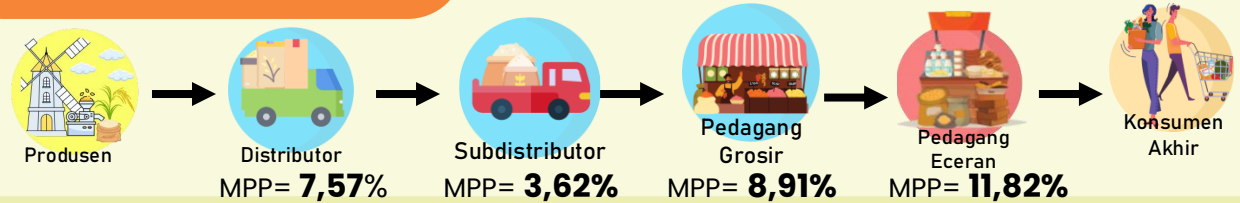
11,81%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

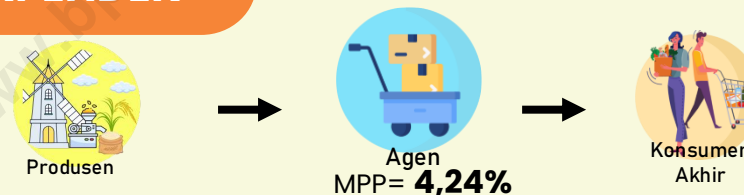
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Jawa Timur melalui **4 pedagang perantara** yakni Distributor, Subdistributor, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **35,74%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Jawa Timur melalui **1 pedagang perantara** yakni Agen dengan **MPP_T** sebesar **4,24%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

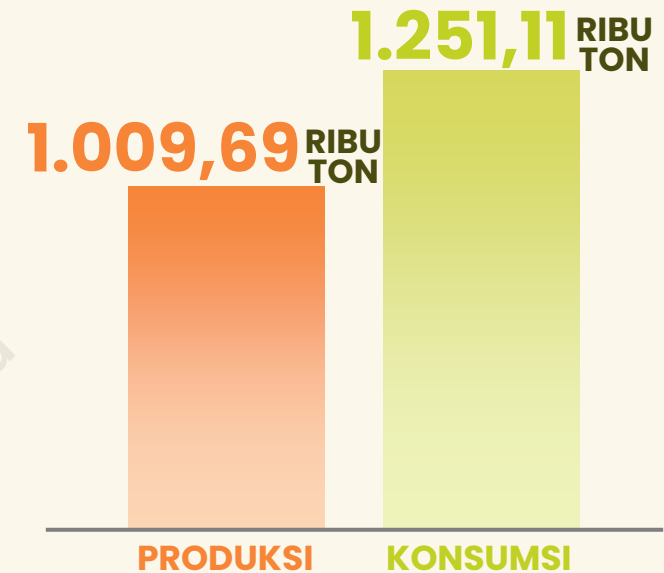
40,94%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

BANTEN

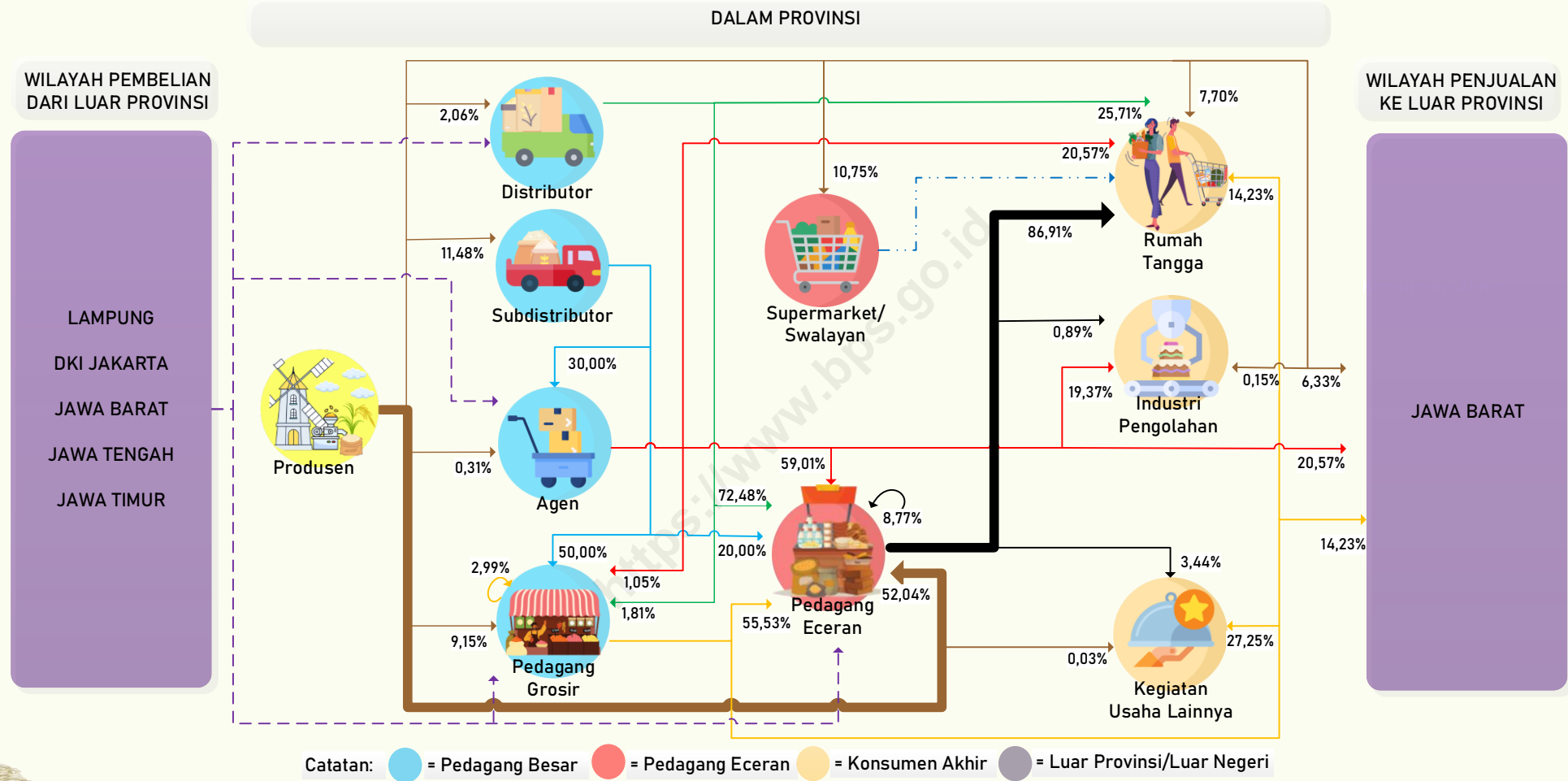


Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Banten pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, meskipun demikian **sebagian besar** kebutuhan konsumsi beras **masih dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS



Distribusi beras di Provinsi Banten dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, supermarket/swalayan, pedagang grosir, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Pedagang
Eceran
MPP= 7,51%



Konsumen
Akhir

Pola utama di Provinsi Banten memiliki **2 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **1 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
7,51%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

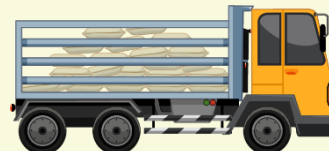
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Banten melakukan **pembelian** beras dari **5 provinsi lain** yaitu Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.



Provinsi Banten melakukan **penjualan** beras ke **1 provinsi lain** yaitu Jawa Barat.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Banten:

17,39%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

23,91%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

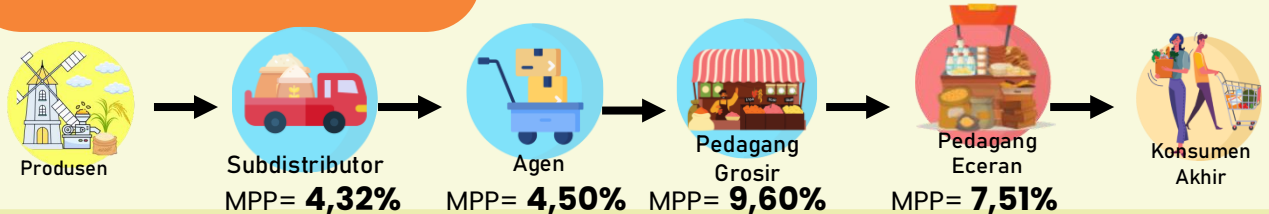
6,52%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

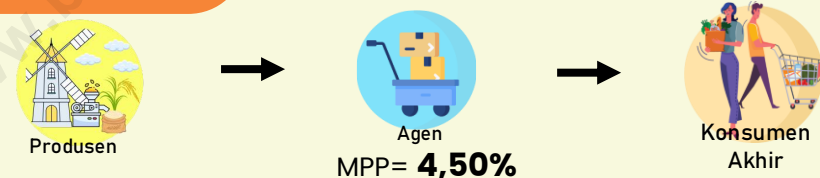
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Banten melalui **4 pedagang perantara** yakni Subdistributor, Agen, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **28,45%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Banten melalui **1 pedagang perantara** yakni Agen dengan **MPP_T** sebesar **4,50%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

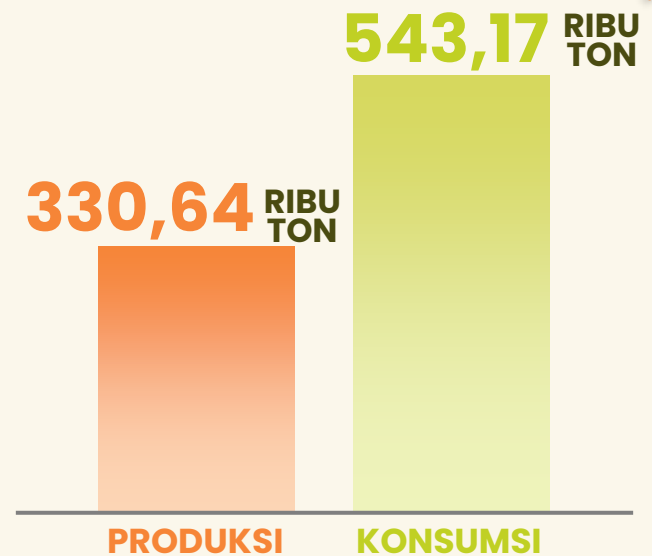
60,87%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

BALI



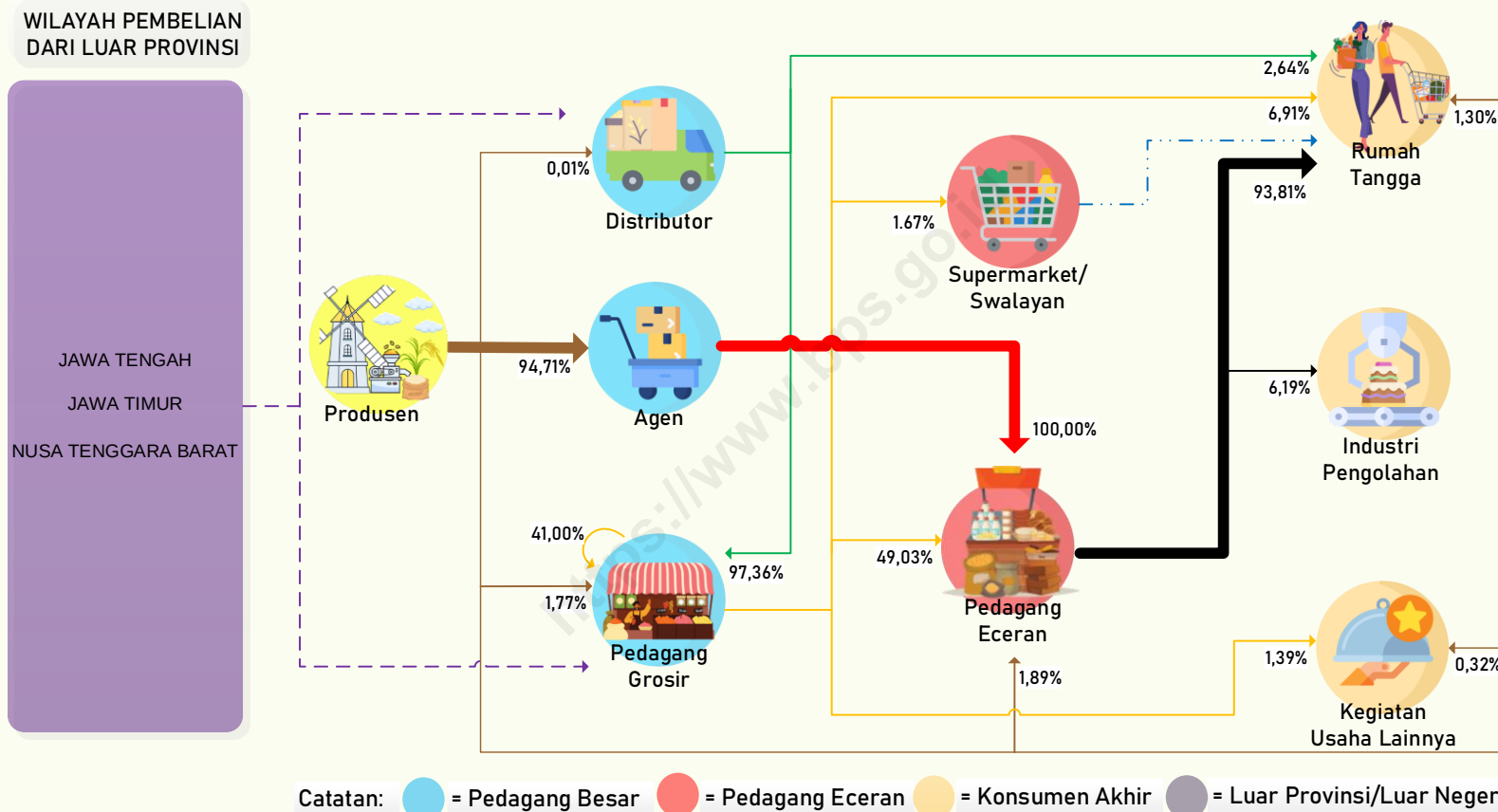
Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Bali pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, meskipun demikian **sebagian besar** kebutuhan konsumsi beras **masih dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI



Distribusi beras di Provinsi Bali dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **5 pedagang perantara**, yaitu distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Agen

MPP= **8,30%**



Pedagang
Eceran

MPP= **16,49%**



Konsumen
Akhir

Pola utama di Provinsi Bali memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
26,16%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

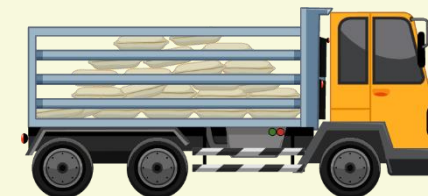
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Bali melakukan **pembelian** beras dari **3 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.



FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Bali:

6,90%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

34,48%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

10,34%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

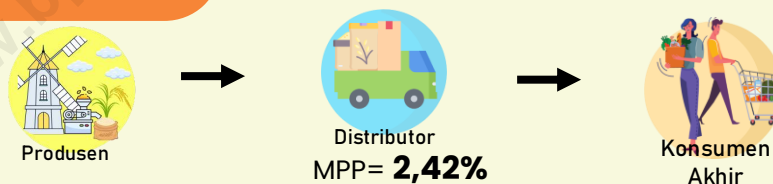
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Bali melalui **3 pedagang perantara** yakni Distributor, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **29,69%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Bali melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor dengan **MPP_T** sebesar **2,42%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

13,79%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT



958,13 RIBU TON



714,71 RIBU TON

PRODUKSI

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

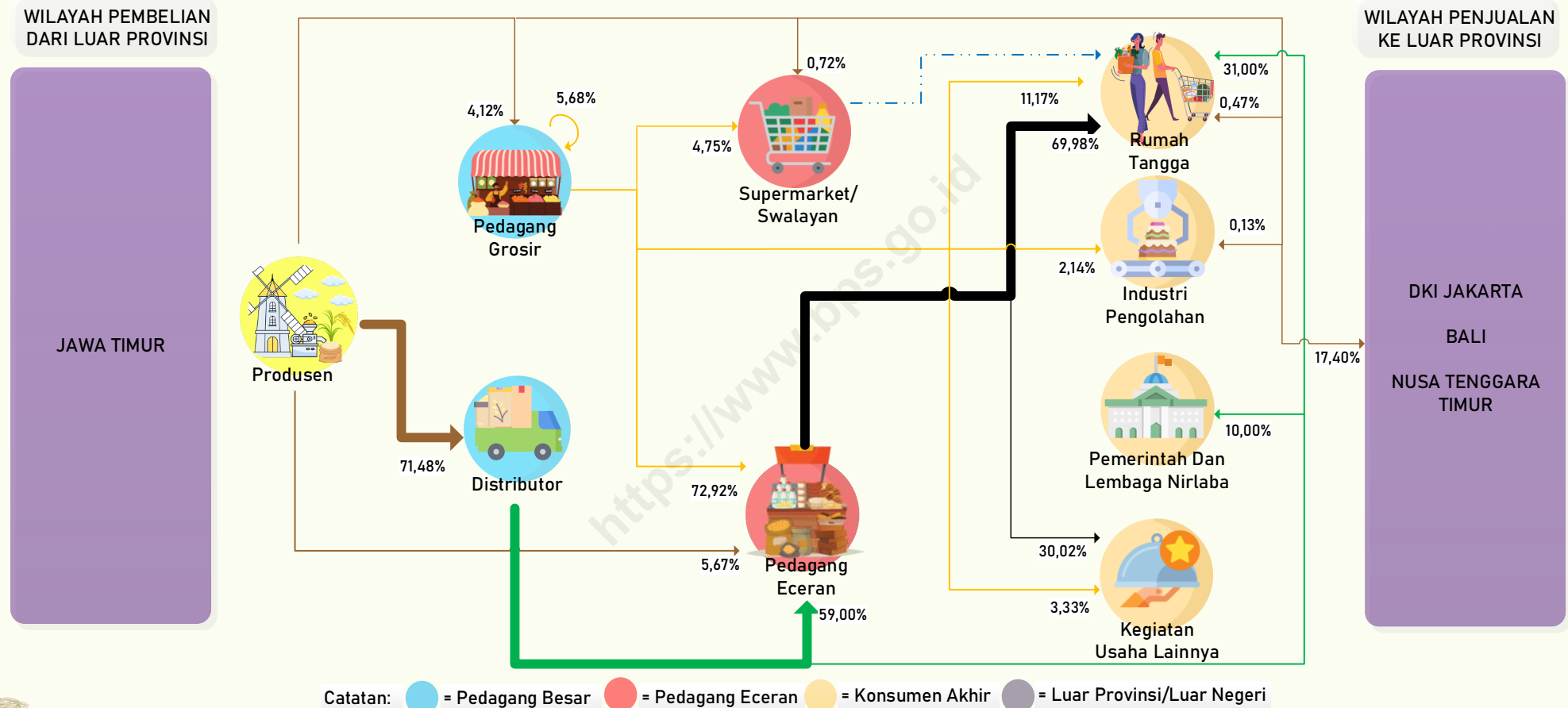


Produksi beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025 mengalami **SURPLUS**, sehingga kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI



Distribusi beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **4 pedagang perantara**, yaitu distributor, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Distributor

MPP= **20,00%**



Pedagang
Eceran

MPP= **5,82%**



Konsumen
Akhir

Pola utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
26,98%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

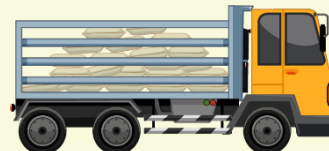
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan **pembelian** beras dari **1 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Timur.



Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan **penjualan** beras ke **3 provinsi lain** yaitu Provinsi DKI Jakarta, Bali dan Nusa Tenggara Timur.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat:

24,24%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

21,21%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

27,27%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Produsen



Distributor

MPP= **20,00%**



Pedagang
Eceran

MPP= **5,82%**



Konsumen
Akhir

Potensi pola terpanjang di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui **2 pedagang perantara** yakni Distributor dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **26,98%**.

POLA TERPENDEK



Produsen



Pedagang
Eceran

MPP= **5,82%**



Konsumen
Akhir

Potensi pola terpendek di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui **1 pedagang perantara** yakni Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **5,82%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

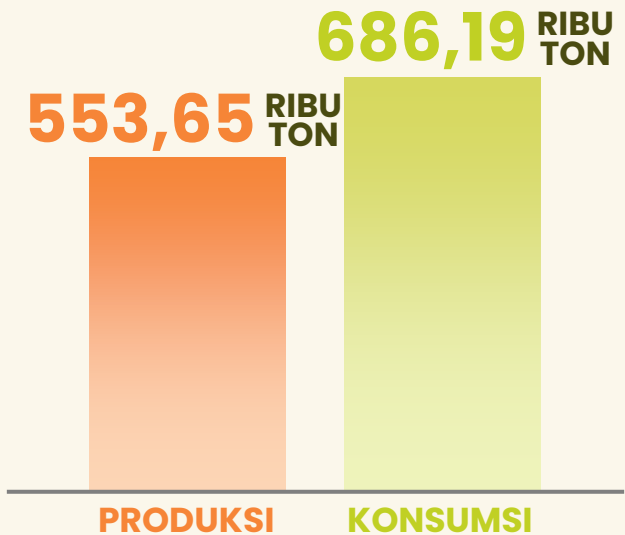
39,39%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR



Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

“**Produksi beras** di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, meskipun demikian **sebagian besar** kebutuhan konsumsi beras **masih dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**”

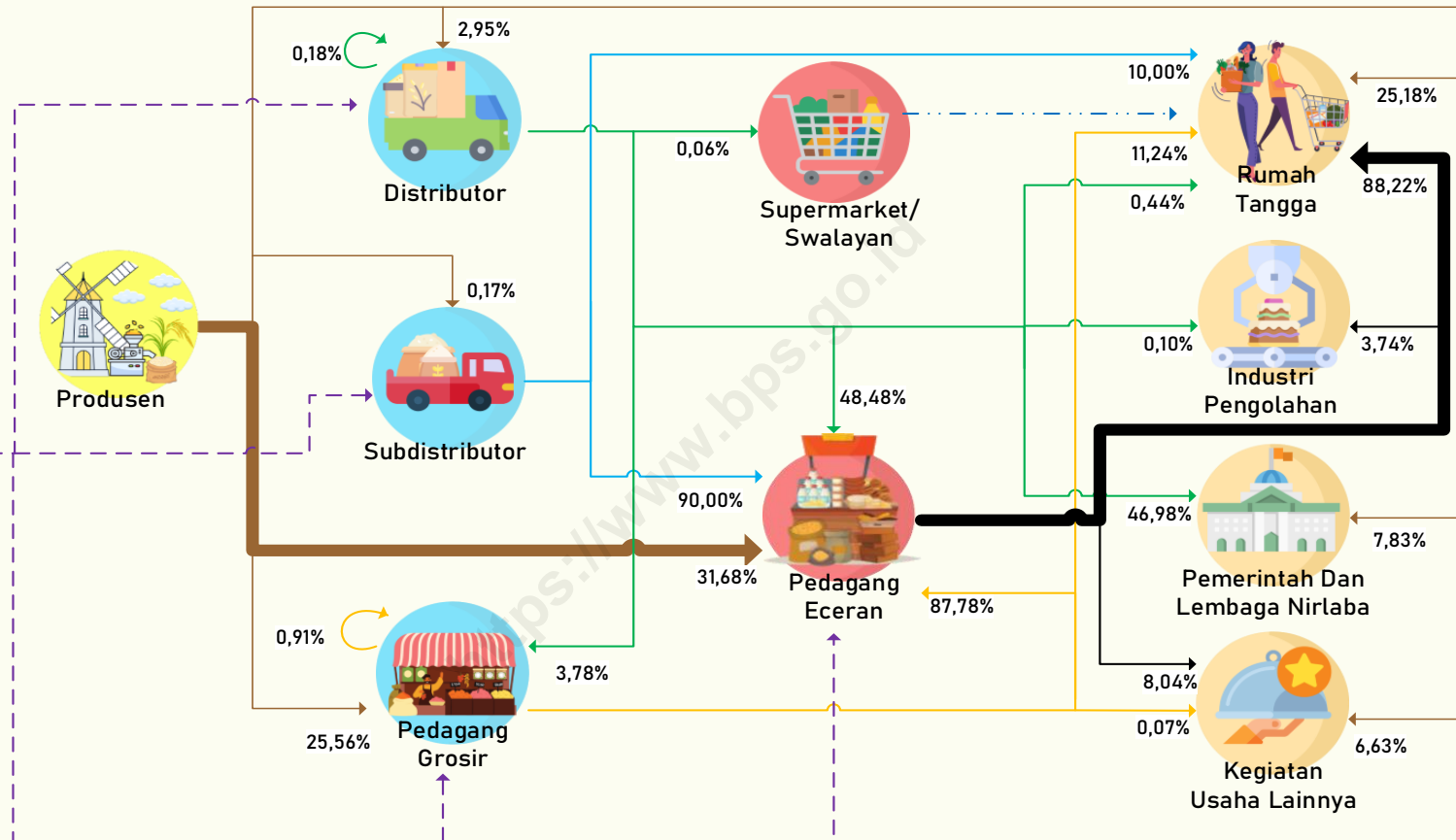


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
NUSA TENGGARA
BARAT
SULAWESI SELATAN



Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **5 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Pedagang Eceran

MPP= **18,46%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki **2 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **1 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
18,46%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

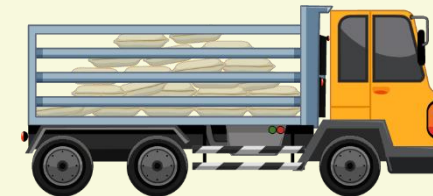
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan **pembelian** beras dari **4 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tiimur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.



FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur:

12,50%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

28,13%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

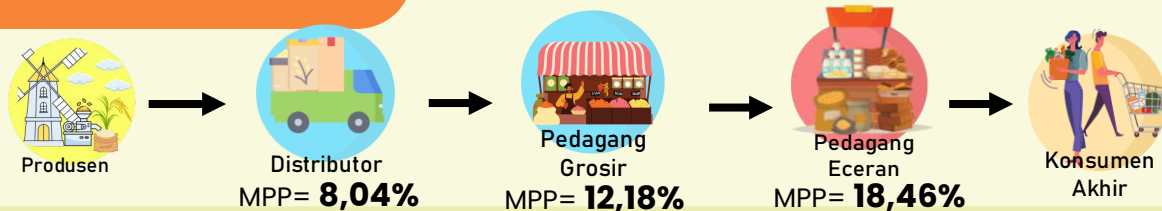
3,13%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

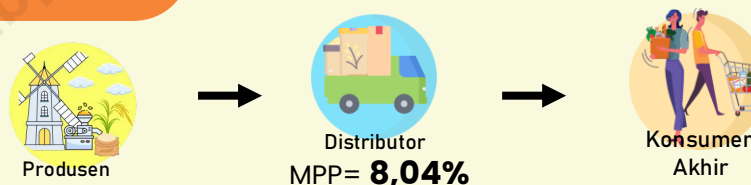
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui **3 pedagang perantara** yakni Distributor, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan MPP_T sebesar **43,57%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor dengan MPP_T sebesar **8,04%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

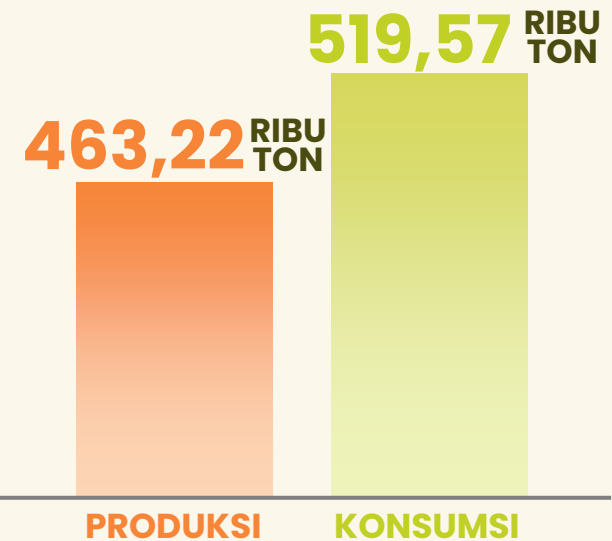
25,00%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

KALIMANTAN BARAT



Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, meskipun demikian **sebagian besar** kebutuhan konsumsi beras **masih dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**

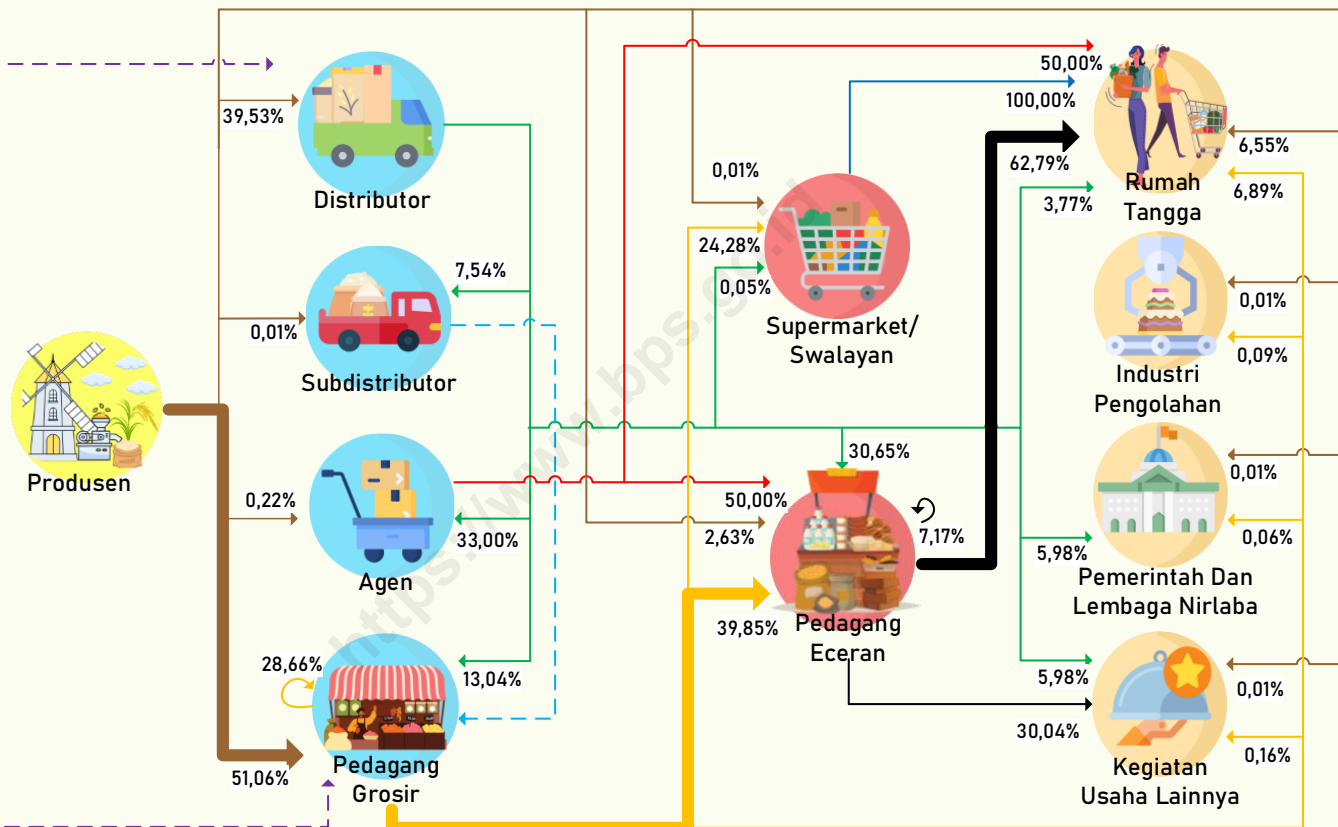


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

DKI JAKARTA
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
SULAWESI SELATAN



Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Kalimantan Barat dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Pedagang
Grosir
MPP= **5,35%**



Pedagang
Eceran
MPP= **12,17%**



Konsumen
Akhir

Pola utama di Provinsi Kalimantan Barat memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
18,17%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

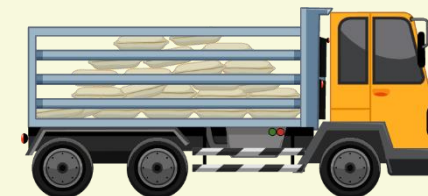
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Kalimantan Barat melakukan **pembelian** beras dari **5 provinsi lain** yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan.



FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Kalimantan Barat:

32,00%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

32,00%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

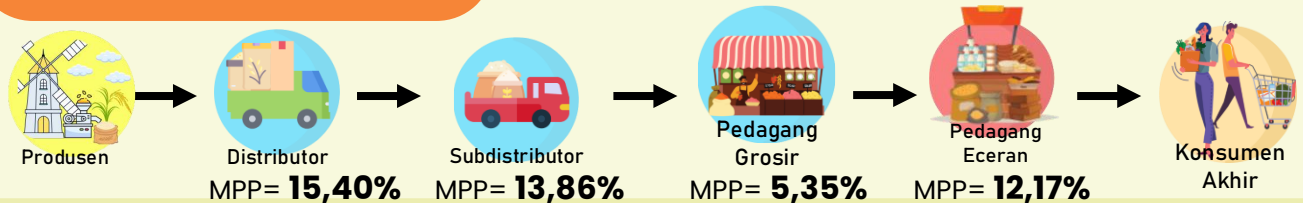
18,00%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

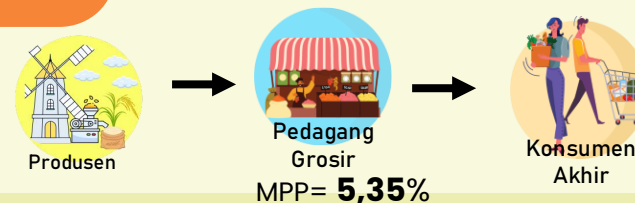
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat melalui **4 pedagang perantara** yakni Distributor, Subdistributor, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **55,27%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Kalimantan Barat melalui **1 pedagang perantara** yakni Pedagang Grosir dengan **MPP_T** sebesar **5,35%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

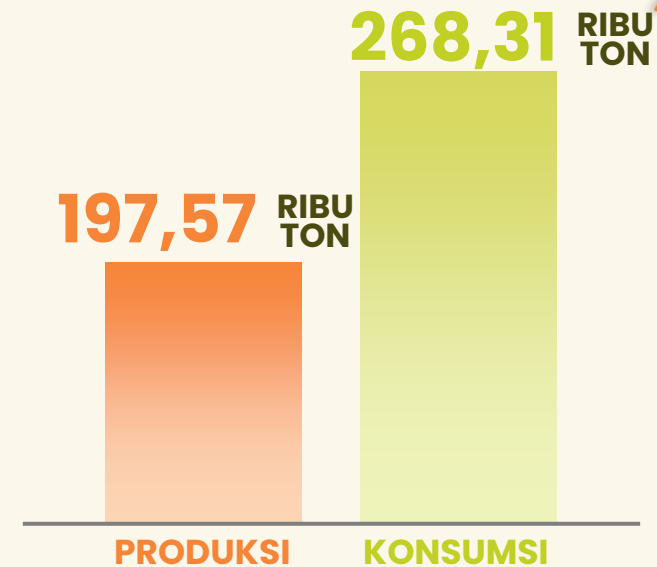
52,00%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH



Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, meskipun demikian **sebagian besar** kebutuhan konsumsi beras **masih dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**

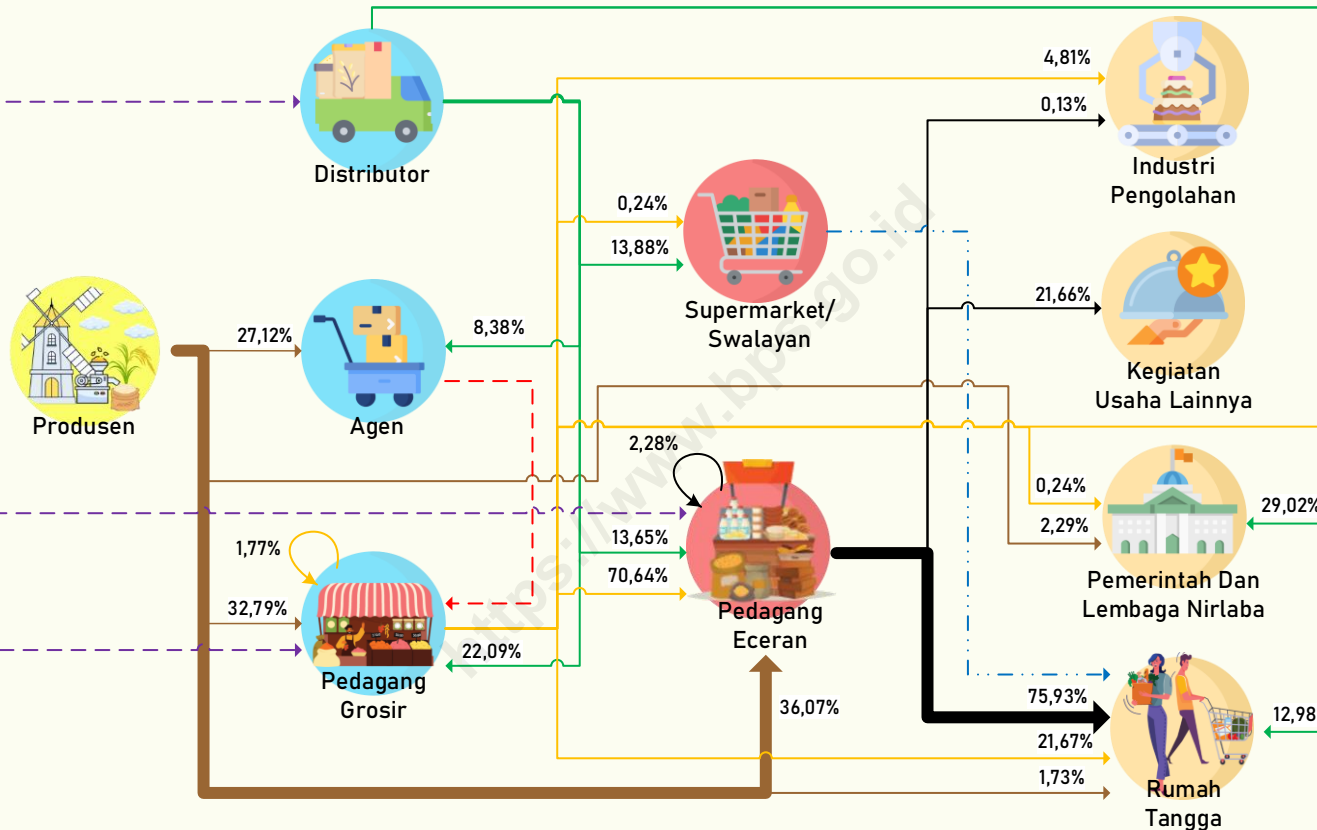


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
KALIMANTAN
SELATAN



WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI

KALIMANTAN
SELATAN

Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Kalimantan Tengah dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **5 pedagang perantara**, yaitu distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Pedagang Eceran
MPP = **7,92%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki **2 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **1 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
7,92%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

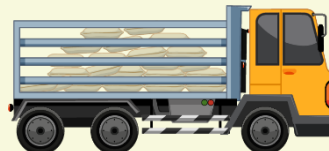
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Kalimantan Tengah melakukan **pembelian** beras dari **3 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.



Provinsi Kalimantan Tengah melakukan **penjualan** beras ke **1 provinsi lain** yaitu Provinsi Kalimantan Selatan.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Kalimantan Tengah:

6,25%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

9,38%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

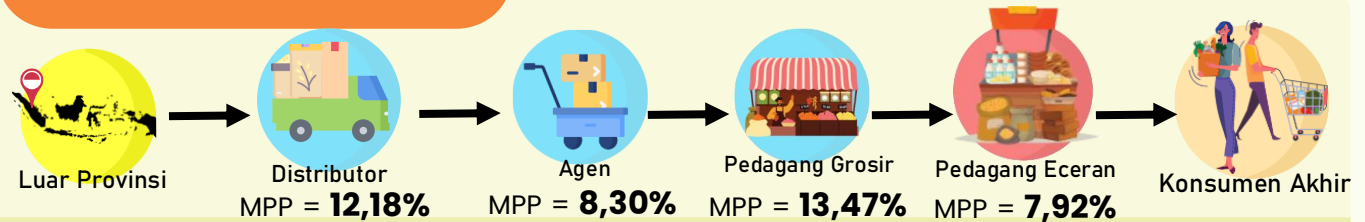
12,50%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Kalimantan Tengah melalui **4 pedagang perantara** yakni Distributor, Agen, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **48,77%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Kalimantan Tengah melalui **1 pedagang perantara** yakni Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **7,15%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

53,13%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN



681,22 RIBU
TON

449,36 RIBU
TON

PRODUKSI

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)



Produksi beras di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 mengalami **SURPLUS**, sehingga kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**

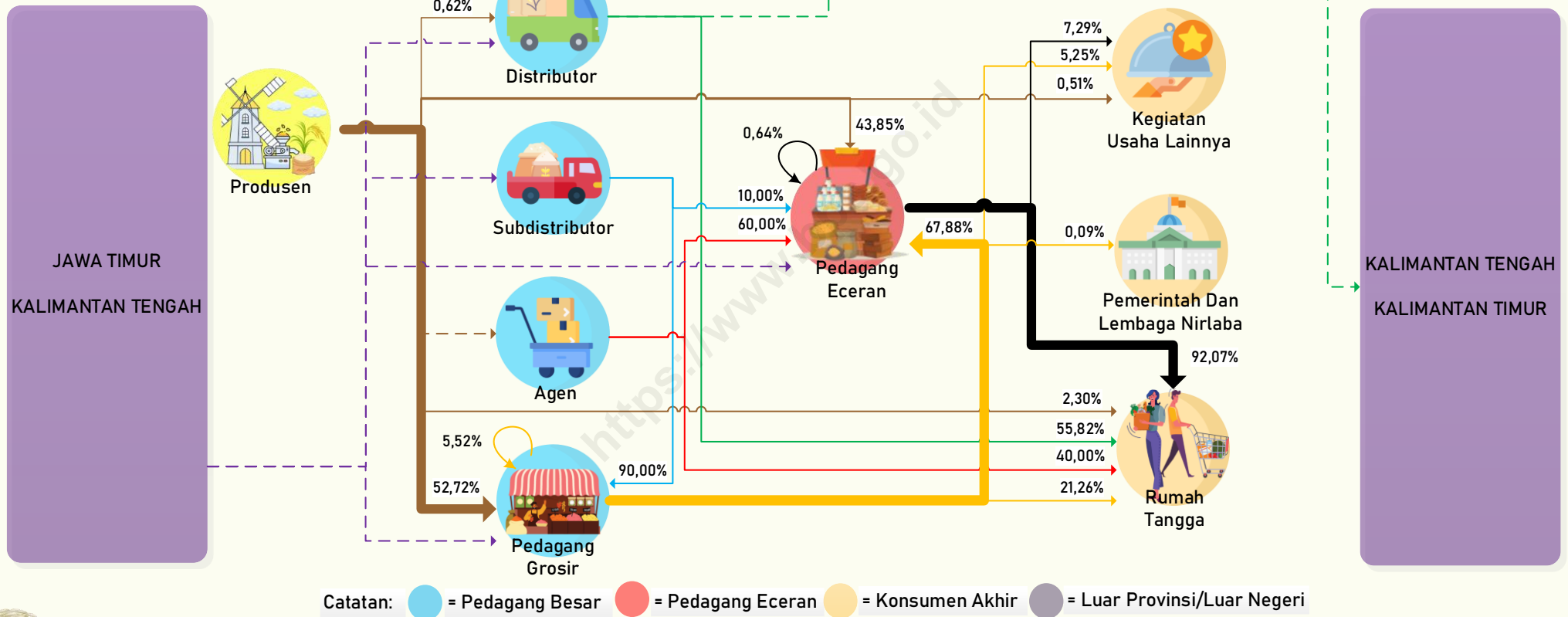


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI



Distribusi beras di Provinsi Kalimantan Selatan dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **5 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Pedagang Grosir
MPP = **7,07%**



Pedagang Eceran
MPP = **15,40%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
23,56%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

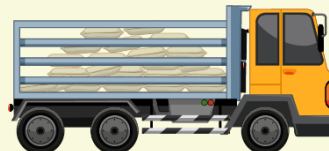
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Kalimantan Selatan melakukan **pembelian** beras dari **2 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Tengah.



Provinsi Kalimantan Selatan melakukan **penjualan** beras ke **2 provinsi lain** yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Kalimantan Selatan:

18,18%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

22,73%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

4,55%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Kalimantan Selatan melalui **3 pedagang perantara** yakni Subdistributor, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **37,56%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Kalimantan Selatan melalui **1 pedagang perantara** yakni Pedagang Grosir dengan **MPP_T** sebesar **7,07%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

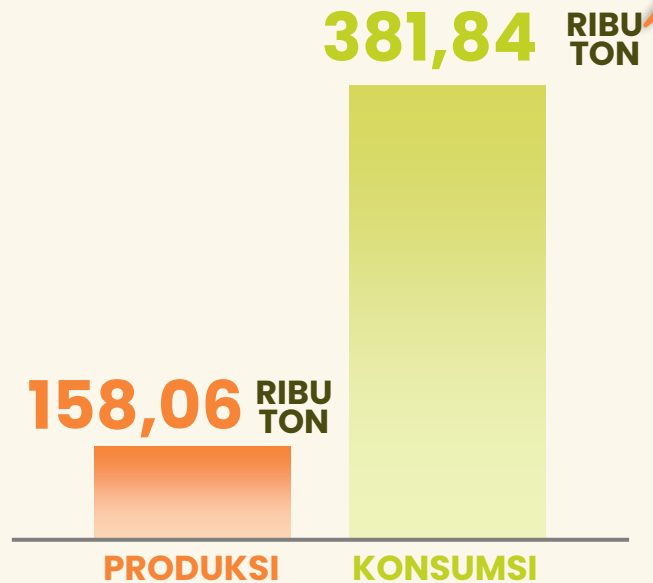
43,18%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR



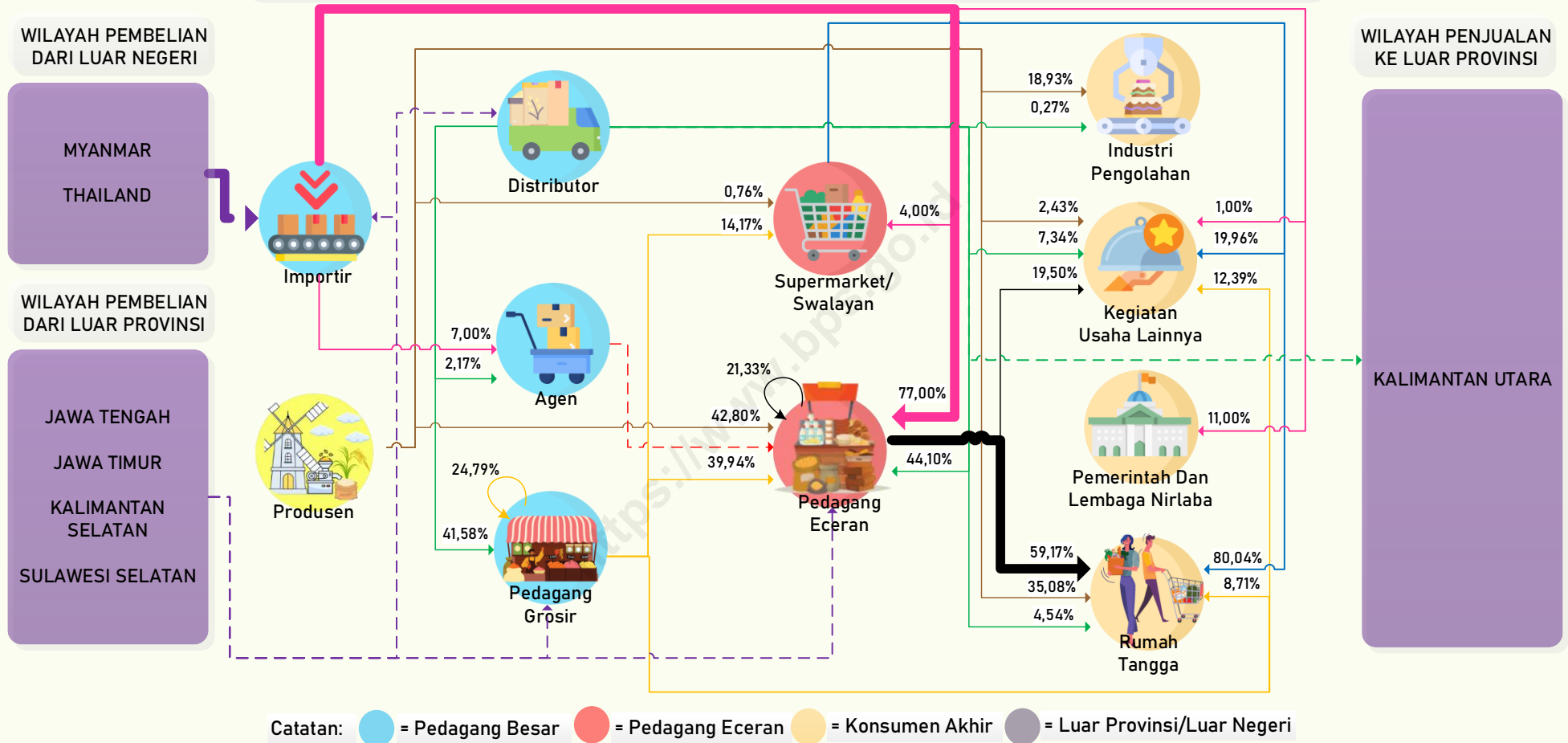
Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, hanya **sebagian kecil** kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI



Distribusi beras di Provinsi Kalimantan Timur dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 pedagang perantara**, yaitu importir, distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Luar Provinsi



Importir
MPP = **10,34%**



Pedagang Eceran
MPP = **11,02%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Kalimantan Timur memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
22,50%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Kalimantan Timur melakukan **pembelian** beras dari **2 negara lain** yaitu Myanmar dan Thailand, serta dari **4 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan



Provinsi Kalimantan Timur melakukan **penjualan** beras ke **1 provinsi lain** yaitu Provinsi Kalimantan Utara

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Kalimantan Timur:

15,15%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

12,12%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

3,03%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Kalimantan Timur melalui **3 pedagang perantara** yakni Distributor, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **40,66%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Kalimantan Timur melalui **1 pedagang perantara** yakni Supermarket/Swalayan dengan **MPP_T** sebesar **4,64%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

30,30%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

KALIMANTAN UTARA



64,18 RIBU TON

22,89 RIBU TON

PRODUKSI

KONSUMSI

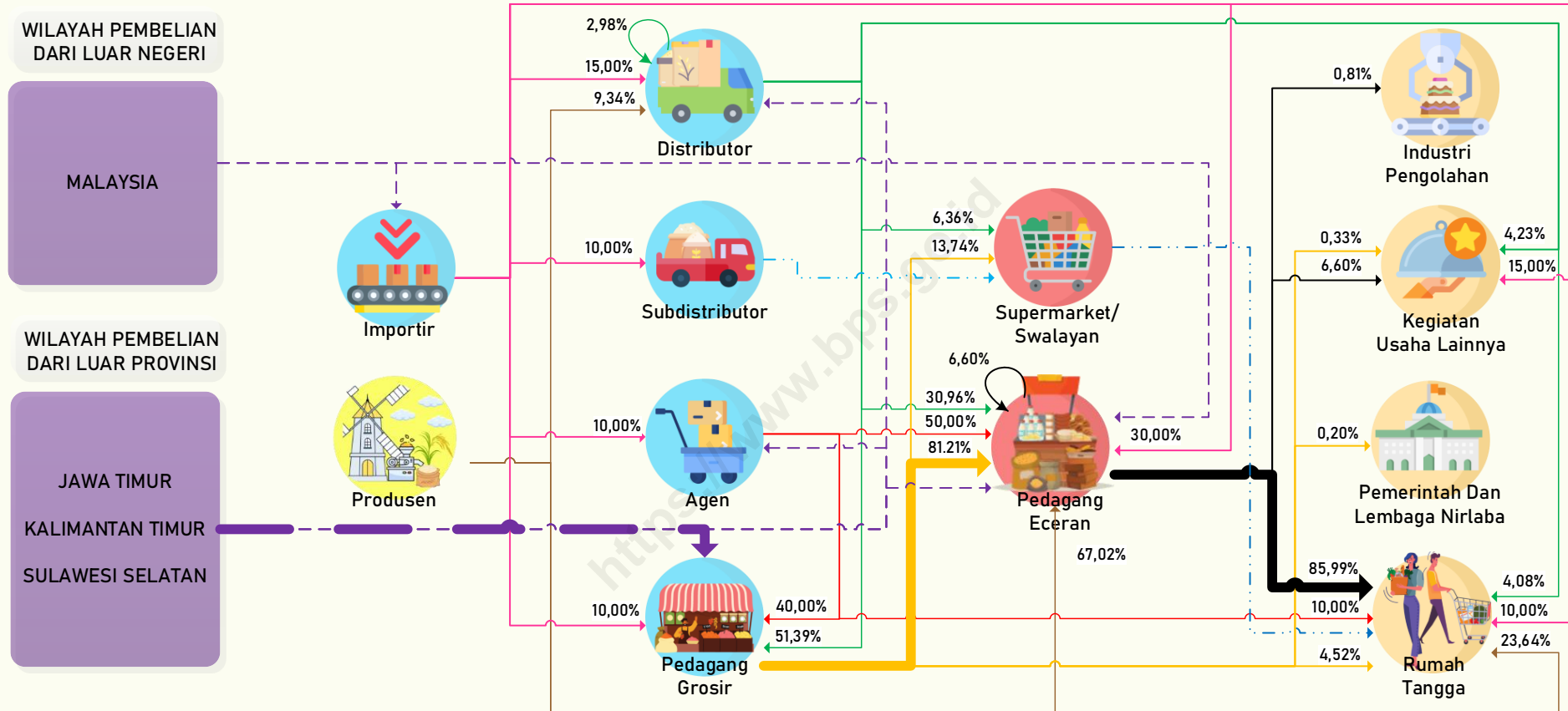
Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, hanya **sebagian kecil** kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI



Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Kalimantan Utara dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **7 pedagang perantara**, yaitu importir, distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Luar Provinsi



Pedagang Grosir
MPP = **9,83%**



Pedagang Eceran
MPP = **9,55%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Kalimantan Utara memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
20,32%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

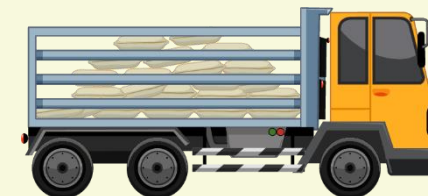
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Kalimantan Utara melakukan **pembelian** beras dari **1 negara lain** yaitu Malaysia, serta **3 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.



FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Kalimantan Utara:

31,58%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

7,89%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

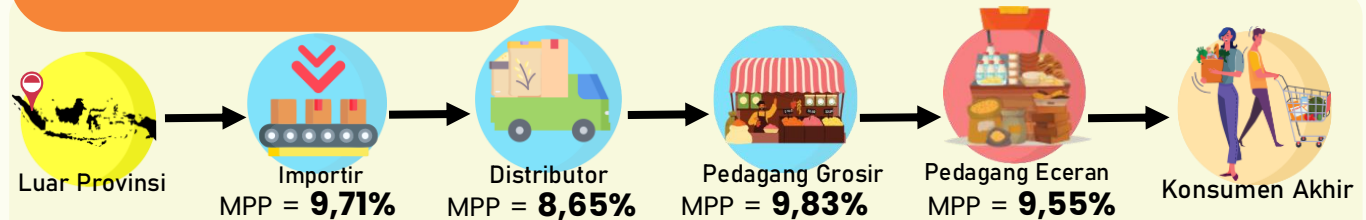
15,79%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

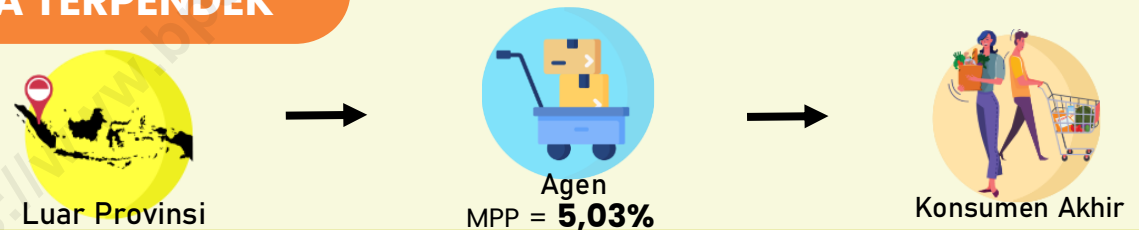
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Kalimantan Utara melalui **4 pedagang perantara** yakni Importir, Distributor, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **43,42%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Kalimantan Utara melalui **1 pedagang perantara** yakni Agen dengan **MPP_T** sebesar **5,03%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

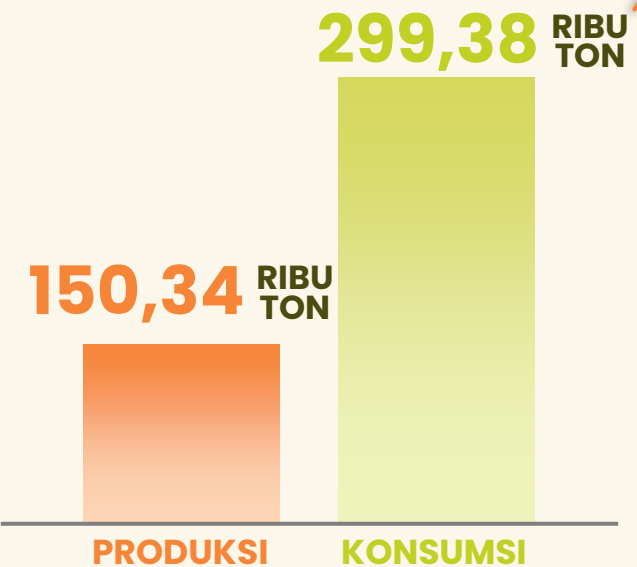
50,00%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

SULAWESI UTARA



Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, meskipun demikian **sebagian besar** kebutuhan konsumsi beras **masih dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

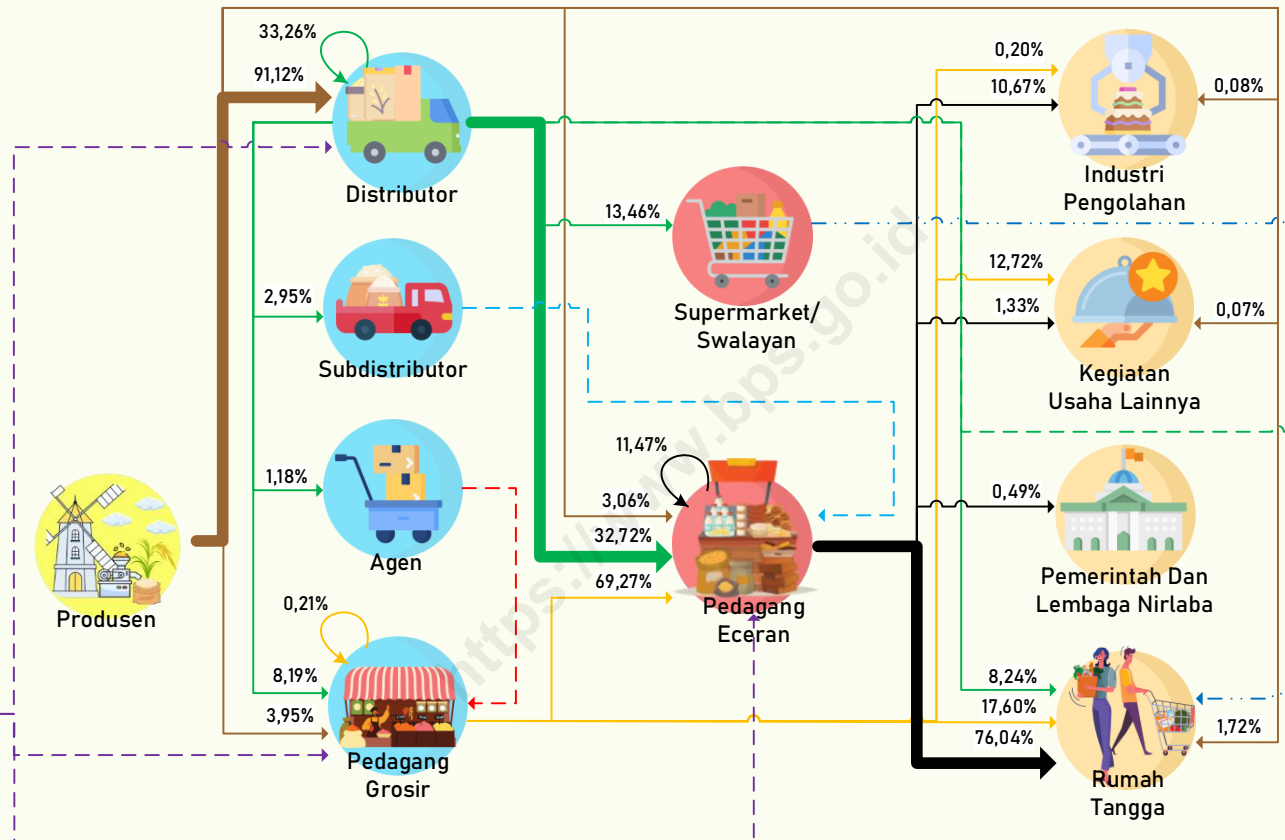
DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
GORONTALO

WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI

GORONTALO
MALUKU UTARA



Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Sulawesi Utara dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Distributor
MPP = 7,24%



Pedagang Eceran
MPP = 7,23%



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Sulawesi Utara memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
14,99%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

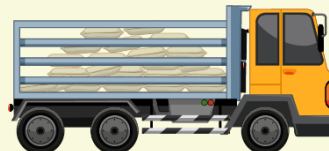
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Sulawesi Utara melakukan **pembelian** beras dari **3 provinsi lain** yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.



Provinsi Sulawesi Utara melakukan **penjualan** beras ke **2 provinsi lain** yaitu Provinsi Gorontalo dan Maluku Utara.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Sulawesi Utara:

26,83%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

14,63%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

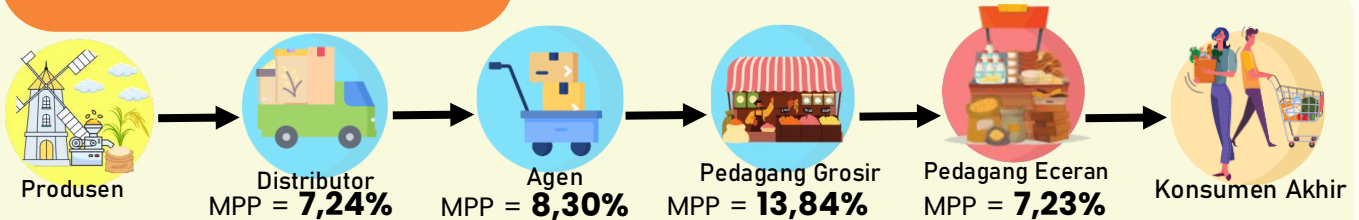
4,88%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sulawesi Utara melalui **4 pedagang perantara** yakni Distributor, Agen, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **41,77%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Sulawesi Utara melalui **1 pedagang perantara** yakni Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **7,23%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

26,83%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

SULAWESI TENGAH



528,38 RIBU TON

372,10 RIBU TON

PRODUKSI

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 mengalami **SURPLUS**, sehingga kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**

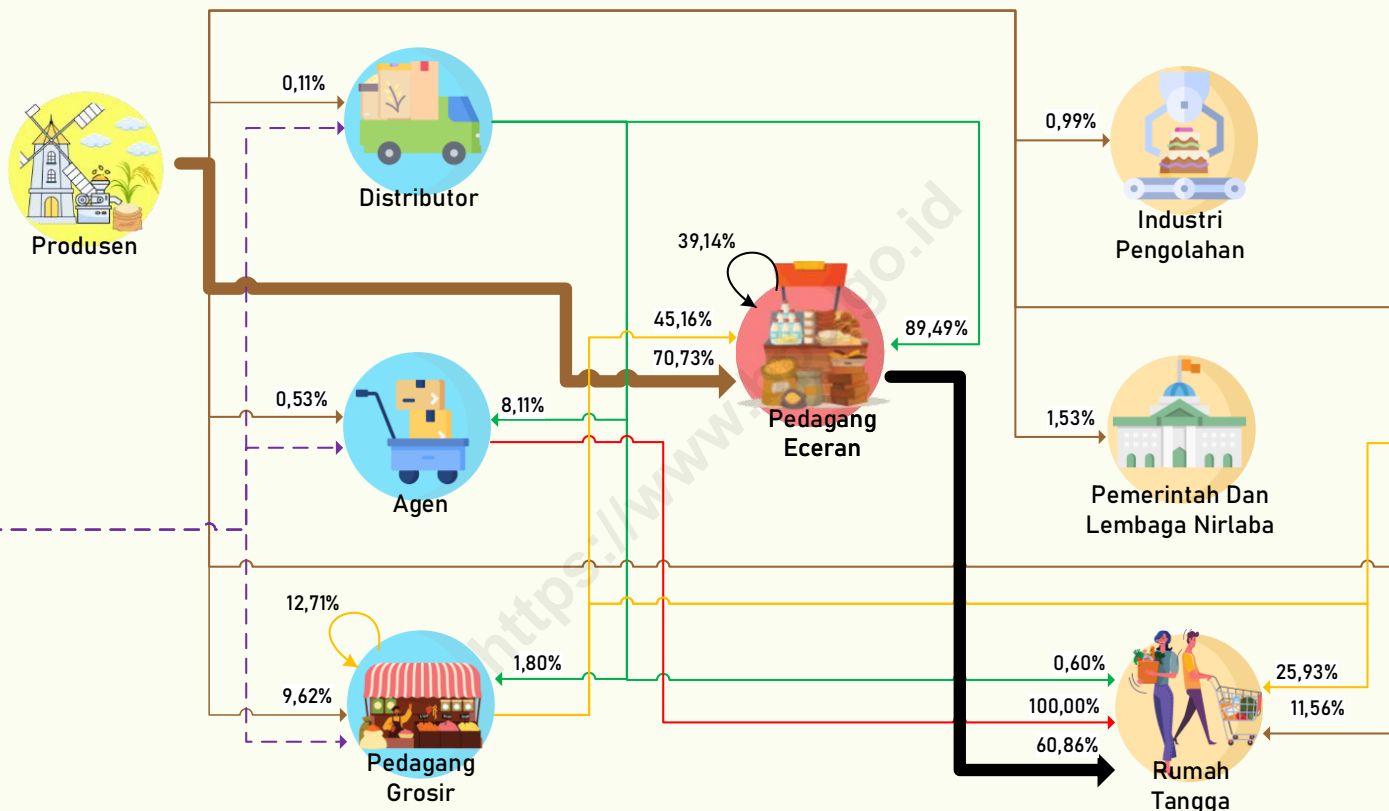


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

JAWA TIMUR
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI BARAT



WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI

SULAWESI UTARA
GORONTALO

Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Sulawesi Tengah dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **4 pedagang perantara**, yaitu distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Pedagang Eceran
MPP = **7,37%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki **2 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **1 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
7,37%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

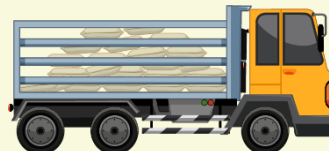
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Sulawesi Tengah melakukan **pembelian** beras dari **4 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.



Provinsi Sulawesi Tengah melakukan **penjualan** beras ke **2 provinsi lain** yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Sulawesi Tengah:

32,50%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

17,50%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.



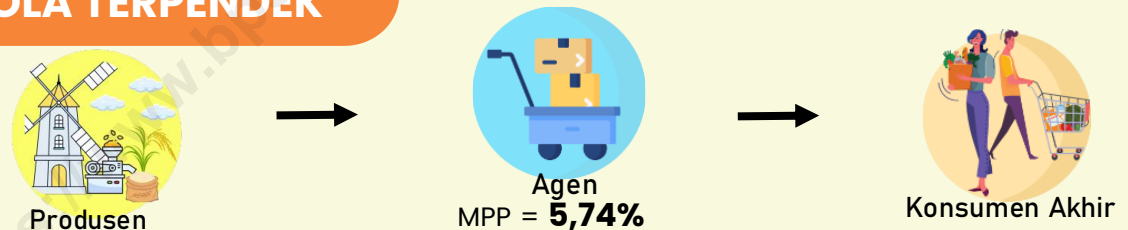
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sulawesi Tengah melalui **3 pedagang perantara** yakni Distributor, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **33,51%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Sulawesi Tengah melalui **1 pedagang perantara** yakni Agen dengan **MPP_T** sebesar **5,74%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

42,50%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

SULAWESI SELATAN



3.108,80 RIBU TON



1.017,10 RIBU TON

PRODUKSI

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 mengalami **SURPLUS**, sehingga kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**

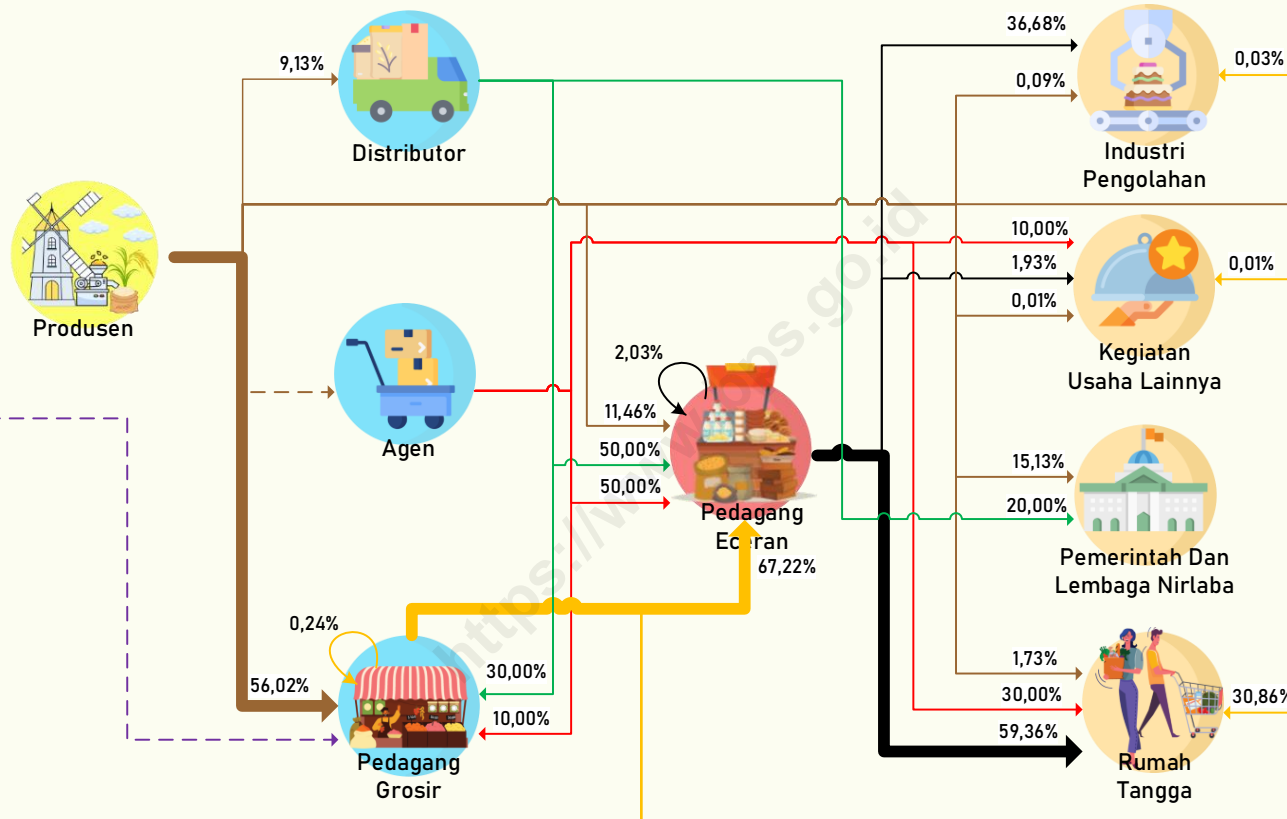


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

JAWA TENGAH
SULAWESI BARAT



WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI

NUSA TENGGARA
TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA BARAT
PAPUA BARAT DAYA
PAPUA

Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Sulawesi Selatan dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **4 pedagang perantara**, yaitu distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Pedagang Grosir
MPP = **4,86%**



Pedagang Eceran
MPP = **13,05%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
18,54%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Sulawesi Selatan melakukan **pembelian** beras dari **2 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Barat.



Provinsi Sulawesi Selatan melakukan **penjualan** beras ke **14 provinsi lain** yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Sulawesi Selatan:

9,59%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

5,48%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

2,74%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sulawesi Selatan melalui **3 pedagang perantara** yakni Agan, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **32,09%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Sulawesi Selatan melalui **1 pedagang perantara** yakni Pedagang Grosir dengan **MPP_T** sebesar **4,86%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

13,70%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

SULAWESI TENGGARA



379,05 RIBU
TON



314,84 RIBU
TON



PRODUKSI

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)



Produksi beras di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2025 mengalami **SURPLUS**, sehingga kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**

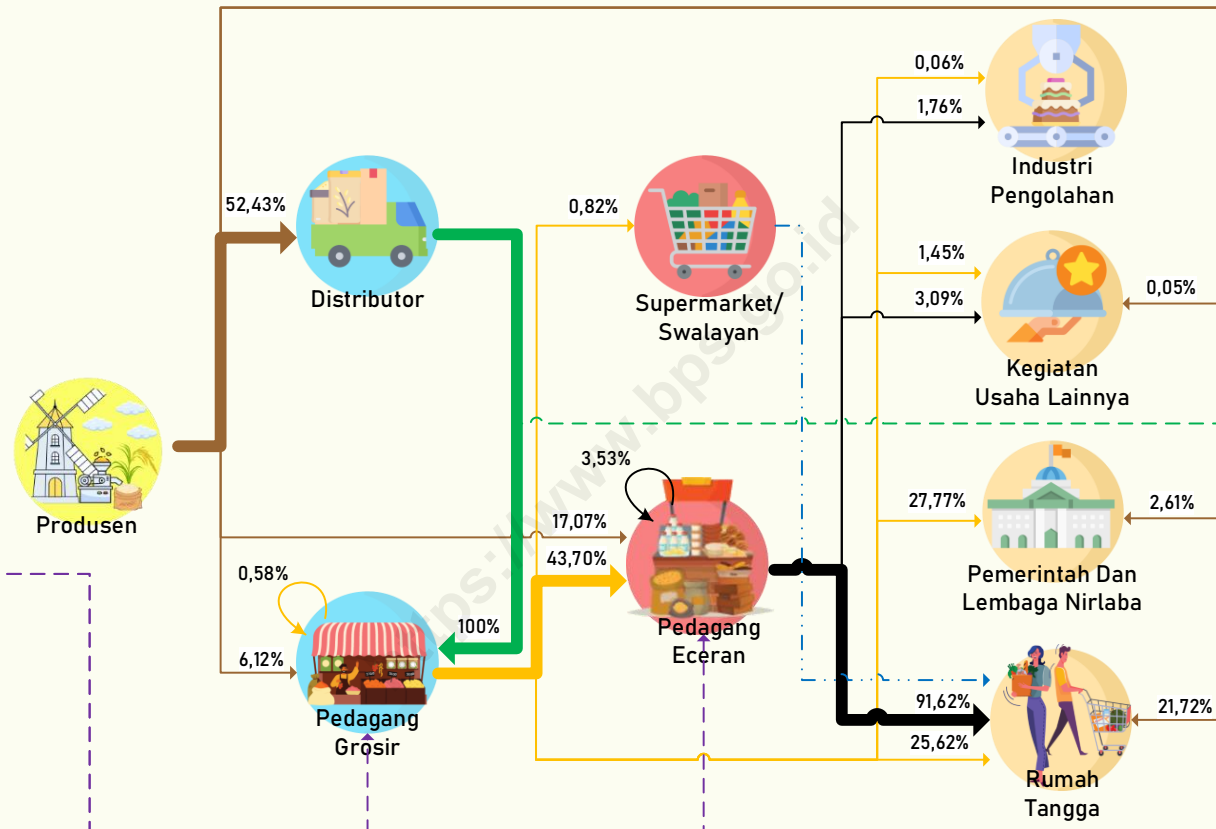


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

SULAWESI SELATAN



WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI

SULAWESI TENGAH

Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Sulawesi Tenggara dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **4 pedagang perantara**, yaitu distributor, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Distributor
MPP = **8,57%**



Pedagang Grosir
MPP = **8,65%**



Pedagang Eceran
MPP = **7,62%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki **4 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **3 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
26,95%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan **pembelian** beras dari **1 provinsi lain** yaitu Provinsi Sulawesi Selatan.



Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan **penjualan** beras ke **1 provinsi lain** yaitu Provinsi Sulawesi Tengah.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Sulawesi Tenggara:

19,57%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

13,04%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

4,35%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui **3 pedagang perantara** yakni Distributor, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **26,95%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui **1 pedagang perantara** yakni Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **7,62%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

21,74%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

GORONTALO



153,77 RIBU TON



PRODUKSI

144,70 RIBU TON



KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)



Produksi beras di Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 mengalami **SURPLUS**, sehingga kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**

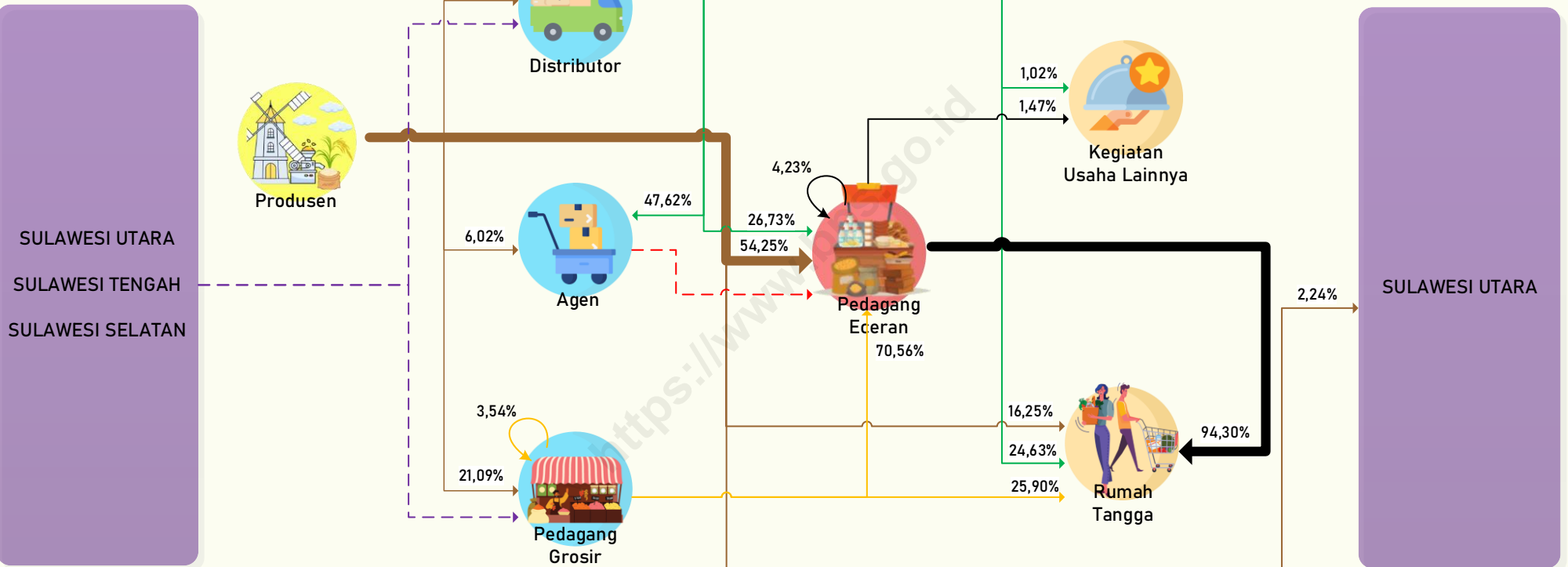


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI



Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Gorontalo dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **4 pedagang perantara**, yaitu distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Pedagang Eceran
MPP = **12,05%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Gorontalo memiliki **2 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **1 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
12,05%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

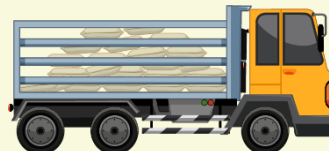
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Gorontalo melakukan **pembelian** beras dari **3 provinsi lain** yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan.



Provinsi Gorontalo melakukan **penjualan** beras ke **1 provinsi lain** yaitu Provinsi Sulawesi Utara.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Sulawesi Tengah:

11,63%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

32,56%

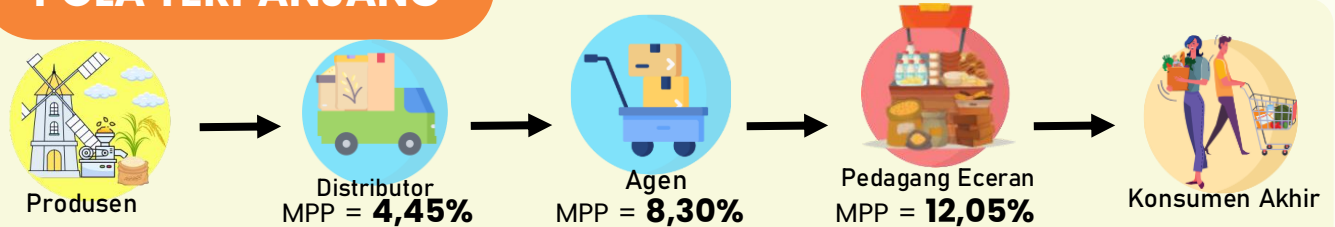
Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.



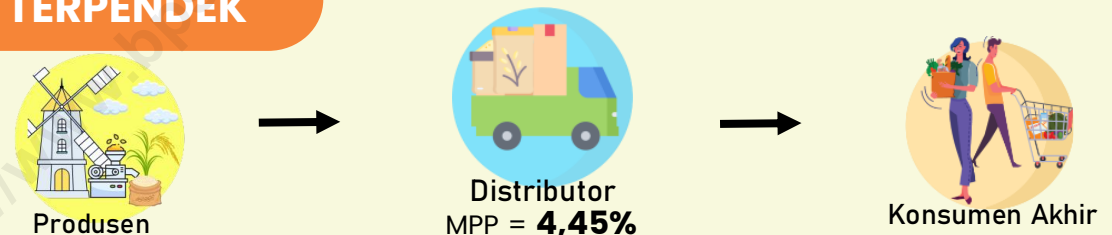
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Gorontalo melalui **3 pedagang perantara** yakni Distributor, Agen, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **26,75%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Gorontalo melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor dengan **MPP_T** sebesar **4,45%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

9,30%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau online.



PROVINSI

SULAWESI BARAT



210,92 RIBU TON

178,13 RIBU TON

PRODUKSI

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2025 mengalami **SURPLUS**, sehingga kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



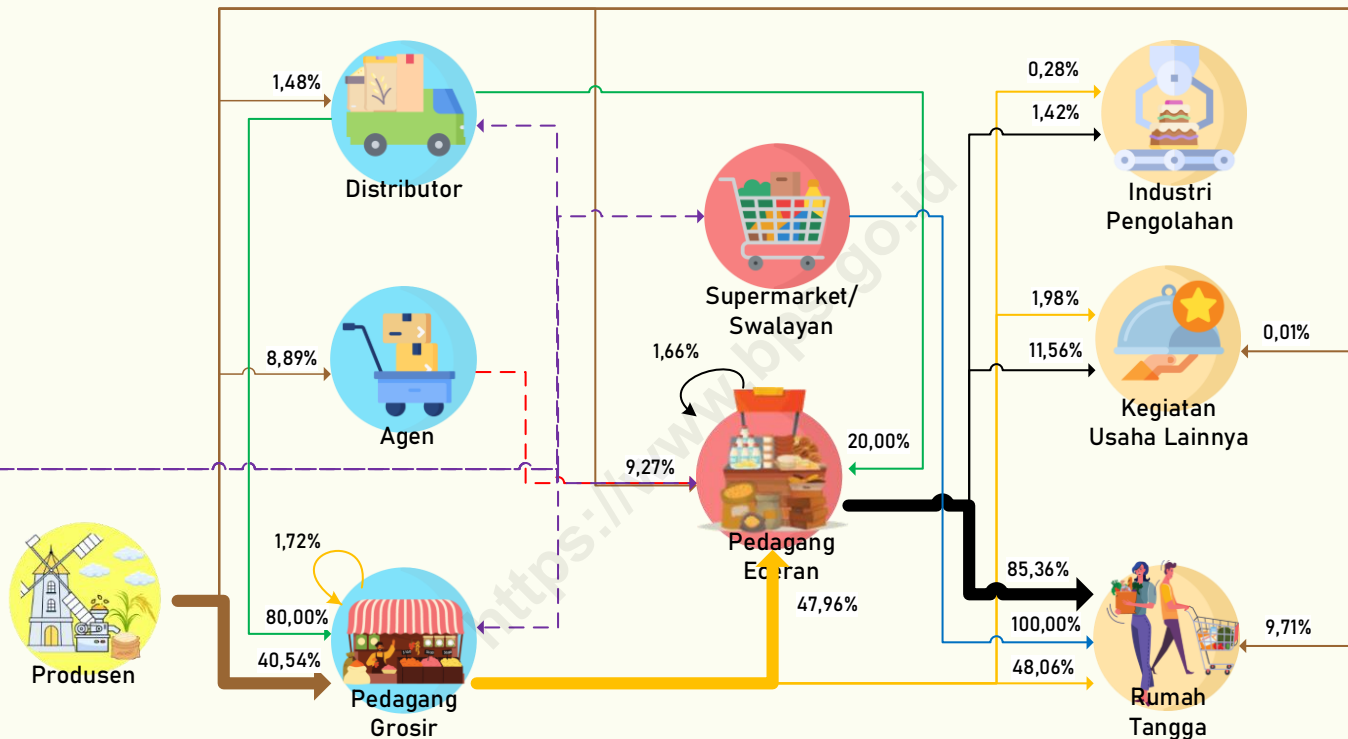
POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI

SULAWESI SELATAN



Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Sulawesi Barat dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **5 pedagang perantara**, yaitu distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Pedagang Grosir
MPP = **12,36%**



Pedagang Eceran
MPP = **7,71%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Sulawesi Barat memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
21,02%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

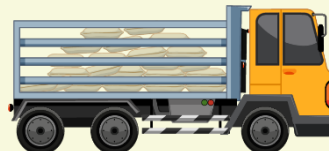
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Sulawesi Barat melakukan **pembelian** beras dari **1 provinsi lain** yaitu Provinsi Sulawesi Selatan.



Provinsi Sulawesi Barat melakukan **penjualan** beras ke **2 provinsi lain** yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Sulawesi Barat:

24,39%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

7,32%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.



POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sulawesi Barat melalui **3 pedagang perantara** yakni Distributor, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **33,13%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Sulawesi Barat melalui **1 pedagang perantara** yakni Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **7,71%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

26,83%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

MALUKU



55,42^{RIBU}
TON

PRODUKSI

224,58^{RIBU}
TON

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

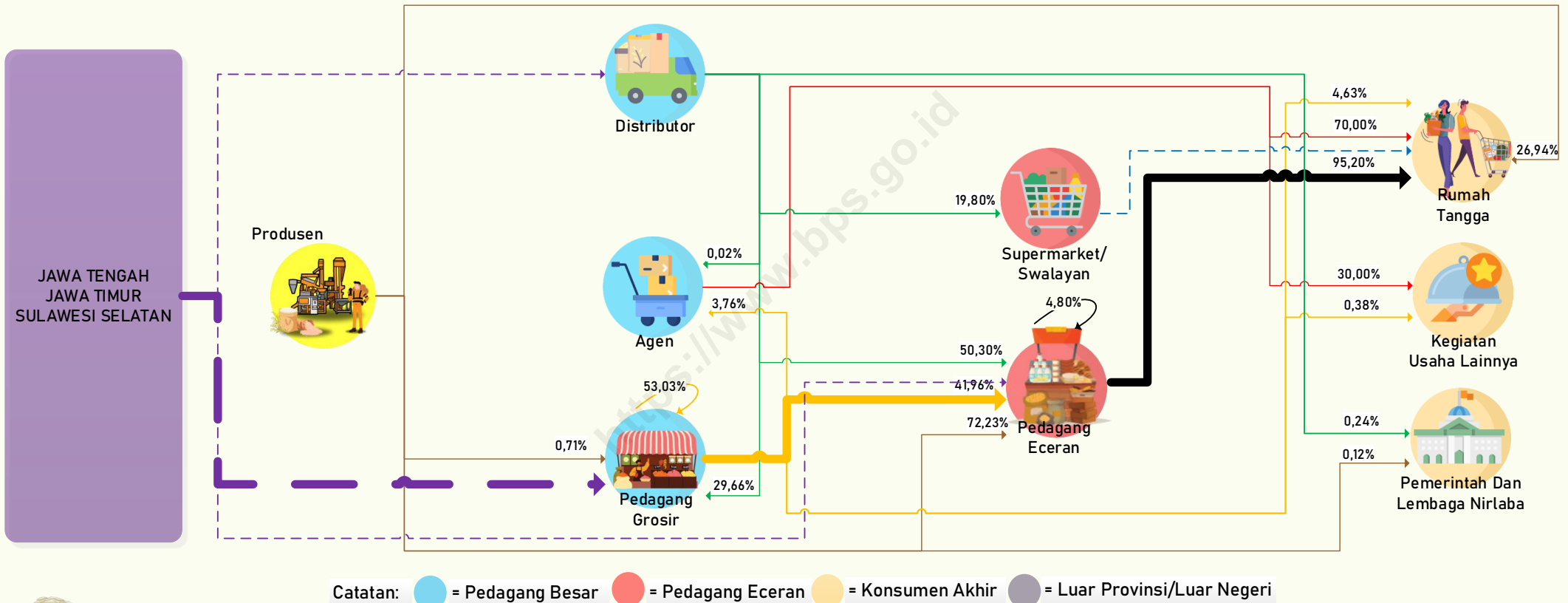
Produksi beras di Provinsi Maluku pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, sehingga hanya **sebagian kecil** kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI



Distribusi beras di Provinsi Maluku dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **5 pedagang perantara**, yaitu distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Luar Provinsi



Pedagang
Grosir
MPP = **12,96%**



Pedagang Eceran
MPP = **9,01%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Maluku memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
23,14%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

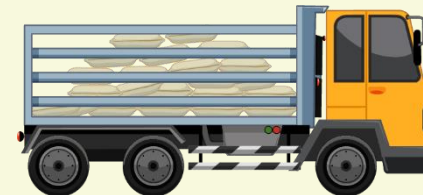
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Maluku melakukan **pembelian** beras dari **3 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.



FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Maluku :

6,25%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

15,63%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.



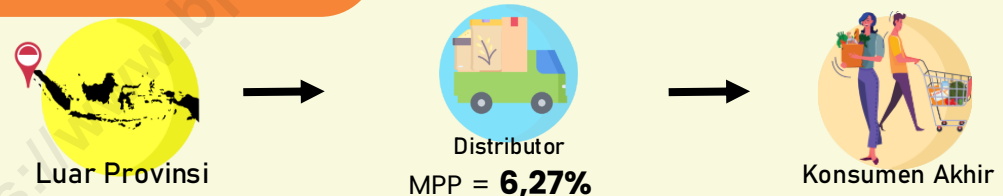
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Maluku melalui **3 pedagang perantara** yakni Distributor, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **30,86%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Maluku melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor dengan **MPP_T** sebesar **6,27%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

18,75%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau online.



PROVINSI

MALUKU UTARA



12,35^{RIBU}
TON

PRODUKSI

131,18^{RIBU}
TON

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

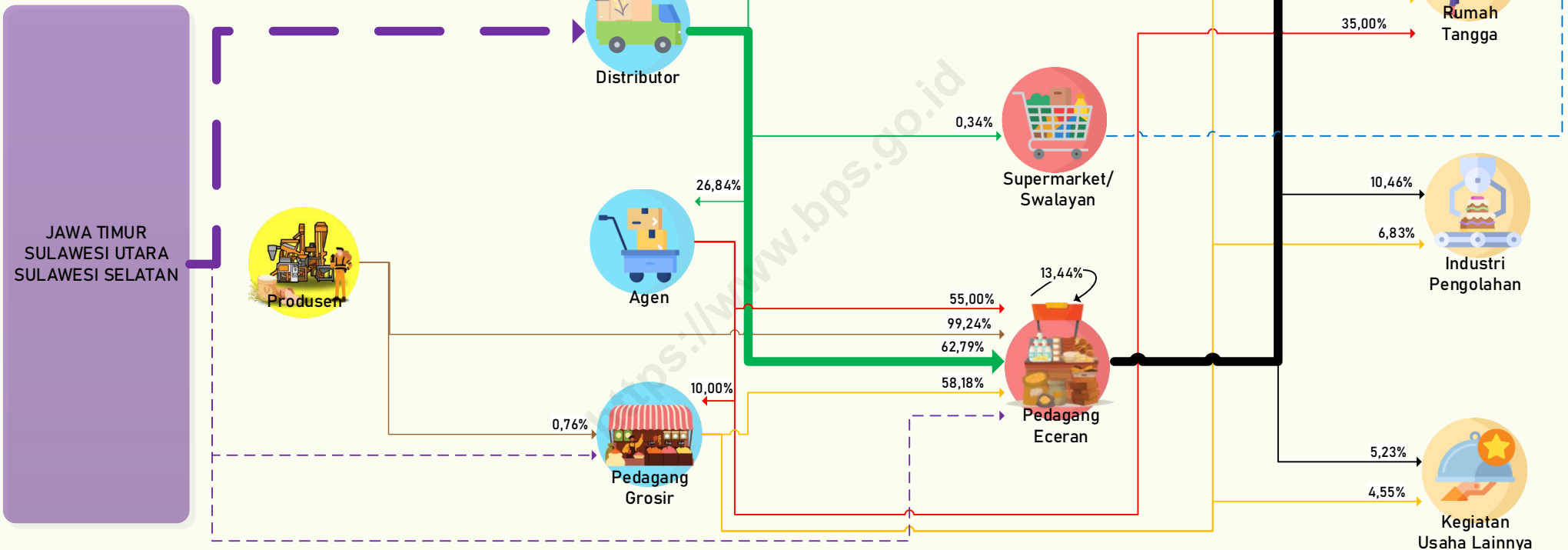
Produksi beras di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, sehingga hanya **sebagian kecil** kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI



Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Maluku Utara dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **5 pedagang perantara**, yaitu distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Luar Provinsi



Distributor

MPP = **17,39%**



Pedagang Eceran

MPP = **12,85%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Maluku Utara memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
32,47%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

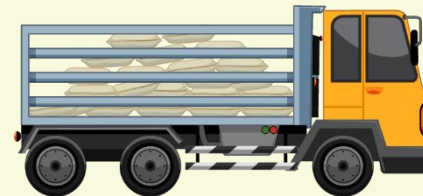
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Maluku Utara melakukan **pembelian** beras dari **3 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.



FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Maluku Utara:

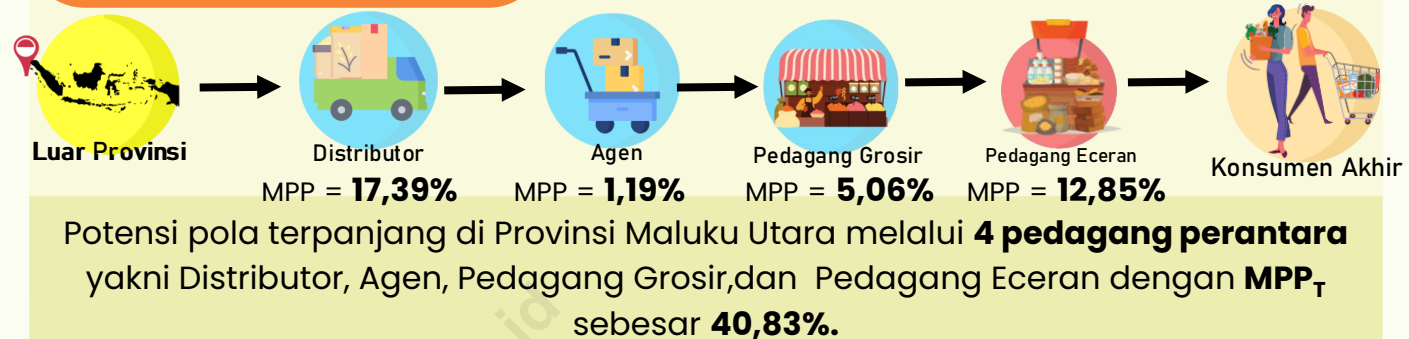
7,69%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



POLA TERPENDEK



PERSENTASE PELAKU USAHA

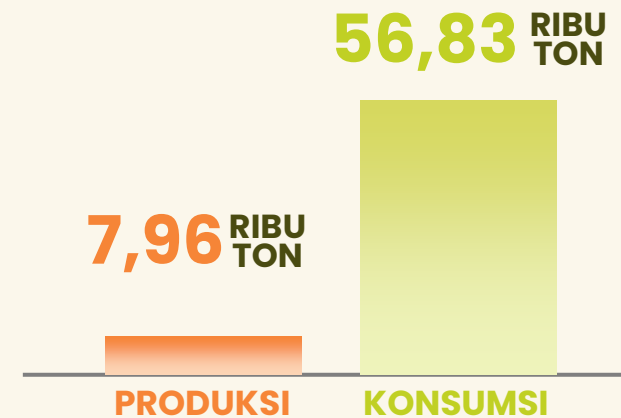
42,31%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau online.



PROVINSI

PAPUA BARAT



Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

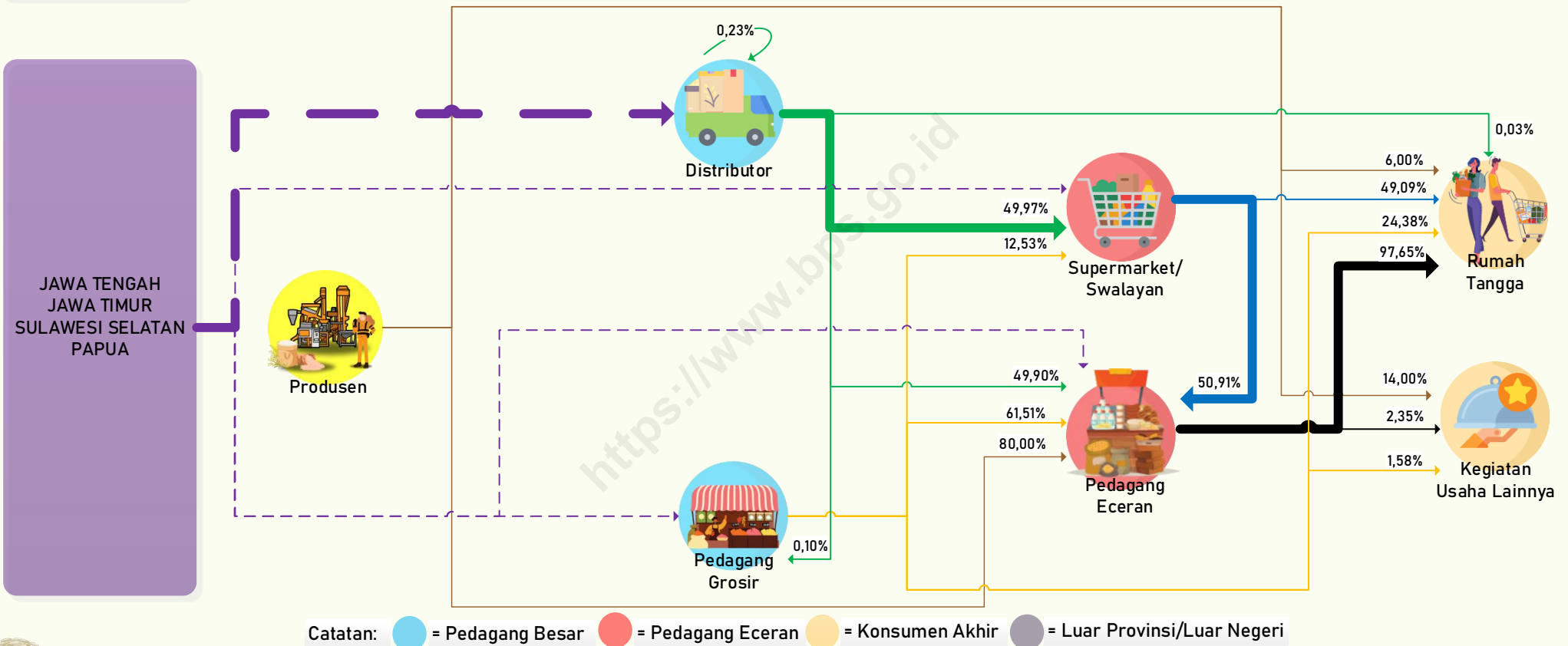
Produksi beras di Provinsi Papua Barat pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, sehingga hanya **sebagian kecil** kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

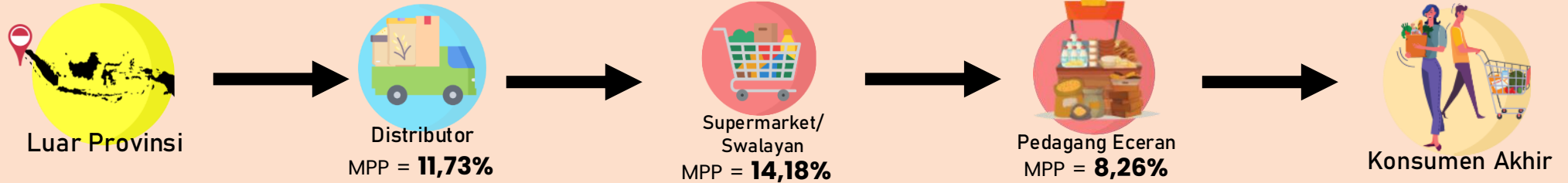
DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI



Distribusi beras di Provinsi Papua Barat dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **4 pedagang perantara**, yaitu distributor, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Pola utama di Provinsi Papua Barat memiliki **4 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **3 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
38,11%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

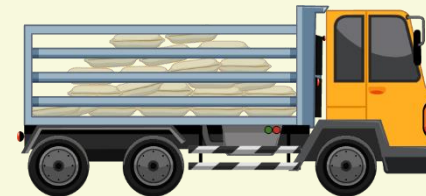
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Papua Barat melakukan **pembelian** beras dari **4 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.



FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Papua Barat:

18,52%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

3,70%

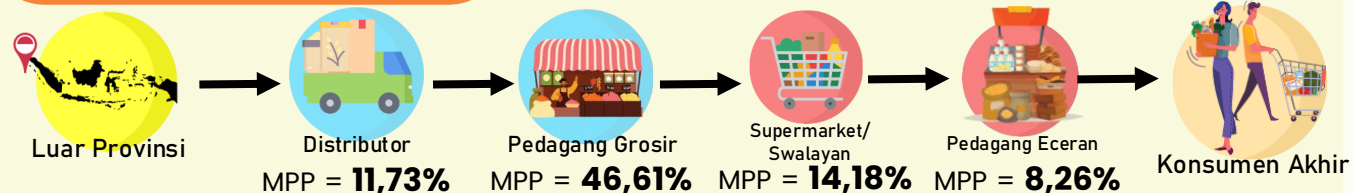
Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.



POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Papua Barat melalui **4 pedagang perantara** yakni Distributor, Pedagang Grosir, Supermarket/Swalayan, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **102,48%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Papua Barat melalui **1 pedagang perantara** yakni Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **8,26%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

11,11%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

PAPUA BARAT DAYA



0,40^{RIBU}
TON

PRODUKSI

59,95^{RIBU}
TON

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

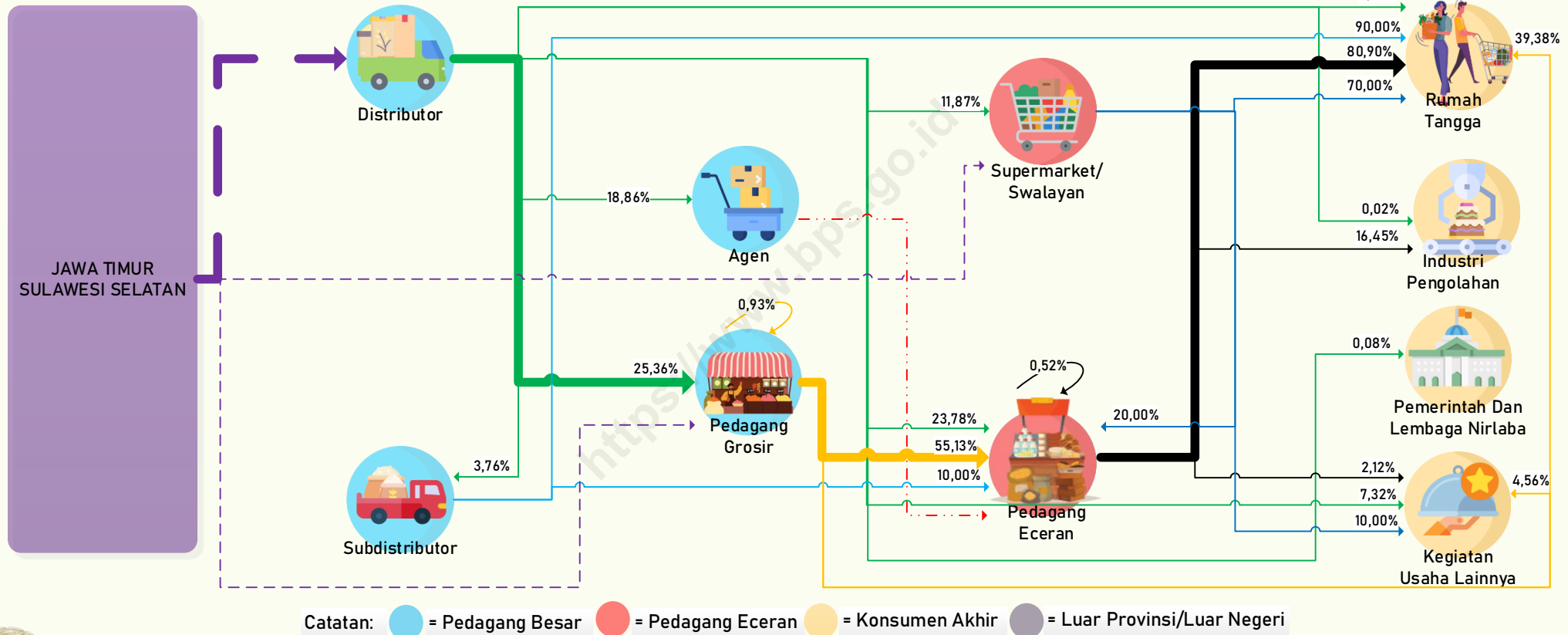
Produksi beras di Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, sehingga hanya **sebagian kecil** kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI



Distribusi beras di Provinsi Papua Barat Daya dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Luar Provinsi



Distributor
MPP = **14,36%**



Pedagang Grosir
MPP = **33,76%**



Pedagang Eceran
MPP = **7,53%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Papua Barat Daya memiliki **4 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **3 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
64,49%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

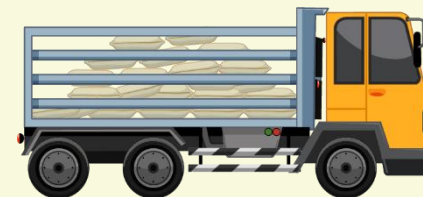
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Papua Barat Daya melakukan **pembelian** beras dari **2 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.



FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Papua Barat Daya:

11,54%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

34,62%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.



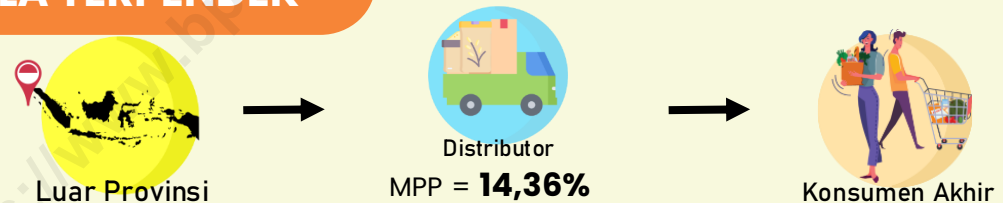
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Papua Barat Daya melalui **3 pedagang perantara** yakni Distributor, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **64,49%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Papua Barat Daya melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor dengan **MPP_T** sebesar **14,36%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

73,08%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

PAPUA



78,45 RIBU
TON

1,30 RIBU
TON

PRODUKSI

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)

Produksi beras di Provinsi Papua pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, sehingga hanya **sebagian kecil** kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**

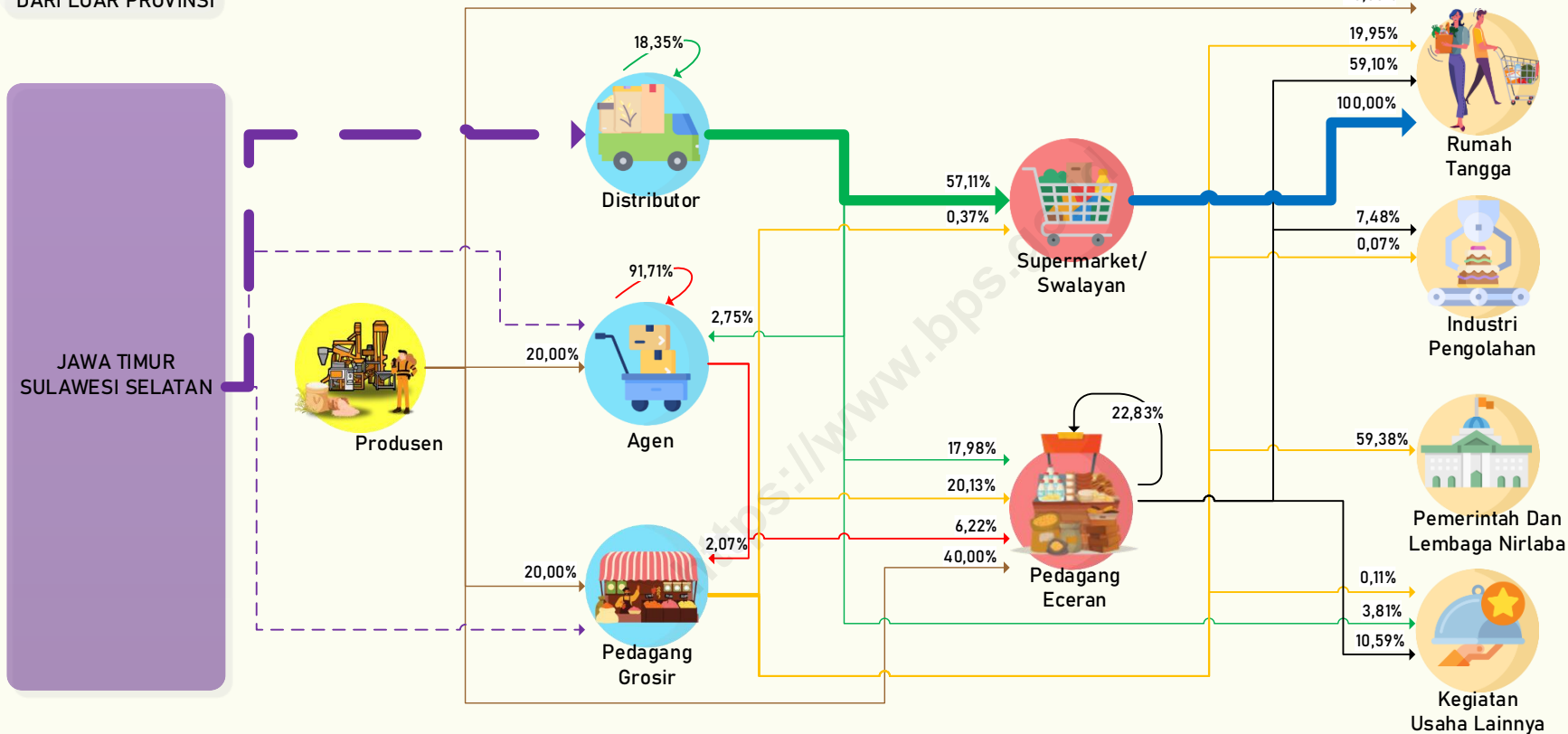


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN
DARI LUAR PROVINSI



Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Papua dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **5 pedagang perantara**, yaitu distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Luar Provinsi



Pedagang
Grosir

MPP = **28,15%**



Pedagang
Eceran

MPP = **11,47%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Papua memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL

42,85%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Papua melakukan **pembelian** beras dari **2 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.



Provinsi Papua melakukan **penjualan** beras ke **2 provinsi lain** yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua Pegunungan.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Papua:

21,74%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

4,35%

Terdampak
IMPOR

Masuknya pasokan komoditas dari luar negeri.

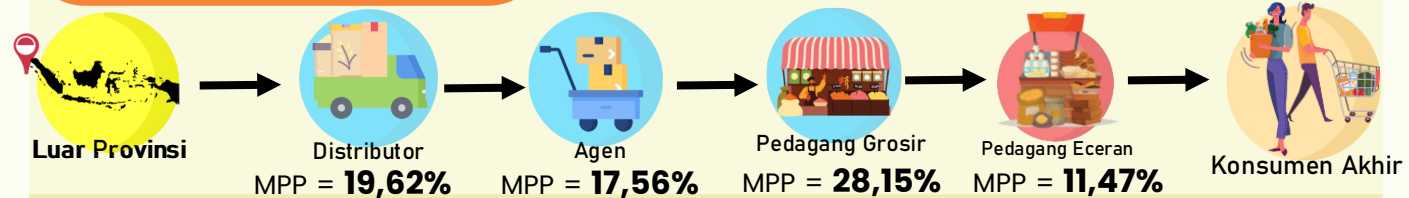
34,78%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.

POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Papua melalui **4 pedagang perantara** yakni Distributor, Agen, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **100,88%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Papua melalui **1 pedagang perantara** yakni Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **11,47%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

60,87%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

PAPUA SELATAN



191,91^{RIBU}
TON



38,49^{RIBU}
TON

PRODUKSI

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)



Produksi beras di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2025 mengalami **SURPLUS**, sehingga **sebagian besar** kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

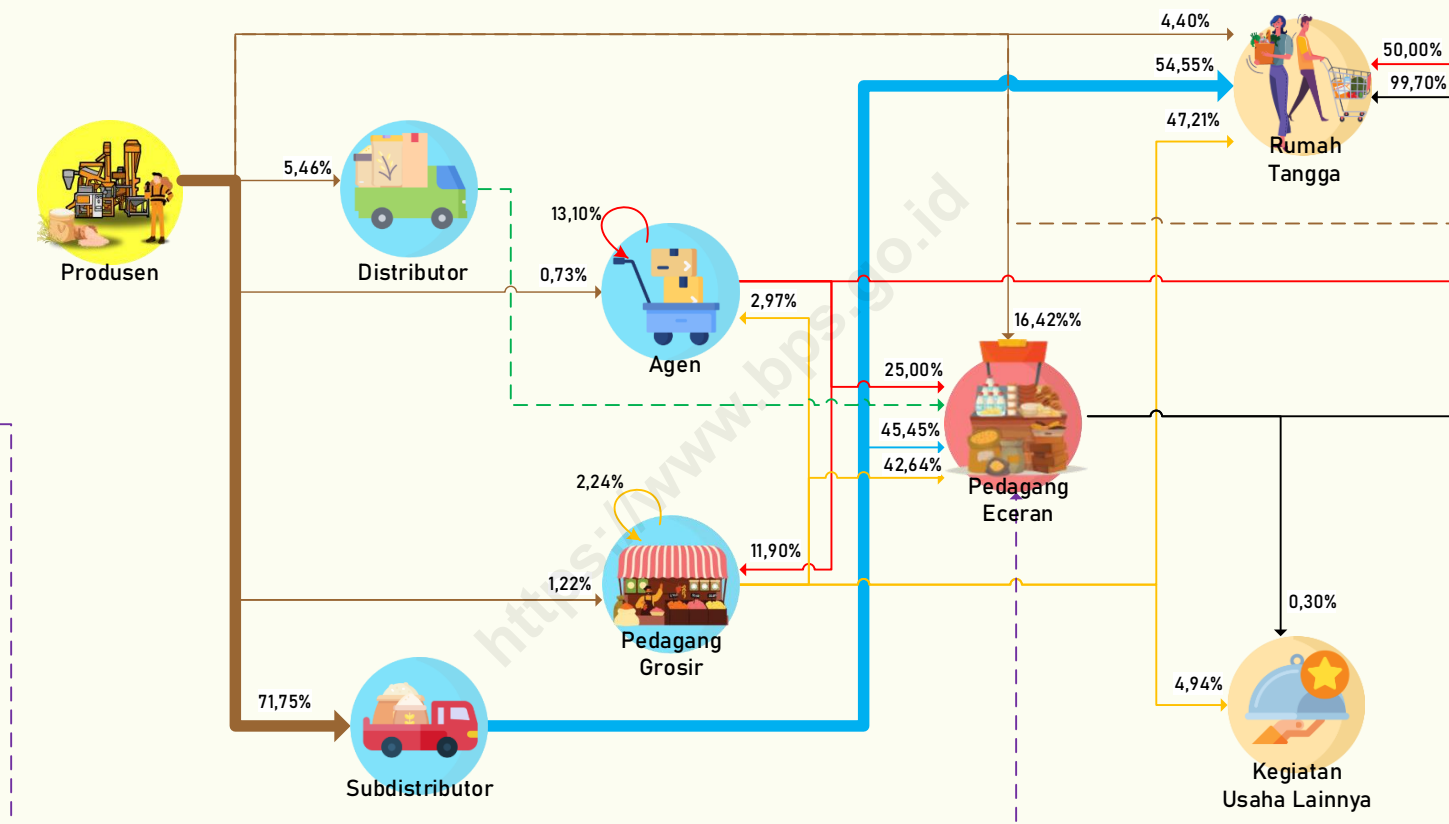
WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

JAWA TIMUR
PAPUA TENGAH

DALAM PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI

PAPUA PEGUNUNGAN



Catatan: ● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi beras di Provinsi Papua Selatan dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **5 pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Produsen



Subdistributor
MPP = 8,70%



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Papua Selatan memiliki **2 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **1 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
8,70%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Papua Selatan melakukan **pembelian** beras dari **2 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Timur dan Papua Tengah.



Provinsi Papua Selatan melakukan **penjualan** beras ke **1 provinsi lain** yaitu Provinsi Papua Pegunungan.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Papua Selatan:

2,86%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

5,71%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.



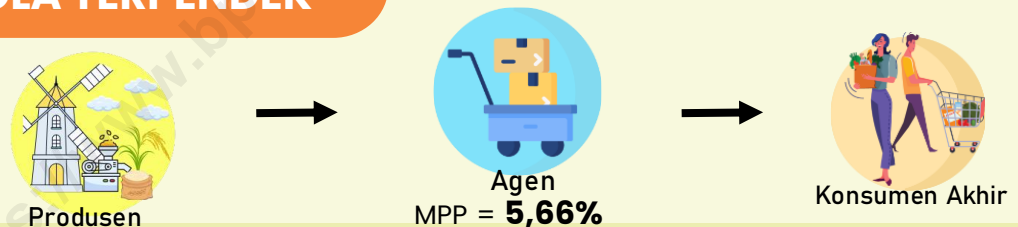
POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Papua Selatan melalui **3 pedagang perantara** yakni Agen, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **52,25%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Papua Selatan melalui **1 pedagang perantara** yakni Agen dengan **MPP_T** sebesar **5,66%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

20,00%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau online.



PROVINSI

PAPUA TENGAH



95,43^{RIBU}
TON

2,49^{RIBU}
TON

PRODUKSI

KONSUMSI

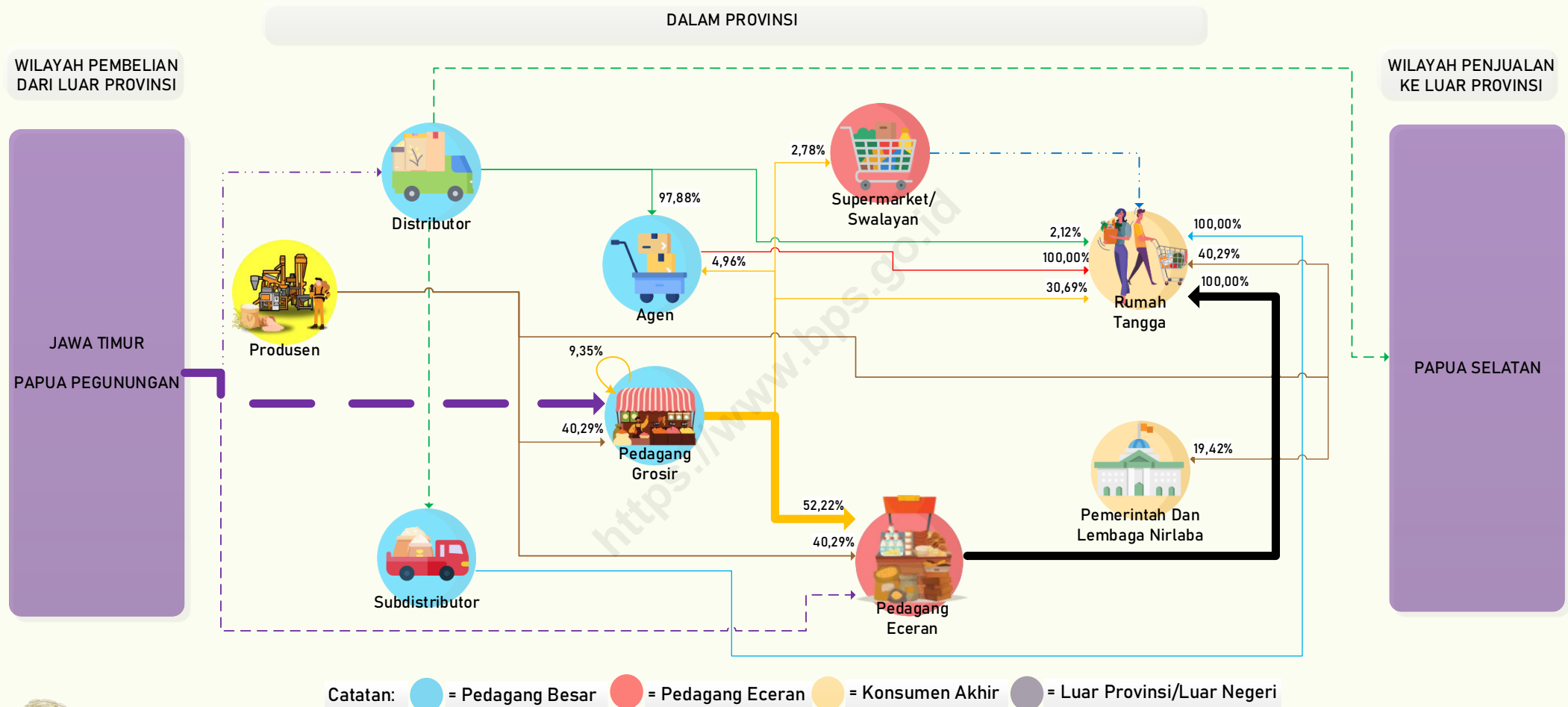
Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)



Produksi beras di Provinsi Papua Tengah pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, sehingga hanya **sebagian kecil** kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**



POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS



Distribusi beras di Provinsi Papua Tengah dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 6 **pedagang perantara**, yaitu distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Luar Provinsi



Pedagang Grosir
MPP = **25,12%**



Pedagang Eceran
MPP = **19,14%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Papua Tengah memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
49,07%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Papua Tengah melakukan **pembelian** beras dari **2 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Timur dan Papua Pegunungan.



Provinsi Papua Tengah melakukan **penjualan** beras ke **1 provinsi lain** yaitu Provinsi Papua Selatan.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Papua Tengah:

3,33%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

26,67%

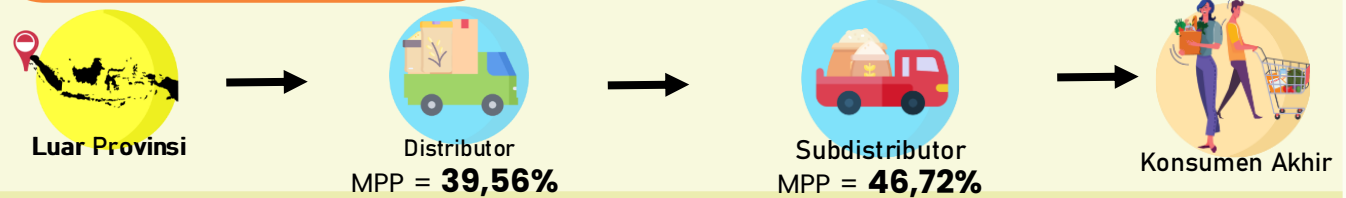
Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.



POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Potensi pola terpanjang di Provinsi Papua Tengah melalui **2 pedagang perantara** yakni Distributor dan Subdistributor dengan **MPP_T** sebesar **94,91%**.

POLA TERPENDEK



Potensi pola terpendek di Provinsi Papua Tengah melalui **1 pedagang perantara** yakni Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **19,14%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

36,67%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.



PROVINSI

PAPUA PEGUNUNGAN



0,28^{RIBU}
TON

PRODUKSI

75,05^{RIBU}
TON

KONSUMSI

Sumber: Badan Pangan Nasional (Bapanas, 2025)



Produksi beras di Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2025 mengalami **DEFISIT**, sehingga hanya **sebagian kecil** kebutuhan konsumsi beras **dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi.**

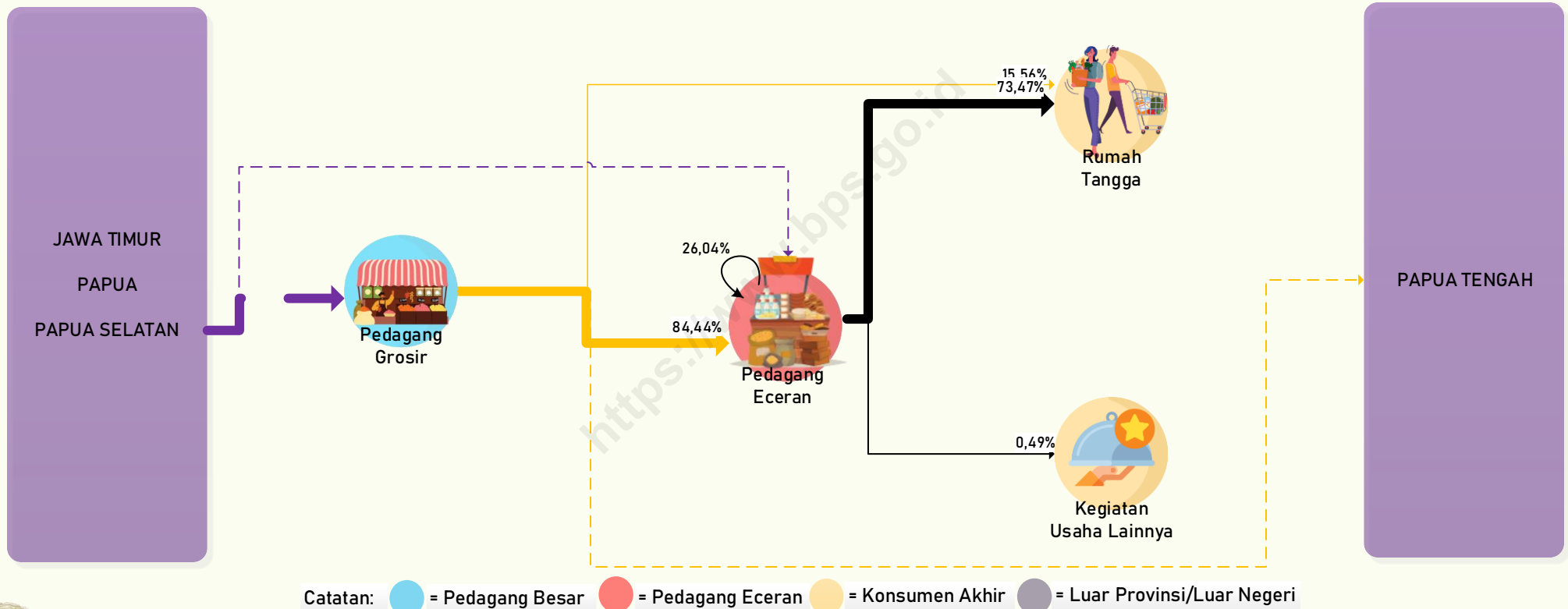


POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BERAS

DALAM PROVINSI

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN
KE LUAR PROVINSI



Distribusi beras di Provinsi Papua Pegunungan dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 2 **pedagang perantara**, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran.

POLA UTAMA DISTRIBUSI BERAS



Luar Provinsi



Pedagang Grosir
MPP = **28,67%**



Pedagang Eceran
MPP = **107,76%**



Konsumen Akhir

Pola utama di Provinsi Papua Pegunungan memiliki **3 rantai** dengan pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**.



MPP TOTAL
167,32%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



Margin Perdagangan dan Pengangkutan(MPP)

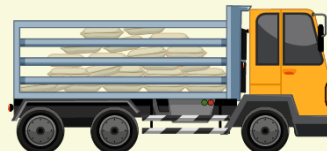
Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

PENDISTRIBUSIAN DARI/KE LUAR PROVINSI

Provinsi Papua Pegunungan melakukan **pembelian** beras dari **3 provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Timur, Papua, dan Papua Selatan.



Provinsi Papua Pegunungan melakukan **penjualan** beras ke **1 provinsi lain** yaitu Provinsi Papua Tengah.

FENOMENA PERDAGANGAN MENURUT PERSEPSI PEDAGANG

Selama Januari-Juni 2025, pedagang beras di Provinsi Papua Pegunungan:

16,13%

Terdampak
OPERASI PASAR

Kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk Mengendalikan dan menjaga stabilitas harga.

19,35%

Terdampak
BENCANA ALAM

Bencana akibat peristiwa alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, angin topan, dan tanah longsor.



POTENSI POLA TERPANJANG DAN TERPENDEK

POLA TERPANJANG



Luar Provinsi



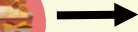
Pedagang Grosir

MPP = **28,67%**



Pedagang Eceran

MPP = **107,76%**



Konsumen Akhir

Potensi pola terpanjang di Provinsi Papua Pegunungan melalui **2 pedagang perantara** yakni Pedagang Grosir dan Pedagang Eceran dengan **MPP_T** sebesar **167,32%**.

POLA TERPENDEK



Luar Provinsi



Pedagang Grosir

MPP = **28,67%**



Konsumen Akhir

Potensi pola terpendek di Provinsi Papua Pegunungan melalui **1 pedagang perantara** yakni Pedagang Grosir dengan **MPP_T** sebesar **28,67%**.

PERSENTASE PELAKU USAHA

16,13%

Persentase pelaku usaha yang melakukan penjualan atau pembelian melalui internet atau *online*.





Hasil Survei Pola Distribusi Tahun 2025 menunjukkan bahwa pendistribusian beras dari produsen hingga ke konsumen akhir pada tahun 2025 dapat melibatkan dua sampai dengan tujuh pelaku usaha perdagangan. Pola utama distribusi perdagangan yang terbentuk secara nasional adalah produsen → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir. Pola utama tersebut menunjukkan bahwa jalur distribusi dengan persentase volume penjualan komoditas beras terbesar dari produsen hingga ke konsumen akhir terdiri dari tiga rantai dengan pendistribusian melibatkan dua pedagang perantara yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Namun, pola distribusi perdagangan tersebut berpotensi menjadi lebih panjang karena banyaknya pelaku perdagangan yang terlibat, sehingga rantai

distribusi yang terbentuk menjadi kurang efisien dan dapat berdampak pada kenaikan harga di tingkat konsumen yang diindikasikan dengan tingginya MPP total (MPP_T).

Jika ditinjau menurut provinsi, pola utama distribusi perdagangan beras dengan MPP_T terendah terjadi di Jawa Tengah yang melalui jalur produsen → pedagang eceran → konsumen akhir, dengan MPP_T sebesar 5,00 persen. Sebaliknya, pola utama distribusi perdagangan beras dengan MPP_T tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan yang melalui jalur luar provinsi → Pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir, dengan MPP_T sebesar 167,32 persen.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Konsumsi Bahan Pokok 2019*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Distribusi Perdagangan Komoditas Beras di Indonesia 2024*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Welfare Indicators Volume 53 2024*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Berita Resmi Statistik No.112/12/Th. XXVIII 1 Desember 2025*. Luas Panen dan Produksi Padidi Indonesia (Hasil KSA Amatan Oktober 2025) Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Volume 15, Nomor 11, Oktober 2025*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2025, Volume 29, Nomor 2*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2025, Volume 17, Nomor 2*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia Volume 53 2025*. Jakarta.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan*. Jakarta
- Kementerian Keuangan. (2012). *Permenkeu RI nomor 224/Pmk.011/2012 tentang Ketentuan Pemungutan Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan. (2020). *Permendag RI nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan*. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. (2025). dikutip pada tanggal 2 Desember 2025.
<https://www.pertanian.go.id/?show=news&act=view&id=7255>
- www.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6 – 8 Jakarta 10710

Telp.: (021) 3481195, 3842508, 3810291-4, Fax.: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

ISSN 2745-6730



9 772745 673009